

CARA

Edisi April 2026

PANDANG

Inspirasi Terkini!

KREATIF DI
PERSIMPANGAM HUKUM

PP TUNAS DAN
PERTANYAAN BESAR



**GIZI, DIPLOMASI, DAN INTEGRITAS:
WAJAH INDONESIA HARI INI**

Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga
Rp500 Ribu

Special Rate
Fasilitas Pinjaman

Bonus hingga
100 Kupon Undian
rejek*i* **wondr** BNI

Cash Reward **1%**
untuk Perusahaan



Dapatkan
kesempatan mengikuti
rejek*i* wondr BNI

Informasi Selengkapnya
bni.id/payroll

DAFTAR ISI

INDONESIA HARI INI: NUTRISI RAKYAT, DIPLOMASI PANAS, DAN UJIAN INTEGRITAS	5
TAJUK	
KREATIF DI PERSIMPANGAN HUKUM KASUS AMSAL SITEPU DI KARO MEMICU PERDEBATAN NASIONAL: DI MANA BATAS KORUPSI DALAM KARYA KREATIF	12
HUKUM	
MEMBENDUNG POLITIK DINASTI	16
POLITIK	
MENGUJI JANJI PRABOWO KEJAR AKTOR INTELEKTUAL PENYIRAMAN AIR KERAS ANDRIE YUNUS	22
POLITIK	
MEMBUNGKAM SUARA KRITIS	26
EDUKASI	
TKA SMP 2026 UJIAN, KEJUJURAN, DAN SEMANGAT KOLEKTIF	30
KETEGASAN MENDIKDASMEN DI BALIK TKA 2026: INTEGRITAS UJIAN DAN HARAPAN GENERASI MUDA	34
MENDIKDASMEN TEKANKAN KEJUJURAN DI SMPN 1 SURABAYA	36
PENJARINGAN DATA GURU BELUM BERSERDIK: LANGKAH PEMERINTAH MENYELESAIKAN SERTIFIKASI	38
PENJARINGAN DATA PPG: LANGKAH NYATA TUNTASKAN SERTIFIKASI GURU	40



HUKUM **GUS YAQUT MEMANG "ISTIMEWA" 6**

KPK memberikan perlakuan istimewa kepada Gus Yaqut. Alasan kesehatan status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah. Dan dia pun bisa merayakan momen lebaran bersama keluarga di rumah.

PP TUNAS DAN PERTANYAAN BESAR "MAMPUKAH MENJAGA TUNAS BANGSA"	42	NO KINGS: TUNTUTAN PEMAKZULAN TRUMP YANG MENGGUNCANG AMERIKA	70
KOMINFO		POLITIK LUAR NEGERI	
MBG: ANTARA HARAPAN, ANGGARAN, DAN PERTANYAAN BESAR	50	MENELUSURI ARAH POLITIK LUAR NEGERI PRABOWO DI TENGAH PUSARAN GEOPOLITIK GLOBAL	74
EKONOMI		FILM	
SKANDAL DI BALIK PERANG IRAN VS AS DAN ISRAEL: TRUMP DIGUNCANG TUDUHAN INSIDER TRADING	54	TUNGGU AKU SUKSES NANTI, MEJA MAKAN SEBAGAI METAFORA LUKA DAN HARAPAN	80
INTERNASIONAL		NOVEL	
KETIKA SELAT HORMUZ JADI ANCAMAN BAGI SELURUH DUNIA	62	CARSTENZ: GUNUNG, MIMPI, DAN LUKA YANG DISEMBUHKAN	82

“Ide makan bergizi gratis memang terdengar indah, tapi kenyataannya di sekolah anak saya, distribusinya sering terlambat dan menunya tidak selalu sesuai kebutuhan gizi. Kadang hanya sekadar nasi bungkus seadanya. Kalau begini, bagaimana bisa disebut investasi masa depan? Jangan sampai program besar ini hanya jadi pencitraan tanpa kualitas.”

Rina, Bekasi

“Diplomasi Prabowo di tengah geopolitik panas memang terlihat aktif, tapi saya khawatir Indonesia justru kehilangan arah. Terlalu sering bicara soal kemandirian, tapi praktiknya masih bergantung pada kekuatan besar. Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar pidato di forum internasional. Jangan sampai Indonesia hanya jadi penonton di panggung dunia.”

Budi, Surabaya

“Kasus Andri Yunus, polemik kebijakan Gus Yaqut, dan sorotan terhadap KPK membuat saya semakin pesimis. Hukum di negeri ini terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. KPK yang dulu jadi harapan kini seperti kehilangan taring. Kalau begini terus, kepercayaan publik akan runtuh, dan rakyat semakin apatis terhadap keadilan.” —

Siti, Yogyakarta



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

INDONESIA HARI INI:

NUTRISI RAKYAT, DIPLOMASI PANAS, DAN UJIAN INTEGRITAS

Indonesia tengah memasuki sebuah fase penting yang memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan bangsa.

Di satu sisi, pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis sebagai simbol keberpihakan pada rakyat kecil dan investasi jangka panjang bagi generasi muda. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan sebuah pernyataan politik bahwa masa depan bangsa dimulai dari meja makan anak-anak sekolah. Di ruang kelas, senyum siswa yang menerima makanan bergizi menjadi wajah harapan baru: bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di panggung internasional, Presiden Prabowo Subianto menghadapi geopolitik yang semakin panas. Ketegangan global, rivalitas kekuatan besar, dan dinamika kawasan menuntut Indonesia memainkan diplomasi yang cerdas. Prabowo tampil dengan strategi politik luar negeri yang menekankan kemandirian, kerja sama regional, dan keberanian mengambil posisi di tengah arus besar dunia. Diplomasi ini bukan hanya soal hubungan antarnegara, tetapi juga

tentang menjaga martabat bangsa di tengah pusaran geopolitik yang membara.

Di ranah hukum, publik disuguhi drama yang tak kalah penting. Kasus Andri Yunus menjadi sorotan, mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan pertanyaan mendasar tentang keadilan. Di saat yang sama, Gus Yaqut menegaskan moderasi beragama sebagai kebijakan yang menjaga keseimbangan di tengah masyarakat plural. Sementara itu, KPK kembali berada di bawah sorotan: apakah lembaga antikorupsi ini masih mampu menjaga integritas di tengah tekanan politik dan hukum yang semakin berat?

Semua isu ini berpadu menjadi satu narasi besar: Indonesia sedang diuji di berbagai lini. Dari dapur sekolah hingga meja perundingan internasional, dari ruang sidang pengadilan hingga kebijakan keagamaan, bangsa ini berada di persimpangan. Tajuk majalah ini mengajak pembaca melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan program sosial, tetapi juga sebagai aktor global yang berjuang menjaga integritas hukum dan nilai keadilan.



GUS YAQUT MEMANG "ISTIMEWA"

KPK memberikan perlakuan istimewa kepada Gus Yaqut. Alasan kesehatan status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah. Dan dia pun bisa merayakan momen lebaran bersama keluarga di rumah.

Upaya penegakan hukum di Indonesia kembali dipertanyakan oleh publik dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan perlakuan istimewa kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dengan mengalihkan status penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah.

Seperti diketahui bahwa Gus Yaqut

ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2026 dan telah ditahan sejak 12 Maret 2026. Menjelang lebaran, tepatnya pada Kamis, 19 Maret 2026, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah.

Pengalihan itu dilakukan berdasarkan permohonan keluarga yang diajukan pada 17 Maret 2026 dengan alasan kesehatan. Permohonan tersebut dikabulkan dengan merujuk

Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Namun, pengalihan status penahanan Gus Yaqut oleh KPK tidak transparan dan terkesan diam-diam. Dan, akhirnya ini diungkapkan oleh istri mantan Wakil menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebanezer (Noel), Silvia Rinita Harefa usai menjenguk Noel di Rutan KPK pada momen Lebaran, Sabtu, 21 Maret 2026.

Silvia mengatakakan bahwa suaminya beserta tahanan KPK yang lain tidak melihat keberadaan Gus Yaqut di tahanan. Kemudian informasi tersebut menyebar luas dan menjadi



Silvia Rinita Harefa

polemik di masyarakat.

Polemik pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuat KPK mendapatkan sorotan tajam dari publik. KPK dinilai memberikan perlakuan Istimewa kepada Gus Yaqut. Dan publik pun meragukan keseriusan lembaga anti rasuah ini dalam upaya pemberantasan korupsi di republik ini.

Menjadi preseden buruk dalam sejarah KPK

Kritik keras pun disampaikan oleh eks penyidik KPK, Yudi Purnomo yang mempertanyakan transparansi lembaga tersebut terkait pengalihan penahanan terhadap Gus Yaqut.

Dia mengatakan KPK terkesan diam-diam terkait hal ini. Namun, keterbukaan publik baru dilakukan setelah adanya informasi dari pihak luar yakni setelah istri dari eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yakni Silvia Rinita Harefa, mengungkap bahwa Gus Yaqut tidak terlihat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

“Transparansi ke publik baru ada ketika ada keluarga tahanan yang menyampaikan ke publik mengenai Gus Yaqut yang tidak berada di tahanan. KPK baru kemudian sampaikan ada



Boyamin Saiman

penangguhan penahanan dengan dalih menjadi tahanan rumah,” kata Yudi di Jakarta, Senin, 23 Maret 2026.

Dia pun menilai bahwa kebijakan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah tersebut berpotensi menimbulkan preseden yang kurang baik dalam penegakan hukum. Ia menilai, keputusan tersebut dapat memicu tuntutan serupa dari tahanan lain.

“Ketika Yaqut dapat status tahanan rumah maka semua tahanan tentu akan meminta penangguhan dari tahanan rutan dan seharusnya mereka dapat juga karena asas keadilan,” ujarnya.

Yudi juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut berisiko merusak sistem pemberantasan korupsi yang selama ini dibangun KPK dengan standar integritas tinggi.

“Ini akan kacau, akan merusak sistem pemberantasan korupsi dengan integritas tinggi yang dibangun KPK sejak berdiri,” tegasnya.

Kritik tajam juga disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurutnya keputusan KPK mengalihkan status penahanan Gus Yaqut merupakan preseden buruk dalam sejarah lembaga antirasuah

tersebut.

Dia mengatakan sepanjang sejarah berdirinya KPK sejak tahun 2023 belum pernah ada tersangka yang penahanannya dialihkan dari Rutan menjadi tahanan rumah, kecuali dalam kondisi sakit parah.

Sehingga dirinya merasa sangat terkejut atas keputusan KPK yang mengalihkan status penahanan Gus Yaqut. Sehingga sangat wajar publik menilai bahwa KPK memberikan perlakuan khusus atau Istimewa kepada mantan Menteri Agama ini.

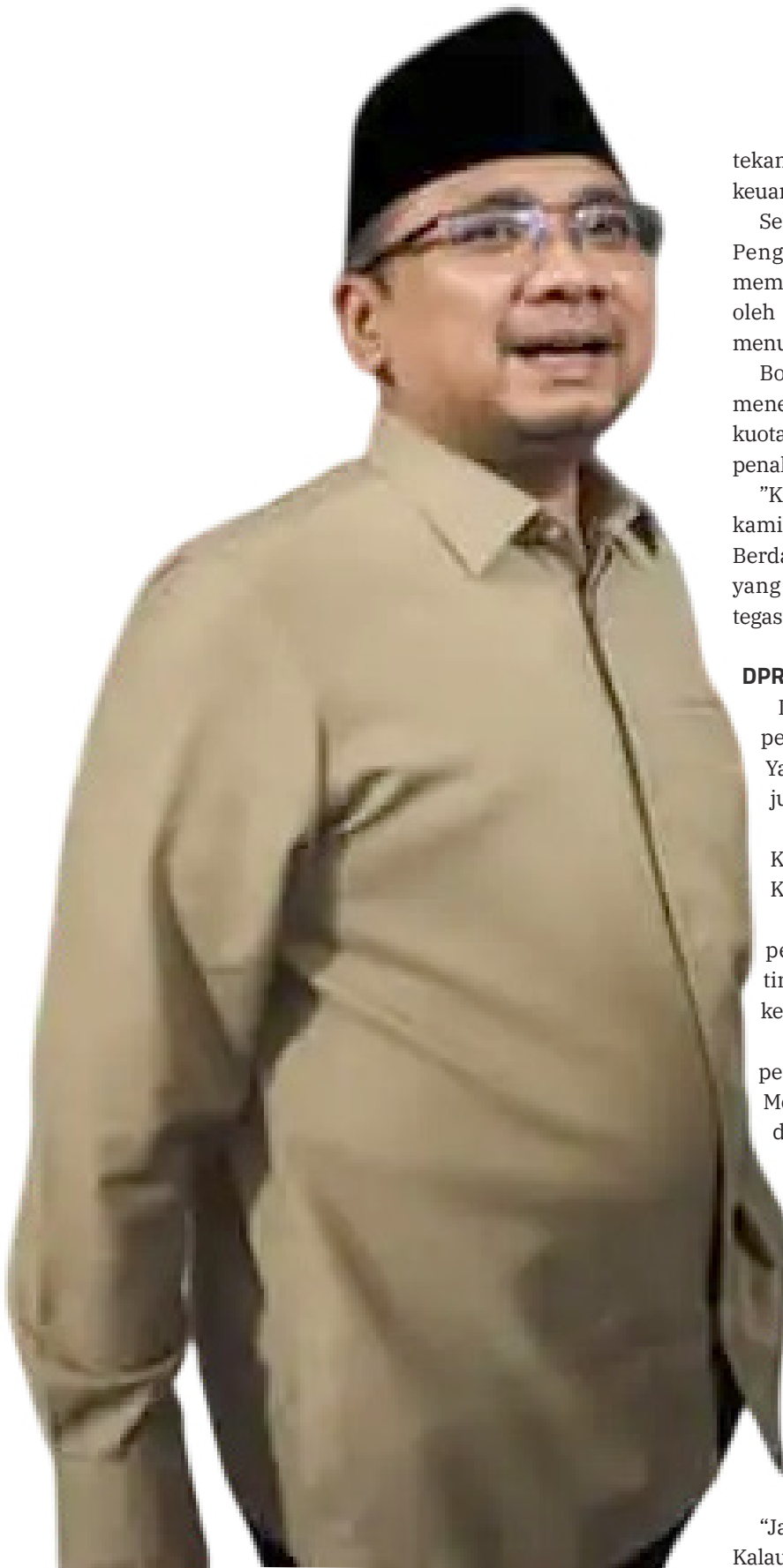
“Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia (MURI). Sejak berdiri tahun 2003 sampai sekarang, belum pernah melakukan pengalihan penahanan. Hari ini kita dikejutkan dengan pengalihan penahanan mantan Menteri Agama,” ujar Boyamin.

Selanjutnya, dia pun merasa kecewa sebab cara KPK melakukan pengalihan penahanan ini yang terkesan diam-diam. Informasi ini justru pertama kali mencuat dari keluarga tahanan lain, yakni istri dari Immanuel Ebenezer (Noel).

“Ini sangat mengecewakan. Dilakukan diam-diam, tahunya setelah istri Noel memberitahukan kepada media massa. Tahanan lain saja komplain, apalagi masyarakat Indonesia,”katanya.

Menurutnya apa yang dilakukan KPK saat ini bisa merusak sistem hukum di KPK sendiri, serta memicu kecemburuan serta tuntutan serupa dari tahanan korupsi lainnya. Jika tidak ada alasan medis yang jelas, Boyamin menilai hal ini sebagai bentuk diskriminasi hukum.

“Selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik. Sekarang menjadi bisa. Masyarakat bisa menduga-duga, apakah ini ada



tekanan kekuasaan atau lebih parah lagi tekanan keuangan?” tegas Boyamin.

Sebagai tindak lanjut, MAKI mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera turun tangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau penyidik KPK tanpa harus menunggu aduan resmi.

Boyamin juga menegaskan tidak segan untuk menempuh jalur hukum jika penanganan kasus kuota haji ini menjadi tidak serius akibat pengalihan penahanan tersebut.

”Kalau ini kelihatan tidak serius atau mangkrak, kami akan tempuh upaya gugatan praperadilan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025, penundaan yang tidak sah bisa jadi objek praperadilan,” tegasnya.

DPR: Ini tidak lazim

Langkah KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah juga menuai kritik tajam dari anggota DPR.

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra yang menilai KPK melakukan tindakan yang tidak lazim.

Dia mengatakan secara regulasi penangguhan penahanan memang diperbolehkan, tetapi tindakan itu harus mempertimbangkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

”Kalau masalah kewenangan penahanan, penyidikan, itu kan semua ada di tangan KPK. Memang berdasarkan UU KUHAP, orang itu bisa ditahan di rumah tahanan negara, tahanan rumah, atau tahanan kota. Tapi ini kan menurut saya tidak lazim,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Dan dia pun merasa khawatir kebijakan KPK ini akan memicu tuntutan serupa dari para tersangka korupsilainnya. Jika tuntutan yang serupa tidak diberikan, maka KPK akan dipandang memberikan keistimewaan kepada Gus Yaqut. Menurutnya ini sangat tidak baik dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

”Jadi nanti semua pada menuntut persamaan. Kalau si A boleh, kenapa si B enggak boleh?” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepastasan dan kelayakan sebuah tindakan penegakan hukum menjadi poin krusial yang harus dijaga.

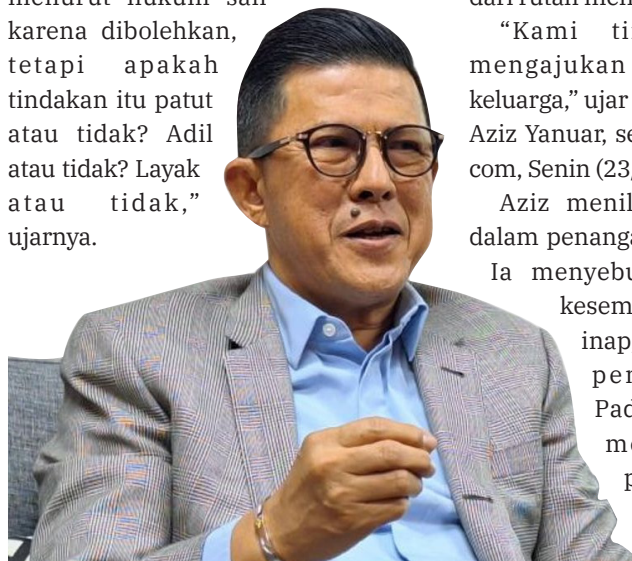
“Masyarakat itu di dalam melihat tindakan aparat penegak hukum, pertanyaan pertama itu adalah apakah tindakannya itu sudah patut? Sudah layak? Sudah menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat?” katanya.

Apalagi, menurutnya, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama bangsa. Oleh karena itu, masalah penahanan harus dipertimbangkan semaksimal mungkin demi kepentingan negara.

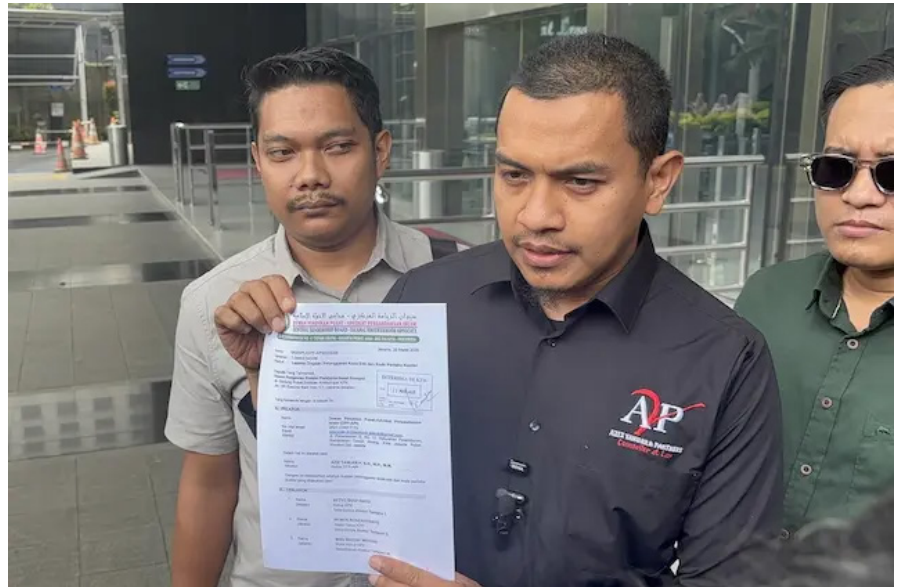
“Menurut saya itu harus selektif sekali. Alasan objektifnya harus ada. Alasan objektif dan alasan subjektif itu harus selektif mungkin. Misalnya, orang dalam keadaan sakit atau mempunyai gangguan kesehatan dan sebagainya, itu boleh. Silakan, alasan kemanusiaan,” jelasnya.

Selanjutnya, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan KPK untuk mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dalam setiap menentukan sikap.

“Pertanyaannya, tindakan KPK itu menurut hukum sah karena dibolehkan, tetapi apakah tindakan itu patut atau tidak? Adil atau tidak? Layak atau tidak,” ujarnya.



Soedeson Tandra



Aziz Yanuar

Noel ajukan pengalihan status tahanan

Apa yang dikhawatirkan pun terjadi, keluarga eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel berencana mengajukan permohonan pengalihan tahanan ke majelis hakim.

Permohonan ini diajukan setelah KPK mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari rutan menjadi tahanan rumah.

“Kami tim PH berencana mengajukan atas permintaan keluarga,” ujar Penasihat Hukum Noel, Aziz Yanuar, seperti dilansir Kompas.com, Senin (23/3/2026).

Aziz menilai ada ketidakadilan dalam penanganan perkara kliennya.

Ia menyebut Noel tidak diberi kesempatan menjalani rawat inap, meski membutuhkan penanganan medis. Padahal, kata dia, Noel mengalami kendala pada pembuluh darah

di kepala sehingga membutuhkan tindakan dokter di rumah sakit.

“Kami memandang sebelumnya bahwa terjadi ketidakadilan yang nyata. Klien kami tidak diberi kesempatan untuk rawat inap pekan kemarin atas keputusan majelis hakim yang didasarkan pada pertimbangan dari KPK,” kata Aziz.

Dia juga menyinggung pengalihan penahanan terhadap Yaqut sebagai perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada tahanan lain. Permohonan pengalihan tahanan untuk Noel akan diajukan setelah masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 H berakhir.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa pengajuan pengalihan status tahanan kliennya sebagai upaya menguji konsistensi penegakan hukum KPK yang dinilai tebang pilih.

“Semangat dari keluarga dan dari tim kuasa hukum itu adalah mau melihat sejauh mana sih penegakan hukum ini berkeadilan atau hanya tebang pilih?” kata Aziz.

Aziz menyoroti langkah KPK yang

mengalihkan jenis tahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Namun, KPK mengabaikan pengajuan pemeriksaan kesehatan yang ingin dilakukan Noel.

“Artinya tentu saja terjadi tebang pilih pada KPK saat Pak Noel dan juga saat sekarang mantan Menag Yaqut,” katanya.

KPK Minta Maaf

KPK menyampaikan permohonan maaf telah membuat kegaduhan di tengah perayaan lebaran atas polemik pengalihan penahanan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah di kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Permohonan maaf disampaikan langsung oleh Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mempertimbangkan dampak reaksi publik atas kebijakan tersebut. Dan dia mengatakan mengatakan pengalihan tahanan rumah itu merupakan keputusan lembaga.

“Tentu ya dalam, apa namanya, rapat tersebut juga sudah dibicarakan hal tersebut,” ujarnya kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dikutip Jumat, 27 Maret 2026.

Dirinya pun mengakui ikut dalam rapat penentuan pengalihan tahanan rumah tersebut. Dia mengatakan bagaimana pengambilan keputusan itu akan disampaikan ke Dewan pengawas (Dewas).

“Saya ikut rapatnya dalam hal itu, saya salah satu yang ikut rapat di situ. Jadi nanti juga kan ini disampaikan ya dilaporkan ke Dewas.

Tentunya nanti di Dewan Pengawas akan dibuka bagaimana pengambilan keputusan itu. Ditunggu saja,”katanya.

Selanjutnya dia membantah pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. KPK menegaskan pengalihan status tahanan itu merupakan keputusan lembaga.

“Tidak sembunyi-sembunyi juga karena pihak-pihak yang menurut undang-undang harus menerima pemberitahuan sudah kami berikan pemberitahuan,”ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa pertimbangan pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut salah satunya karena strategi penyidikan untuk percepatan penanganan perkara ini. Dia mengatakan pihak yang seharusnya menerima pemberitahuan pengalihan tahanan itu sudah diberikan.

“Nah, itu saya sampaikan itu adalah strategi terkait dengan penyidikan khususnya bagaimana caranya kita supaya mendapat

percepatan dalam penanganan perkara ini. Dan salah satunya adalah dukungan dari publik tentunya ya yang kami sangat harapkan,” ujar Asep.

Dan dia pun menegaskan pengalihan tahanan rumah Yaqut merupakan keputusan lembaga. Dia mengatakan pengalihan tahanan itu juga sudah dilakukan sesuai prosedur.

“Jadi begini, tentunya terkait dengan permohonan tersebut tentunya itu sudah apa namanya dilakukan rapat atau ekspos ya jadi itu bukan keputusan pribadi jadi itu adalah keputusan lembaga. Dan tentunya mempertimbangkan yang pertama adalah norma hukumnya, norma hukumnya ada atau tidak,”jelasnya.

“Yang tadi kan saya sampaikan bahwa kita melihat norma hukumnya ada. Di UU yang lama ada di KUHAP ya khususnya KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 itu diatur di Pasal 22 dan 23. Di UU Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHAP yang baru diatur di Pasal 108 ya di sana ada ayat 1 sampai dengan 11 gitu,



Asep Guntur Rahayu

Perjalanan Kasus Kuota Haji

9 AGUSTUS 2025

● KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

11 AGUSTUS 2025

● KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Tiga orang yang dimaksud adalah Menteri Agama, Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku staf Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

9 JANUARI 2026

● KPK mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Gus Yaqut dan Gus Alex. Namun, Gus Yaqut mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

19 FEBRUARI 2026

● KPK mengumumkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri hanya untuk Gus Yaqut dan Gus Alex. Sementara, Fuad tidak diperpanjang.

27 FEBRUARI 2026

● KPK mengumumkan telah menerima audit dari BPK RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

11 MARET 2026

● Majelis hakim PN Jaksel menolak permohonan praperadilan Yaqut.





KREATIF DI PERSIMPANGAN HUKUM **KASUS AMSAL SITEPU DI KARO MEMICU PERDEBATAN NASIONAL: DI MANA BATAS KORUPSI DALAM KARYA KREATIF**

Di ruang sidang Pengadilan Negeri Medan, udara terasa menyesakkan. Amsal Christy Sitepu (42), seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, duduk di kursi pesakitan dengan wajah tegang. Ia bukan terdakwa korupsi proyek infrastruktur senilai miliaran rupiah, melainkan seorang pekerja kreatif

yang terjerat kasus pembuatan video profil desa dengan nilai kontrak Rp30 juta per desa.

Hari itu, Rabu (1/4/2026), seharusnya menjadi hari vonis. Namun, sidang ditunda setelah Komisi III DPR RI berhasil mengajukan penangguhan penahanan yang dikabulkan sehari sebelumnya. Amsal kini keluar dari tahanan Kejaksaan

Negeri Karo, sementara publik menanti apakah hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa: pidana penjara 2 tahun, denda Rp50 juta, dan uang pengganti kerugian negara senilai Rp202 juta.

Kasus ini menyentak dunia kreatif dan penegakan hukum. Bagi kejaksaan, ini soal kepatuhan administratif dan kerugian negara. Bagi Amsal dan ribuan kreator lain, ini soal eksistensi

dan pengakuan atas nilai intelektual yang tak bisa diukur dengan logika proyek fisik.

Kronologi: Dari Tawaran Jasa ke Jeratan Hukum

Awalnya, ini adalah kisah bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Tahun 2020, Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah kepala desa di Karo.

“Saya melihat potensi desa-desa di Karo yang indah. Saya tawarkan langsung, bukan lewat lelang, karena itu masa pandemi. Mereka setuju,” ujar Amsal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

CV Promiseland yang dipimpinnya mengerjakan sekitar 20 hingga 23 video profil desa. Setiap desa menandatangani perjanjian kerja sama dengan nilai bervariasi, rata-rata Rp30 juta per video. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Para kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan mengaku puas dengan hasilnya.

Namun, tahun 2025, Kejaksaan Negeri Karo menetapkan Amsal sebagai tersangka. Bukan karena hasil karya yang buruk, melainkan karena ditemukan dugaan mark-up anggaran berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Karo.

Dua Sisi yang Bertolak Belakang

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo merinci kerugian negara mencapai Rp202.161.980. Angka ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Setidaknya ada tiga modus yang didakwakan:

1. Sewa Drone Fiktif: Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), Amsal mencantumkan biaya sewa drone untuk 30 hari. Namun, berdasarkan temuan lapangan, realisasi hanya dilakukan selama 12 hari. Selisih 18 hari itu dinilai sebagai kerugian.
2. Penganggaran Ganda: Jaksa menemukan pos biaya yang dianggarkan dua kali. Seperti biaya *editing*, *cutting*, dan *dubbing* yang seharusnya merupakan paket utuh,

namun dipisah dan ditagihkan kembali.

3. Talenta Tidak Dibayar: Terdapat anggaran untuk *talent* (pemain) sebesar Rp1 juta yang dicairkan, namun figur yang menjadi *talent* adalah kepala desa setempat yang tidak menerima pembayaran tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, melalui Kasi Pidsus, sebelumnya menyatakan bahwa kasus ini bukan soal kualitas video, tetapi soal ketidaksesuaian realisasi fisik dengan dokumen anggaran. “Ada selisih volume pekerjaan yang dibayar dengan yang dikerjakan. Itu yang kami proses,” ujarnya dalam keterangan pers beberapa waktu lalu.

Sebelum vonis dibacakan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna senada dengan Kepala Kejaksaan Negeri Karo. Dia menegaskan bahwa kasus Amsal Sitepu bukan terletak pada kualitas karya atau keahlian, melainkan ada ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan RAB.

“Modusnya bukan masalah skill atau kemampuan, tetapi terkait RAB untuk kegiatan. Contohnya, ada anggaran sewa drone untuk 30 hari, namun fakta penelitian menunjukkan hanya dilaksanakan selama 12 hari, tetapi tetap dibayar penuh (full),” ujar Anang di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Anang mengatakan penyidik menemukan adanya indikasi penggelembungan dan tumpang tindih anggaran. Salah satu temuan yang mencolok adalah biaya penyuntingan yang diduga digandakan dalam laporan keuangan proyek tersebut.

Ia juga menyoroti peran rekanan dalam penyusunan anggaran. Menurut Anang, pihak desa yang menggunakan dana tersebut cenderung tidak





Anang Supriatna

memahami teknis penyusunan RAB, sehingga draf anggaran diduga dibuat langsung oleh pihak rekanan.

“Kepala-kepala desa ini kan tidak terlalu paham. RAB-nya dibuat oleh rekanan itu sendiri, sementara kegiatannya tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis di RAB, namun pembayarannya tetap dilakukan 100 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Amsal membantah keras tudingan itu. Dalam pembelaannya di hadapan Komisi III DPR, ia menyoroti metode audit yang digunakan.

“Dalam LHP, ide kreatif saya dihargai Rp0. Editing, cutting, dubbing dihargai Rp0. Saya dituntut karena dianggap menagih biaya untuk hal-hal yang tidak nyata,” kata Amsal dengan suara bergetar.

Ia menjelaskan, durasi sewa drone 30 hari adalah standar operasional dalam produksi video profesional.

“Drone tidak hanya digunakan saat terbang. Kami sewa unitnya untuk 30 hari karena harus adaptasi dengan cuaca di Karo yang tidak menentu, proses setting, dan pengambilan gambar yang tersebar di 20 desa. Itu paket sewa, bukan per hari terbang,” jelasnya.

Soal talent, Amsal menyatakan bahwa istilah “talent artis” dalam RAB adalah terminologi administratif untuk warga yang terlibat.

“Saya tidak mungkin menyebut ‘kepala desa’ sebagai talent di RAB karena akan terkesan janggal. Itu kesepakatan dengan desa. Mereka tidak meminta bayaran karena itu untuk promosi desa mereka sendiri,” tambahnya.

Amsal juga mengklaim tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karo sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyidikan yang berjalan, menurut kuasa hukumnya, terkesan terburu-buru dan mengabaikan kekhususan industri kreatif.

Intervensi DPR: Melindungi Kreator atau Intervensi Berlebihan?

Kasus ini menjadi bola liar setelah RDPU Komisi III DPR RI dengan Amsal digelar. Rapat yang awalnya bersifat internal itu berubah menjadi ajang pembelaan massal. Anggota Komisi III dari berbagai fraksi menyatakan prihatin dan menilai ada kriminalisasi terhadap pekerja kreatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman, secara tegas menyatakan bahwa kasus ini harus menjadi preseden.

“Tidak ada harga baku untuk karya kreatif. Kalau ini dipaksakan, akan membunuh industri ekonomi kreatif kita,” ujarnya dalam rapat tersebut.

DPR bahkan mengambil langkah luar biasa dengan menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan Amsal. Langkah ini berhasil membuat Amsal bebas dari tahanan Kejari Karo pada 31 Maret 2026, sehari sebelum jadwal pembacaan putusan.

Langkah DPR ini menuai dua reaksi. Di satu sisi, kalangan kreator dan



Habiburrohman

aktivis antikorupsi menilai DPR telah melampaui fungsi pengawasan dan masuk ke ranah yudikatif. “Kesannya DPR ingin mempengaruhi hakim. Ini berbahaya bagi independensi peradilan,” ujar salah satu pegiat anti korupsi yang enggan disebut namanya.

Disisi lain, kalangan pelaku ekonomi kreatif menyambut positif. Mereka menilai DPR telah menyelamatkan nyawa industri yang selama ini kerap tersudut oleh cara pandang birokrasi yang kaku.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, turut angkat bicara. Dalam konferensi pers beberapa hari lalu, ia menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa untuk jasa kreatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadaan barang fisik.

“Kami tidak sedang membela siapa pun. Tapi kami mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki perspektif objektif dalam menilai produk kreatif. Nilai sebuah video tidak hanya diukur dari berapa hari drone terbang, tetapi juga dari ide, konsep, dan dampaknya bagi promosi daerah,” ujarnya.

Vonis Bebas Videografer Amsal Sitepu

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu dalam perkara dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026).

Vonis tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo yang sebelumnya menuntut Amsal dengan pidana penjara dua tahun serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ketua majelis hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Medan menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

“Menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Memulihkan hak-hak, harkat, dan martabat serta nama baik terdakwa,” ujar Yusafrihardi membacakan amar putusan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Amsal. Salah satu poin krusial adalah tidak adanya rincian spesifikasi pekerjaan yang jelas dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah desa dan CV Promiseland.

Hakim juga menilai tuduhan pelanggaran terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya parameter spesifikasi yang tegas dalam lampiran perjanjian. Majelis hakim mengesampingkan hasil audit



Teuku Riefky Harsya

kerugian negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo karena perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar lantaran spesifikasi pekerjaan tidak tercantum dalam kontrak kerja sama.

“Perbuatan terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak adanya parameter spesifikasi yang tegas dalam lampiran perjanjian,” demikian pertimbangan majelis hakim sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

Sebelumnya, JPU Kejari Karo Wira Arizona menuntut Amsal dengan pidana penjara dua tahun serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

Dalam tuntutananya, JPU Wira menyebut hal yang memberatkan antara lain terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam persidangan, serta belum mengembalikan kerugian negara. Sementara hal yang meringankan,

terdakwa belum pernah dihukum.

Jaksa menilai perbuatan Amsal melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menanggapi vonis bebas tersebut, Kejaksaan Negeri Karo menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari sejak vonis tersebut dibacakan untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan kasasi atau tidak.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo Dona Martinus Sebayang mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim. Namun, pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk menentukan upaya hukum selanjutnya.

“Kami menghormati putusan hakim. Selanjutnya kami masih menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari atas vonis bebas ini dan kami akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk menentukan upaya hukum selanjutnya,” kata Dona di Pengadilan Tipikor PN Medan, Rabu (1/4).

Namun, di tengah ruang sidang, Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland itu menangis haru. Di luar persidangan, ia menyebut vonis tersebut sebagai kemenangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

“Ini adalah air mata kemenangan, bukan hanya untuk Amsal Christy Sitepu, tetapi untuk semua yang berkecimpung dalam ekonomi kreatif Indonesia. Saya yakin ini adalah momentum kebangkitan sektor kreatif,” ujarnya sebagaimana dikutip Jakarta Globe.

Amsal juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatiannya terhadap kasus yang menjeratnya.



MEMBENDUNG POLITIK DINASTI

Gugatan terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan upaya warga negara menjaga demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi di republik ini harus bersih intervensi kekuasaan. Demokrasi harus lahir dari kehendak dan keinginan rakyat yang menginginkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik melalui proses pemilihan umum (Pemilu).

Pemilihan umum (Pemilu), khususnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi pelajaran penting bagi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, politik dinasti di negeri ini secara fulgar dipertontonkan, dengan majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia (RI).

Memajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dinilai merupakan upaya yang sedang dilakukan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo dalam membangun politik dinasti di republik ini secara sistematis. Pasalnya, pada saat itu Gibran secara usia belum memenuhi syarat dimajukan sebagai Capres/ Cawapres pada Pilpres 2024.

Namun, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023 memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Dalam putusan tersebut mengizinkan kandidat di bawah 40 tahun maju jika pernah/sedang menjabat kepala daerah.

Lahirnya keputusan tersebut memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai politik dinasti dan netralitas MK karena keterlibatan Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sehingga putusan MK tersebut dinilai oleh publik lahir dari ikatan kepentingan keluarga (nepotisme).

Menurut pakar hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar lahirnya keputusan tersebut telah mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga mulia yang bertugas menjaga konstitusi di republik ini bisa jebol oleh hasrat kepentingan politik segelintir orang.

Ia menilai bahwa lahirnya putusan MK nomor 90 ini jelas-jelasnya nyata ada upaya yang sistematis yang dilakukan oleh sebuah kekuatan yang sedang berkuasa untuk memberikan karpet merah kepada Gibran dengan mengubah persyaratan sebagai calon wakil presiden.

“Saya tidak pernah menolak Gibran secara personal. Yang kita tolak kan adalah prosesnya. Kan yang kita permasalahan prosesnya,” kata Zainal seperti dilansir dari Kumparan, 12 November 2023.

“Andaikata Gibran misalnya lahir dari sebuah proses yang tidak ada begitunya. Misalnya dia mau mengikuti usia tidak ada masalah, dia memang juga punya kapasitas, dia punya rekam jejak yang panjang, saya kira tidak ada masalah. Ini

problemnya adalah ketika semua prasyarat-prasyarat itu dimutilasi di tengah, dipotong-potong untuk meloloskan,” imbuh dia.

Menurutnya dengan adanya perubahan syarat capres-cawapres di MK terbukti menjadi taktik pemulus bagi Gibran maju Pilpres dan bentuk politik dinasti. Ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Harus diingat sebenarnya *political dynasty* itu bukan hanya sekadar soal dia akan dipilih atau tidak. Bukan hanya sekadar itu. Tapi soal proses kandidasinya kan juga masalah, kan,” kata Zainal.

“Itu ketika apa? Ketika ada bentangan karpet merah untuk keluarga, tidak diperlakukan sama dan lain sebagainya, itu bagian dari politik feodalistik sebenarnya,” ujarnya.

Dengan berbagai kontroversinya akhirnya Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Selanjutnya dengan mendapat dukungan Joko Widodo yang saat itu menjabat presiden RI pasangan Prabowo-Gibran menang mutlak dengan mendapatkan suara sebanyak 58,6 persen dari total suara sah nasional. Jauh meninggalkan perolehan suara dari dua pasangan lain yakni, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.



Anwar Usman

Menjaga demokrasi dan melawan nepotisme

Belajar dari pengalaman Pilpres 2024 lalu, upaya menjaga demokrasi pun menggema- praktik politik dinasti harus dibendung, sehingga demokrasi di republik berjalan secara lurus dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik.

Upaya tersebut salah satunya muncul dari dua advokat bernama Raden Nuh dan Dian

Amalia. Langkah yang mereka lakukan adalah dengan

mengajukan gugatan terhadap

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026.

Point penting yang mereka perjuangkan dalam gugatan tersebut adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Sebab, jika hal ini tidak dilarang maka apa yang terjadi pada Pilpres 2024 lalu bisa terjadi di Pilpres selanjutnya. Nepotisme di republik ini harus dibersihkan, sebab akan menodai demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

“Pemilu yang konstitusional menurut JURDIL dan level playing field. Nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang mengutamakan keluarga/kroni di atas kepentingan umum,” ungkap keduanya dalam kesimpulan gugatan, mengutip dari situs resmi MK, Kamis, 26 Februari 2026.

Selanjutnya dalam gugatan tersebut mereka menjelaskan dalam Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memuat pagar konflik kepentingan membuka peluang untuk melakukan nepotisme (*opportunity nepotisme*), melahirkan pressure kekuasaan, dan memfasilitasi rasionalisasi penyimpangan.

Sehingga menurut pemohon pasal tersebut sangat jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum di republik ini.

“Pasal tersebut

**Zainal Arifin Mochtar**

bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, prinsip keadilan, serta hak konstitusional warga negara atas pemilu yang adil dan berintegritas, berpotensi bertentangan dengan Pasal 1(2), 1(3), 22E, 27(1), 28D(1) UUD 1945 serta harus dirancang agar kompatibel dengan Pasal 28I (2) melalui Pasal 28J (2) UUD 1945,” ungkap keduanya.

Selanjutnya mereka pun mengungkapkan pasalnya tersebut juga bisa membuka pintu kepada pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme dalam Pemilu. Sudah seharusnya ini diakhiri agar Indonesia menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan.

“Pasal 169 UU Pemilu membuka pintu kepada pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme dalam pemilu presiden dikarenakan ketentuan di dalamnya tidak mencakup larangan praktik nepotisme – yang dikategorikan suatu tindak pidana dalam persyaratan calon, yang pada hakikatnya menegaskan Indonesia sebagai negara hukum,” kata Pemohon.

Pemohon juga mengatakan, Pasal 169 UU Pemilu memungkinkan bagi setiap Presiden yang sedang menjabat untuk mengusung anaknya atau adiknya atau anggota keluarga, kerabat

dekat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden di mana presiden yang sedang menjabat itu adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemilu.

Jika presiden tergoda untuk ingin terus berkuasa, maka segala cara mereka akan lakukan dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan keluarga (politik dinasti).

“Jika hal ini terjadi sama saja dengan menegasikan prinsip objektivitas hukum di mana pasti akan tercipta kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat (instrumentalistik) untuk melanggengkan kekuasaan keluarga,” ungkap Pemohon.

Konstitusi tidak batasi hak politik

Gugatan yang diajukan oleh dua advokat ke MK terkait Pasal 169 UU Pemilu mendapatkan respon dari sejumlah partai politik.

Respon dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan,

Komarudin Watubun yang juga Anggota Komisi II DPRRI menilai bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Sebab, menurutnya dalam



konstitusi tidak memberi ruang untuk membatasi hak politik hanya karena hubungan kekerabatan.

“Gugatan itu tidak bisa, tidak ada dasar konstitusinya. Undang-Undang Dasar sendiri menyatakan setiap warga negara punya hak sama, baik di pemerintahan dan seterusnya. Jadi saya kira lemah gugatan itu,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 28 Februari 2026.

Namun, dirinya tidak ingin mengomentari lebih dalam, dia menyerahkan sepenuhnya kepada putusan akhir kepada hakim MK.

Namun, dia menegaskan, berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku saat ini, tidak ada larangan bagi anak presiden untuk mencalonkan diri dalam Pilpres.

“Saya tidak pesimis (gugatan ditolak), tapi saya bicara berdasarkan undang-undang konstitusi. Saya tidak boleh ngarang. Terserah pertimbangan hakim seperti apa nantinya,” tegasnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali. Menurutnya gugatan tersebut sangat diskriminatif. Menurut Ali, semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum.

Kendati demikian dia menghormati gugatan yang diajukan oleh dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia.

“Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, sehingga PSI menolak keras dengan perlakuan secara diskriminatif. Tapi di sisi lain kami hormati hak orang yang menguji pasal tersebut,” katanya di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Dia mengingatkan bahwa negara harus melindungi semua hak warga negaranya. Dia tegas mengatakan bahwa, tidak ada orang di dunia ini yang memilih dilahirkan oleh siapa.

Sehingga, baik itu anak presiden,

anak wapres, ataupun anak petani, semua memiliki kesempatan dan hak yang sama.

“Ya itu kan hak penggugat. Yang terpenting itu negara harus melindungi semua hak warga negara Indonesia. Tidak ada anak lahir di muka bumi ini memilih untuk menjadi anaknya siapa. Jadi semua hak anak, semua hak masyarakat harus dilindungi negara,” tegasnya.

Respon yang sama juga disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang menilai bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sebab, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang di konstitusional.

“Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama,” ujarnya di Surakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Namun, dirinya menghargai gugatan tersebut, sebab setiap masyarakat juga berhak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan undang-undang.

Dan Jokowi sendiri menyerahkan kepada majelis hakim MK. Apapun keputusan yang keluar dari MK maka warga negara harus menerimanya.

“Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apa pun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah, ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati,” katanya.

Indonesia bukan untuk satu keluarga

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pandangan yang berbeda. PKS memberikan dukungan atas munculnya gugatan terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden



Komarudin Watubun

atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Dukungan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Menurutnya ruh dari gugatan tersebut sangat baik. Dia memandang apa yang sedang diperjuangkan oleh Raden Nuh dan Dian Amalia ingin mengembalikan amanat dari reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1998.

Mardani menilai gugatan tersebut bertujuan ingin membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inilah merupakan dari amanat reformasi.

“Sama seperti kita melawan KKN tahun 1998,” ujarnya, Kamis 26 Februari 2026.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa Indonesia bukanlah milik dari satu keluarga. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan bertarung dalam kontestasi pemilu.

“Indonesia terlalu luas untuk dikuasi satu keluarga, apalagi saat yang bersangkutan masih menjabat,” tegasnya.

Namun, dia mengingatkan bahwa gagasan tersebut tidak hanya relevan untuk Pilpres, tapi bisa untuk ajang

kontestasi lainnya seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kendati demikian Mardani menilai aturan yang terdapat dalam UU Pemilu saat ini masih relevan. Tapi, masih membuka peluang untuk membangun politik dinasti di Indonesia.

“Tapi peluangnya memang ada untuk politik dinasti,” ujarnya.

Menjaga kompetisi tetap fair

Dukungan terhadap gugatan yang meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden menjabat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden juga disampaikan oleh pakar hukum pemilu, Titi Anggraini.

Menurut Titi gugatan tersebut sangat layak dipertimbangkan oleh MK. Sebab, katan dia relasi kekerabatan dengan petahana kerap menimbulkan persoalan serius.

Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) ini mengungkapkan bahwa kasus menunjukkan hubungan keluarga sering berjalan beriringan dengan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk mobilisasi sumber daya negara, ketidaknetralan aparat, serta distorsi arena kompetisi.

Sehingga munculnya gugatan ini merupakan bagian dari usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia yakni memastikan agar arena kompetisi tetap fair.

Titi melurusnya, bahwa gugatan tersebut bukan untuk membatasi hak secara sewenang-wenang. Tapi gugatan ini bertujuan menjaga agar kompetisi politik bertumpu pada

politik gagasan, bukan pada privilese kekuasaan.

“Dalam kerangka itu, saya melihat permohonan ini memiliki basis argumentasi yang layak dipertimbangkan secara konstitusional,”ujarnya di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa urgensi gugatan larangan keluarga presiden-wapres maju Pilpres sangat tinggi mengingat RUU Pemilu sedang dibahas, sementara tahapan pemilu ke depan juga akan segera dimulai.

Sehingga perlu ada kepastian konstitusional agar dalam pembentuk undang-undang tidak merumuskan norma yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan kompetisi, atau delegitimasi proses pemilu di kemudian hari.

“Karena itu, putusan MK, apapun bentuknya, akan menjadi rujukan penting bagi desain hukum pemilu ke depan sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan kompetisi dan integritas pemilu tetap terjaga,” ucap Titi.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kerangka hukum yang cukup kuat untuk mencegah praktik nepotisme, terutama karena belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengantisipasi k o n f l i k

kepentingan akibat relasi kekuasaan keluarga dengan petahana. Apalagi dengan sistem kaderisasi dan rekrutmen politik di internal partai belum berjalan demokratis, ruang bagi reproduksi kekuasaan berbasis kekerabatan menjadi begitu sangat terbuka.

Atas dasar ini, menurut Titi masih sangat berisiko untuk benar-benar menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, jika membaca sejumlah kasus misalnya di kontestasi Pilkada terjadi pergeseran kompetisi dari merit dan gagasan menjadi privilese akses kekuasaan.

Maka, jika ini terus-terus dibiarkan tidak baik dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya dijadikan alat untuk membangun politik dinasti.

Menurutnya, situasi seperti ini akan semakin melemahkan demokrasi internal partai, mempersempit sirkulasi elite, dan menurunkan kualitas representasi politik.

“Karena itu, perdebatan mengenai batasan terhadap konflik kepentingan keluarga petahana harus ditempatkan dalam kerangka menjaga *fairness* kompetisi, memperkuat demokratisasi partai, serta melindungi hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang benar-benar kompetitif, luber, jurdil, dan demokratis,” jelasnya.



Mardani Ali Sera



MENGUJI JANJI PRABOWO KEJAR AKTOR INTELEKTUAL PENYIRAMAN AIR KERAS ANDRIE YUNUS

Pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah ditemukan. Namun, publik masih ragu kasus ini mampu mengungkap sampai aktor intelektual. Keraguan pun makin bertambah saat identitas pelaku yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berbeda.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS menjadi sorotan publik. Hampir seluruh elemen masyarakat bersuara menuntut agar

kasus ini terungkap secara terang benarang. Tidak hanya berhenti pada eksekutor, tapi harus sampai mengungkap aktor intelektual dibalik kasus tersebut.

Dukungan mengungkap kasus secara tuntas tegas disuarakan oleh para wakil rakyat (DPR), khususnya Komisi III DPR RI. Seperti diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat rapat kerja komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026 mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengungkap kasus



tersebut secara terang benerang.

Maka itu, untuk mengawal penanganan perkara ini Komisi III akan membentuk panitia kerja (panja) terkait kasus penyiraman air keras. Dalam Panja tersebut katanya Komisi III akan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK, serta kuasa hukum dari pihak Andrie.

Menurutnya langkah yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dukungan tersebut semakin diperkuat oleh komitmen Presiden Prabowo Subianto. Ia berjanji akan mengusut tuntas “siapa yang menyuruh dan membayar” sejumlah anggota TNI yang menjadi pelakunya.

Kepala negara juga berkata bahwa dirinya sedang mempertimbangkan pembentukan tim independen guna mengusut aktor intelektualnya.

“Kita bisa pertimbangkan [pembentukan tim pencari fakta independen], asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah

yang dapet uang dari luar negeri,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama sejumlah jurnalis dan pakar yang diundang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Rabu malam, 18 Maret hingga Kamis dini hari, 19 Maret 2026.

Prabowo mengatakan, penegakan hukum tidak boleh hanya menjangkau eksekutor di lapangan, tapi juga harus menasar figur-figur di balik penyiraman cairan kimia korosif terhadap pegiat hak asasi manusia itu.

“Siapa yang menyuruh, siapa yang membayar (harus terungkap)” kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Maret 2026.

Identitas pelaku berbeda

Setelah enam hari peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus berlalu akhirnya Polri dan TNI mengumumkan siapa pelaku dari peristiwa tersebut.

Seharusnya dengan diumumkankannya para pelaku, kasus ini telah menemukan titik terang. Namun,

sebaliknya publik merasa ragu kasus ini terungkap secara terang benerang. Pasalnya keterangan yang dikeluarkan secara terpisah oleh Polda Metro Jaya dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Rabu, 18 Maret 2026 itu berbeda.

Perbedaan identitas pelaku penyiraman ini memantik tanya publik. Alih-alih memberikan kepastian, perbedaan inisial terduga pelaku versi TNI dan Polri mempertebal kabut misteri peristiwa kekerasan terhadap aktivis tersebut.

Menurut versi TNI, berdasarkan pengumuman yang disampaikan Puspom TNI ada empat prajurit BAIS TNI yang menjadi terduga pelaku. Keempat pelaku itu berinisial NDP, SL, BWH, dan ES.

Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyebut keempat pelaku merupakan anggota Denma BAIS TNI dengan matra angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU).

“Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS TNI, bukan dari satuan mana-mana tapi dari Denma BAIS TNI,” kata Mayjen Yusri saat konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Dia menjelaskan 3 dari 4 tersangka berpangkat perwira. Dan yang tertinggi adalah berpangkat kapten.

“Jadi Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES. Waktu penyidikan kita akan bekerja semaksimal mungkin dengan harapan dapat kita lakukan secepatnya secara profesional,” ujar dia.

Ia mengatakan saat ini para tersangka sudah diamankan. Mereka juga masih didalami oleh Puspom TNI.

Sementara versi Polisi seperti yang diumumkan Polda Metro Jaya, dua pelaku yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie



Mayjen TNI Yusri Nuryanto

Yunus berinisial BHC dan MAK. Namun, polisi menduga jumlah pelaku yang terlibat bisa lebih dari empat orang.

“Saat ini kami menduga dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu Data Polri ini satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari empat,” ujar Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Perbedaan identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus langsung dijelaskan oleh Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisariss Besar Budi Hermanto menjelaskan bahwa terduga pelaku berinisial BHC yang disebut kepolisian merupakan orang yang sama dengan BHW yang disebut TNI.

“Untuk inisial BHC itu sama dengan

BHW, kemudian dari PMJ ada MAK,” kata Budi dikutip dari laman *Tempo.co*, Jumat, 20 Maret 2026.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya dalam mengusut kasus ini menggunakan metode *scientific crime investigation*. Sehingga hasil temuan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada perbedaan dari TNI, silakan tanya ke sana peran masing-masing. Kalau yang dari PMJ dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Budi.

Desakan Pembentukan TGPF

Kerancuan informasi antara kepolisian dan TNI dikhawatirkan berdampak pada penanganan kasus. Sehingga KontraS mendesak agar dilakukan verifikasi oleh lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF.

Tujuannya, agar proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan menghasilkan fakta yang objektif dan menyeluruh, termasuk menasar bukan hanya aktor di lapangan, namun



Komisaris Besar Budi Hermanto

juga aktor intelektual.

Desakan pembentukan TGPF pun disuarakan oleh sejumlah advokat senior dan kelompok-kelompok sipil. Mereka memiliki keyakinan bahwa penyelidikan internal TNI dan polisi tidak akan mampu menyentuh aktor intelektualnya.

Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dengan adanya tim pencari fakta (TPF) yang melibatkan masyarakat sipil dapat menjamin proses penegakan hukum yang transparan, imparsiial dan akuntabel dalam mengungkap percobaan pembunuhan berencana itu.

Dia menduga kasus penyiraman air keras ini melibatkan banyak pihak. Sangat mustahil hanya dilakukan oleh empat orang pelaku lapangan yang terekam dalam CCTV. Pasti ada aktor intelektual yang mencoba membungkam suara-suara kritis dari masyarakat yang mencoba untuk menegakan keadilan dan kebenaran.

“Ini adalah orkestrasi teror atau state sponsored terrorism untuk membungkam dan menakuti masyarakat,” kata Usman dalam jumpa pers bertajuk ‘Indonesia mendesak



Usman Hamid

Polri segera tangkap pelaku terlatih instansi tertentu', di Jakarta, Rabu (18/03).

Hal yang sama juga disampaikan oleh advokat senior, Todung Mulya Lubis. Menurutnya dengan dibentuknya TGPF akan membuat proses penyelidikan kasus itu menjadi transparan dan akuntabilitas.

"Karena ketika kecurigaan itu begitu banyak dan adanya pola intimidasi, teror atas HAM di masa lalu, orang semua selalu menuding ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kekuasaan," kata Todung.

Todung berkata, penyelidikan sebaiknya tidak hanya dilakukan secara internal oleh TNI semata, melainkan juga melibatkan tim lain yang independen.

"Bentuk saja tim independen. Ini akan lebih objektif sejauh tim independen itu terdiri dari tokoh-tokoh yang punya integritas, yang punya rekam jejak yang baik, tidak ada celah dalam hak asasi manusia dan juga membuka peluang untuk mengungkap aktor intelektualnya, tidak sekedar aktor di lapangan," ujar Todung.

Desakan pembentukan TGPF juga disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur. Dia tegas mengatakan



Muhamad Isnur

kasus penyiraman air keras ini bukan kejahatan biasa, ini merupakan kejahatan yang diperbuat untuk membungkam suara kritis.

Maka itu, mewakili koalisi masyarakat sipil dia mendesak agar kasus ini tidak boleh diselesaikan di ruang tertutup.

"Fakta-fakta yang disampaikan kepolisian dan TNI perlu dicek ulang kepastiannya melalui lembaga independen, dalam hal ini Komnas HAM. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendesak Komnas HAM bertindak aktif untuk mengungkap dan menyelidiki fakta-fakta yang ada. Untuk kepentingan itu pula, kami mendesak presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta," ujar Isnur dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/3/2026).

Selain menuntut pembentukan TGPF, koalisi juga menolak keras penyelesaian kasus melalui jalur peradilan militer.

Menurutnya jika kasus ini diselesaikan melalui peradilan militer dikhawatirkan akan menjadi ruang impunitas yang menutup akuntabilitas serta menghilangkan unsur sistematis dari kejahatan ini.

Suara desakan pembentukan TGPF



Todung Mulya Lubis

sedang dipertimbangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara juga berkomitmen untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus secara terang benarang. Tidak hanya eksekutor tapi sampai ke aktor intelektualnya.

"Kita bisa pertimbangkan [pembentukan tim pencari fakta independen], asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapet uang dari luar negeri," kata Prabowo.

Saat ini, publik sedang menguji komitmen Presiden Prabowo Subianto apakah sanggup mengejar aktor intelektual penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Jika kasus ini selesai tanpa mengungkap siapa aktor intelektualnya berarti negara sedang melindungi pihak-pihak yang melanggar hak asasi manusia.

Jangan sampai kasus Andrie Yunus bernasib sama seperti kasus yang menimpa Novel Baswedan dan aktivis HAM, Munir. Negara hingga saat ini belum bisa mengungkap secara terang benarang siapa aktor intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan pembunuhan terhadap Munir.

MEMBUNGKAM SUARA KRITIS

Demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. Suara kritis dianggap ancaman, upaya membungkamnya pun dilakukan. Penyiraman air keras yang dialami oleh aktivis KontraS, Andrie Yunus cukup menjadi bukti.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK), pada Kamis, 12 Maret 2026.

Peristiwa terjadi pada pukul 23.37 WIB saat Andrie Yunus sedang mengendarai motor miliknya melewati Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat.

Ketika Andrie melintas, dua orang pelaku yang mengendarai motor dari arah berlawanan menghampiri Andrie kemudian menyiramkan air keras ke arah tubuh bagian kanan Andrie.

Dampak dari penyiraman tersebut seperti diungkapkan oleh Koordinator Bidang Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, Andrie mengalami luka bakar 24 persen pada tubuh bagian kanannya.

Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi usai Andrie melakukan perekaman siniar (*podcast*) bertajuk "Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia" di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta.

"Pasca peristiwa tersebut, Andrie Yunus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secara medis. Dari hasil pemeriksaan,



Dimas Bagus Arya

Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%," ujar Dimas seperti dikutip dari keterangannya, Jumat, 13 Maret 2026.

Insiden tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa. Banyak pihak menilai serangan ini memiliki pola yang kerap muncul dalam berbagai kasus intimidasi terhadap aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Peristiwa ini sekaligus menimbulkan kembali kekhawatiran mengenai keamanan pembela hak asasi manusia serta kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia.

Pasalnya, sejak berada di KontraS, Andrie merupakan aktivis yang konsisten dan vokal dalam menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai kebijakan negara.

Perhatian utamanya seringkali tertuju pada isu-isu krusial terkait reformasi sektor keamanan. Salah satu isu yang paling sering ia suarakan adalah kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang TNI, yang dinilai berpotensi memperluas peran militer ke ranah sipil, sebuah langkah yang menurutnya dapat mengancam demokrasi.

Tak hanya sekadar bersuara, Andrie Yunus juga aktif dalam aksi nyata. Pada tahun 2025, bersama aktivis lainnya, ia turut menggeruduk rapat tertutup pembahasan revisi UU TNI di sebuah hotel di Jakarta sebagai bentuk protes atas potensi perluasan peran militer. Keberaniannya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sipil juga terbukti ketika ia memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji formal Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi, mewakili perspektif masyarakat sipil yang seringkali terpinggirkan.

Ancaman terhadap pembela HAM

Koordinator Bidang Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya menduga tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya, pejuang HAM di republik ini seharusnya dilindungi. Hal ini sesuai amanat kontitusi yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM.

Menurutnya peristiwa yang dialami oleh Andrie bukanlah tindak kejahatan



biasa. Sehingga, dia mendesak agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

“Penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut. Mengingat, upaya penyiraman air keras terhadap korban dapat mengakibatkan luka fatal yang serius,” ujarnya seperti dikutip dari keterangannya, Jumat, 13 Maret 2026.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Bonnie Triyana bahwa serangan terhadap Andrie Yunus bukanlah tindak kriminal biasa, namun ini merupakan aksi teror untuk membungkam para aktivis pembela HAM.

Dia mengatakan, sebagai anak bangsa yang lahir dan tumbuh pada rezim otoriter, dirinya tidak ingin melihat bangsa justru mundur ke masa kelam ketika aktivis diculik, dianiaya, dan dihilangkan paksa hanya karena berani bersuara.

Maka itu, politisi PDI Perjuangan ini mengecam keras tindakan kekerasan biadab yang tidak berperikemanusiaan itu. Dia mengingatkan tindakan teror untuk membungkam suara-suara

kritis hanya akan membangkitkan arus kritis lebih deras.

“Sejarah membuktikan kekerasan terhadap aktivis tidak pernah berhasil memberangus kebebasan berpendapat, justru gerakan masyarakat sipil selalu bangkit lebih kuat setiap kali menghadapi teror,” kata Bonnie dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Dia mengatakan serangan tersebut mengingatkan catatan kelam sejarah kekerasan terhadap aktivis Indonesia, mulai dari penculikan aktivis 1997/1998, pembunuhan Marsinah (1993), Munir (2004) hingga penyiraman air keras terhadap aktivis buruh di era 1990-an yang banyak belum terselesaikan.

Maka itu, dia berharap agar praktik-praktik kotor membungkam suara kebenaran dan keadilan tidak terjadi kembali di era reformasi. Sehingga, dirinya mendesak kepolisian segera menangkap pelaku dan membongkar aktor intelektual di balik serangan ini hingga ke akar-akarnya. Pelaku teror harus dihadapkan pada proses hukum seadil-adilnya dan tidak bisa dibiarkan

hidup bebas.

Jika berhasil ditangkap, menurut dia, pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal tentang percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal. Sebab, tindakan kekerasan itu hampir merenggut nyawa korban dan menyebabkan luka bakar 24 persen.

Negara melalui aparat penegak hukum, menurut dia, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan kasus kekerasan terhadap aktivis tidak berakhir impunitas sebagaimana banyak terjadi di masa lalu.

“Korban berhak mendapatkan perlindungan maksimal, terutama karena bekerja di bidang advokasi HAM dan kebebasan berekspresi,” katanya.

Dia pun mendorong masyarakat sipil, aktivis, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen demokrasi untuk bersama-sama mengawal kasus itu sampai tuntas. Komnas HAM harus turun tangan melakukan investigasi independen sebagai pengawasan eksternal terhadap proses hukum.

DPR merespon cepat

Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus direspon cepat oleh Komisi III DPR RI dengan menggelar rapat khusus terkait penyiraman air keras kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus. Didampingi oleh para anggotanya, Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman tegas mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas kejadian tersebut.

Komisi III juga mengecam keras aksi tersebut karena bukan sekedar kriminal biasa melainkan kejahatan terhadap Demokrasi. Maka itu, pihaknya meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.



Machfud Arifin

“Komisi III DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andrie Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mungkin mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya usai mengadakan rapat khusus di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 16 Maret 2026.

DPR juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan kepada Andrie Yunus.

DPR desak usut tuntas

Mayoritas anggota DPR mendukung agar kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diusut tuntas hingga aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut.

Keseriusan DPR dalam mengungkap kasus tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin yakni dengan membentuk panitia kerja (Panja) untuk

mengawal kasus tersebut.

Menurutnya dengan adanya panja akan berperan penting dalam mengawal proses hukum hingga ke tahap persidangan.

“Dan mudah-mudahan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi III bahwa di dalam kasus ini ada pelaku, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Ini yang kita akan ungkap, makanya kita bentuk Panja untuk mengawal ini ke depan,” kata Safaruddin dalam rapat seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu, 18 Maret 2026.

Hal yang senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.

Politisi Golkar ini mengapresiasi langkah awal aparat penegak hukum, namun ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali.

“Oleh karena itu kami minta agar kasus ini diungkap seterang-terangnya, baik yang menyuruh melakukan, memfasilitasi, dan yang melakukan penyiraman itu. Karena ini sudah menjadi perhatian publik dan ini sudah mencederai prinsip-prinsip penegakan hukum dan demokrasi

kita,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, juga mendukung pembentukan panja dan meminta agar penyidikan dilakukan secara komprehensif, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar pelaku langsung.

“Apabila ada aktor intelektual atau pun pihak-pihak sipil yang terlibat, ini harus dibuka secara terang benderang sehingga tidak menjadi keragu-raguan karena secara clear bahwa Presiden Prabowo sangat berkomitmen dalam penanganan HAM dan memaksimalkan keadilan untuk hak asasi manusia,” tegas dia.

Senada dengan itu, anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Machfud Arifin, mengingatkan agar penanganan kasus tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan saja.

Ia menaruh harapan besar pada profesionalitas aparat dalam mengusut perkara ini secara transparan.

“Tentunya seperti yang disampaikan tadi ada yang menyuruh melakukan, melakukan siapa di balik semuanya itu, yang membantu melakukan itu tentunya bisa terungkap dengan gamblang dan jelas,” tegas Machfud.

Presiden minta usut tuntas

Sejalan dengan DPR, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus segera diusut hingga tuntas. Termasuk siapa aktor intelektual di balik kasus tersebut.

“Harus kita usut, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar,” kata Prabowo saat diskusi bersama jurnalis dan pengamat dari tayangan video yang dibagikan, Kamis, 19 Maret 2026.

Prabowo pun tegas mengatakan jika ada aparat negara yang terlibat tidak akan ragu-ragu untuk mengusutnya hingga tuntas. Kepala negara menjamin tidak akan ada perlindungan bagi pelaku sekalipun jika berasal dari institusi resmi.

“Saya menjamin, tapi sebaliknya. Kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas harus kita usut kok,” ujarnya.

Dia pun memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan semacam itu. Prabowo mengatakan tugas negara adalah melindungi rakyatnya.

“Percayalah saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Percayalah saya dipilih oleh rakyat, untuk membela rakyat, tapi kita waspada, saya minta diusut bener sampai aktornya,” ujarnya.

Saat ditanya soal batas waktu pengusutan, Prabowo menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Tidak hanya Polri, tapi juga aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

“Saya ini orang realistis dan adil, dari segi kapasitas kita biarkanlah mereka bekerja. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja,” ujarnya.



Anies Baswedan

Prabowo juga menyatakan terbuka terhadap pembentukan tim independen mengusut kasus tersebut. Dengan catatan tim tersebut benar-benar bersifat netral.

“Kita bisa pertimbangkan, asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapet uang dari luar negeri,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang meminta secara tegas mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Maka itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum untuk benar-benar mewujudkan komitmen tersebut.

“Dan sikap beliau (Presiden Prabowo) yang berkomitmen untuk melakukan penyelidikan itu harus diwujudkan oleh seluruh aparat hukum,” ujar Anies saat ditemui usai open house Lebaran 2026 di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026) malam seperti dilansir Kompas.com.

Secara tegas Presiden telah menyebutkan kasus tersebut sebagai tindakan terorisme sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap demokrasi, maka itu Anies

meminta agar aparat di bawah Presiden menjalankan arahan tersebut secara konsisten.

“Bahwa Pak Presiden bersikap ingin melindungi demokrasi, aparat di bawahnya harus menjalankan arahan Presiden,”katanya.

Selanjutnya dia menilai sejak awal kasus tersebut bukanlah tindak kriminal biasa, melainkan serangan terhadap individu yang memperjuangkan demokrasi. Pasalnya, Andrie adalah aktivis konsisten menyuarakan tanda-tanda kemunduran demokrasi bersama kelompok masyarakat sipil lainnya.

“Ketika ada kejadian ini bukan kriminal biasa, dari awal ini bukan kriminal biasa. Dan tidak mungkin hanya dikerjakan oleh 1-2 orang secara sporadik,” ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Maka itu, Anies mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan mengungkap pihak yang diduga sebagai pemberi perintah.

“Peristiwa ini harus diselidiki sampai pada pemberi perintahnya. Dan harus dielaborasi mengapa ada perintah itu, mengapa sampai ada perintah itu, mengapa sampai ada tugas itu,”ujarnya.

Anies juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Dia pun menilai publik menginginkan penanganan kasus yang dapat dipantau secara terbuka, termasuk melalui peradilan umum.

“Publik saya rasa inginkan transparansi. Menginginkan ada proses yang bisa dipantau semuanya dan jangan sampai berulang seperti peristiwa-peristiwa yang sering kejadian. Selalu yang terkena hukuman adalah pelaku paling hilir,” ujarnya.

TKA SMP 2026

UJIAN, KEJUJURAN, DAN SEMANGAT KOLEKTIF



April 2026 menjadi bulan yang penuh cerita bagi dunia pendidikan Indonesia. Di berbagai pelosok negeri, murid kelas IX SMP duduk di depan layar komputer, sebagian di ruang kelas, sebagian di tenda darurat, sebagian lagi di laboratorium pinjaman. Mereka mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) berbasis komputer, sebuah asesmen nasional yang dirancang bukan untuk menentukan kelulusan, melainkan untuk memetakan kemampuan literasi, numerasi,

karakter, dan lingkungan belajar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sejak awal menekankan bahwa TKA harus dijalani dengan prinsip *Jujur dan Gembira*. "Kalau ada murid yang curang atau sekolah yang curang, maka langsung kita nolkan nilainya. Karena yang utama tentu saja kejujuran," ucapnya tegas. Ia juga memastikan bahwa sekolah yang belum memiliki komputer tetap bisa melaksanakan tes dengan meminjam perangkat dari sekolah lain.

Hari pertama pelaksanaan menjadi momen penting. Mendikdasmen meninjau langsung SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Beliau menyapa siswa yang tengah mengerjakan soal dengan penuh semangat. "Kerjakan dengan jujur dan gembira, karena ini bagian dari proses, bukan akhir," katanya. Heiba Anindya, salah satu siswi, mengaku awalnya takut. "Saya sempat khawatir, tapi kemudian penasaran dengan soal-soalnya. Walaupun TKA tidak menentukan lulus atau tidak, saya tetap ingin

memberikan yang terbaik,” tuturnya. Guru di sekolah itu menambahkan, “Kami hanya mengimbuu siswa untuk membiasakan diri dengan soal-soal TKA. Tidak ada bimbingan khusus.”

TKA SMP Berjalan Lancar, Sistem dan Partisipasi Terkendali

Gelombang pertama TKA berlangsung lancar. Lebih dari 1,9 juta siswa mengikuti tes, sebagian besar secara daring, sisanya semi daring. Kepala BKPDM, Toni Toharudin, menyampaikan, “Sistem berjalan sangat stabil dan terkendali. Partisipasinya sangat tinggi.” Format tes dibagi dua hari: Matematika dan Numerasi disertai survei karakter, lalu Bahasa Indonesia dan Literasi disertai survei lingkungan belajar.

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP gelombang pertama yang berlangsung pada 6 s.d. 7 April 2026 berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Berdasarkan pantauan Posko Pusat (Command Center) TKA, sistem dan



Toni Toharudin

infrastruktur pusat menunjukkan performa yang baik, dengan tingkat trafik yang masih dalam batas kapasitas yang dapat ditangani.

“Secara keseluruhan, pada TKA hari pertama dan kedua ini, sistem berjalan sangat stabil dan terkendali. Partisipasinya sangat tinggi, kuatnya dukungan pemangku kepentingan lain, serta mekanisme pengendalian yang kita lakukan juga berjalan efektif,” ujar Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin dalam keterangan resmi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa (7/4).

Pada gelombang pertama, tercatat sebanyak 1.935.778 peserta telah mengikuti TKA, yang terdiri dari 1.777.571 peserta moda daring dan 158.207 peserta moda semi daring. Para peserta tersebut berasal dari 33.349 sekolah penyelenggara moda daring serta 2.451 sekolah penyelenggara moda semi daring, yang mencerminkan keterlibatan satuan pendidikan dengan berbagai kondisi kesiapan.

Pelaksanaan TKA juga didukung oleh 24.195 pengawas, bersama dengan 2.345 penyelia dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta 42.852 proktor moda daring dan 3.188 proktor moda semi daring yang memastikan jalannya asesmen di masing-masing satuan pendidikan.

Untuk menjaga integritas, TKA menggunakan skema soal berbasis daerah dengan variasi yang jauh lebih banyak dibandingkan soal terpusat, sehingga meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan keandalan hasil asesmen.

“Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi faktor penting dalam menjaga agar pelaksanaan TKA dapat berlangsung secara tertib, terjaga integritasnya, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tambahnya.

TKA jenjang SMP akan dilaksanakan pada 6 s.d. 16 April 2026, yang dibagi ke dalam empat gelombang untuk satuan pendidikan formal serta satu gelombang untuk pendidikan kesetaraan. “Tentunya pendekatan yang kita lakukan ini memastikan bahwa standar pelaksanaan yang sama di seluruh wilayah Indonesia, juga sekaligus memberikan banyak





fleksibilitas terhadap persiapan dari satuan pendidikan melalui sistem gelombang ini,” tambah Toni.

Adapun dalam pelaksanaannya, TKA dirancang berlangsung selama dua hari untuk setiap gelombang. Pada hari pertama, peserta akan melalui 10 menit latihan, 75 menit tes Matematika dan Numerasi, serta 20 menit survei karakter. Kemudian pada hari kedua, peserta akan mengerjakan 10 menit latihan, 75 menit tes Bahasa Indonesia dan Literasi, serta 20 menit survei lingkungan belajar.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Kemendikdasmen juga mengoperasikan posko pemantauan pusat (command center) serta posko pendampingan di daerah. Posko tersebut berfungsi untuk memberikan dukungan teknis maupun nonteknis secara cepat dan terkoordinasi kepada satuan pendidikan serta peserta didik.

Toni pun menegaskan bahwa Kemendikdasmen akan terus melakukan pemantauan dan penyempurnaan selama pelaksanaan TKA. “Kami sangat optimis dengan sinergi seluruh pihak. Tes Kemampuan

Akademik tahun ini akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik sesuai arah kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” tutupnya.

Pelaksanaan di Daerah

Di Aceh, SMPN 1 Meurah Dua melaksanakan TKA di tenda darurat

akibat bencana. Kepala BMP Aceh menuturkan, “Kondisi ini menunjukkan semangat luar biasa dari sekolah, guru, dan siswa.” Di Sumatra Selatan, SMPN 6 Kayuagung melaporkan pelaksanaan lancar tanpa kendala teknis. Kepala sekolah menegaskan, “TKA ini bertujuan untuk mengukur capaian individu peserta didik secara objektif.” Di Bangka Belitung, Bupati Bangka Tengah menilai TKA sebagai instrumen penting untuk memetakan kualitas pendidikan daerah. Sementara di Denpasar, lebih dari 11 ribu murid SMP mengikuti TKA dengan persiapan matang.

Memasuki gelombang kedua, sistem tetap berjalan lancar. Lebih dari 500 ribu siswa mengikuti setiap sesi. Kepala BKPDN menekankan fleksibilitas moda daring dan semi daring sebagai kunci keberhasilan. “Fleksibilitas ini menjawab beragam kondisi di lapangan,” ujarnya.

Suasana di lapangan memperlihatkan wajah pendidikan yang penuh harapan. Dibanyak sekolah,





ruang ujian dipenuhi semangat. Para orang tua menunggu di luar kelas dengan penuh harapan. Kepala SMP Negeri 3 Babelan menuturkan, “Tes ini membantu kami melihat kekuatan dan kelemahan siswa secara lebih detail. Hasilnya akan menjadi dasar perbaikan pembelajaran di tahun berikutnya.”

Kisah dari Kalimantan menambah warna. Di Palangka Raya, sejumlah sekolah melaksanakan TKA dengan memanfaatkan laboratorium komputer perguruan tinggi setempat. Seorang guru SMPN 5 Palangka Raya berkata, “Kami berterima kasih atas

dukungan universitas. Anak-anak jadi lebih percaya diri karena fasilitasnya memadai.” Di Papua, semangat siswa tak kalah tinggi. Di SMPN 2 Jayapura, seorang siswa bernama Yonas mengaku bangga bisa mengikuti tes berbasis komputer. “Awalnya saya takut tidak bisa mengoperasikan komputer, tapi ternyata mudah. Saya senang bisa ikut ujian seperti teman-teman di kota besar,” katanya.

Di Nusa Tenggara Timur, cerita lain muncul. SMPN 1 Kupang melaksanakan TKA dengan sistem semi daring karena keterbatasan jaringan. Kepala sekolah menjelaskan, “Kami tidak ingin ada

siswa yang tertinggal. Dengan semi daring, semua bisa ikut.” Seorang siswi bernama Maria menambahkan, “Saya merasa bangga karena walaupun jaringan sering putus, kami tetap bisa menyelesaikan soal.”

Pelaksanaan TKA SMP 2026 mencerminkan kesiapan sistem pendidikan nasional menghadapi asesmen berbasis komputer. Nilai kejujuran dan keberanian menjadi pesan utama. Mendikdasmen menegaskan, “Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi tentang keberanian dan kejujuran dalam belajar.”

KETEGASAN MENDIKDASMEN DI BALIK TKA 2026:

INTEGRITAS UJIAN DAN HARAPAN GENERASI MUDA

Di tengah pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama pelaku pelanggaran yang terjadi selama ujian berlangsung. Pernyataan itu disampaikan dengan nada serius, menandai komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sistem evaluasi nasional yang baru saja diterapkan.

“Semua laporan sudah kami kumpulkan. Ada bukti, ada nama, dan tentu akan ditindak sesuai aturan,” ujar Mendikdasmen dalam konferensi pers usai meninjau salah satu sekolah di Bekasi. Ia menambahkan bahwa pelanggaran yang dimaksud mencakup berbagai bentuk ketidakjujuran, mulai dari manipulasi teknis hingga upaya membantu peserta secara tidak sah. “Kami tidak ingin ada celah yang merusak kepercayaan publik terhadap TKA,” lanjutnya.

Di lapangan, suasana ujian memang berjalan relatif lancar, namun sejumlah insiden kecil sempat mencuat. Beberapa sekolah melaporkan adanya gangguan jaringan internet, sementara di daerah lain ditemukan indikasi penggunaan perangkat yang tidak sesuai ketentuan. Mendikdasmen menekankan bahwa semua temuan itu akan menjadi bahan evaluasi, bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih



kokoh di masa depan.

Guru dan kepala sekolah yang hadir dalam kesempatan itu menyambut baik ketegasan pemerintah. “Kami ingin anak-anak diuji dengan jujur, karena hasilnya akan menentukan arah pembelajaran ke depan,” kata seorang kepala SMP di Babelan. Seorang siswa menambahkan dengan polos, “Kalau ada yang curang, rasanya tidak adil bagi kami yang belajar

sungguh-sungguh.”

Dengan langkah ini, kementerian berharap TKA tidak hanya menjadi alat pemetaan kualitas pendidikan, tetapi juga simbol kejujuran dan kesetaraan. Mendikdasmen menutup pernyataannya dengan kalimat yang tegas: “Kami akan pastikan, siapa pun yang melanggar, tidak akan lolos dari tanggung jawab.”



TKA ini menjadi **instrumen untuk mengetahui kemampuan akademik siswa**, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh terkait **literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar**. Hasilnya akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan pendidikan ke depan.

Abdul Mu'ti
Mendikdasmen



MENDIKDASMEN TEKANKAN KEJUJURAN DI SMPN 1 SURABAYA

Suasana SMP Negeri 1 Surabaya pada Selasa (7/4) terasa istimewa. Di tengah pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, hadir langsung meninjau jalannya asesmen. Kehadiran sang menteri bukan sekadar simbol, melainkan bentuk komitmen pemerintah memastikan ujian berjalan tertib dan lancar.

Mu'ti menyaksikan sendiri bagaimana ruang ujian ditata rapi, perangkat komputer berfungsi baik, dan sistem pengawasan dijalankan sesuai prosedur. "Alhamdulillah, saya melihat langsung proses pelaksanaan berjalan dengan baik. Penataan sarana, termasuk perangkat dan sistem, telah disiapkan dengan sangat baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan," ucapnya.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa TKA bukan sekadar ujian akademik. Tes ini dirancang untuk memetakan mutu pendidikan secara menyeluruh, mencakup literasi, numerasi, karakter, hingga lingkungan belajar. "TKA ini menjadi instrumen untuk mengetahui kemampuan akademik murid, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh terkait literasi, numerasi, karakter, serta lingkungan belajar. Hasilnya akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan pendidikan ke depan," jelasnya.

Mu'ti menekankan bahwa TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan



tetap menjadi kewenangan sekolah melalui proses pembelajaran. "TKA bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Karena itu, murid tetap harus fokus pada pembelajaran di sekolah," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa kejujuran dalam mengerjakan tes harus menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA di wilayahnya berjalan lancar sejak hari pertama. Menurutnya, koordinasi lintas pihak dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur. "Kami memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas selama

pelaksanaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Surabaya, , menuturkan bahwa sekolah telah menyiapkan siswa dengan pengayaan materi, latihan soal, dan pendampingan intensif. "Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar dan anak-anak siap mengikuti TKA," katanya. Ia menilai asesmen ini tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat karakter murid.

Menutup kunjungannya, Mu'ti menegaskan bahwa hasil TKA akan dievaluasi secara nasional setelah seluruh jenjang menyelesaikan asesmen. "Hasil pelaksanaan ini akan kami evaluasi secara menyeluruh sebagai dasar untuk penyempurnaan sistem ke depan," tutupnya.

Cerita Guru Pengawas TKA Jujur dan Gembira

Paminta Akhir Riyadi

Guru SMPN 03 Karanganyar

"Menjadi bagian dari tim pengawas TKA merupakan pengalaman yang sangat membanggakan bagi saya sebagai pendidik.

Selama bertugas di SMP Negeri 2 Karanganyar, saya melihat sistem asesmen digital kita semakin matang dan stabil. Dukungan infrastruktur yang disediakan sangat membantu proses pengawasan secara real-time dan transparan.

Yang paling berkesan adalah kedisiplinan dan kejujuran siswa. Mereka mengikuti ujian dengan tertib dan penuh semangat. Koordinasi yang responsif antara pengawas, proktor, dan panitia pusat juga membuat kami merasa didukung dan tidak berjalan sendiri.."

Henny Aulia

Guru IPA SMPN 20 Hulu Sungai Tengah

"Saya merasa bangga dapat berkontribusi dalam pelaksanaan TKA sebagai bagian dari upaya memetakan kemampuan akademik siswa secara nasional.

Pelaksanaannya berjalan tertib dan kondusif, didukung sistem yang baik serta antusiasme siswa yang tinggi.

Memang ada tantangan, seperti memastikan perangkat dan koneksi tetap stabil serta menjaga siswa tetap tenang. Namun, dengan persiapan dan koordinasi yang baik, semua dapat diatasi.

Semoga hasil TKA ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan menjadi bahan evaluasi serta motivasi bagi siswa untuk terus berkembang. TKA jujur, TKA gembira"

Noval Amanda Firdaus

SMPI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya

"Melihat binar semangat dan konsentrasi tinggi di wajah para siswa pada hari pertama TKA ini sungguh luar biasa. Sebagai pengawas, sangat bangga menyaksikan langsung kejujuran yang dijunjung tinggi di tengah tantangan soal. Alhamdulillah, di hari pertama ini semuanya berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Semoga semua usaha dan ikhtiar ini bermuara tidak hanya nilai yang baik, tapi juga peningkatan kompetensi yang akan bermanfaat di masa depan.."

Khairil Anshari

Guru SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah

"Alhamdulillah pelaksanaan TKA di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah berjalan lancar, termasuk untuk siswa dari SMP Negeri Terbuka Barabai, dengan total 213 peserta.

Saya bertugas sebagai teknisi, dan pelaksanaan dilakukan secara full online di laboratorium komputer dalam beberapa gelombang. Perangkat menggunakan chromebook bantuan dinas, dan pengawasan dilakukan oleh guru dari luar sekolah dan Zoom.

Secara umum, jaringan internet dan listrik berjalan lancar, didukung koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan PLN. Partisipasi siswa juga baik, dan secara teknis mereka tidak mengalami kesulitan karena sudah terbiasa menggunakan perangkat serta mengikuti simulasi sebelumnya.

Dengan persiapan yang matang dan sarana yang memadai, pelaksanaan TKA dapat berjalan aman, nyaman, dan menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam mendukung program pemerintah.."

Terima kasih Bapak/Ibu Guru telah menjaga TKA tetap jujur dan gembira



PENJARINGAN DATA GURU BELUM BERSERDIK: **LANGKAH PEMERINTAH MENYELESAIKAN SERTIFIKASI**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah intensif melakukan penjarangan data terhadap guru yang hingga saat ini belum memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik). Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk memastikan para pendidik

tersebut segera dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu.

Proses identifikasi dimulai setelah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menuntaskan verifikasi menyeluruh terhadap data guru aktif di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, yang tercatat dalam Data



Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional. Dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan sejumlah guru yang seharusnya menjadi sasaran utama program PPG Guru Tertentu, namun belum terdaftar atau belum mengikuti proses pendaftaran. Penjaringan ini menjadi krusial agar mereka segera memperoleh kesempatan mengikuti PPG dan mendapatkan Serdik yang sah.

Manfaat mengikuti PPG dan memiliki Serdik bagi guru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kualitas hidup mereka. Sertifikat pendidik membuka akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), sebuah

hak yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung profesionalisme dalam menjalankan tugas mendidik.

Kemendikdasmen telah menetapkan kriteria yang jelas bagi guru yang masuk dalam sasaran penjaringan. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (3/4/2026), guru yang dimaksud adalah mereka yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4) serta berstatus aktif mengajar hingga tahun ajaran 2023/2024. “Guru tertentu dalam sasaran penjaringan data ini adalah guru yang sudah memiliki kualifikasi S1/D4 dan berstatus aktif mengajar sampai 2023/2024,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut. Mereka pada prinsipnya memenuhi syarat mengikuti PPG Guru Tertentu, namun belum melalui tahapan seleksi administrasi.

Untuk memudahkan, Kemendikdasmen telah mendata secara komprehensif para guru yang masuk kategori ini. Pemeriksaan status dapat dilakukan secara mandiri melalui tautan khusus yang disediakan, yakni <https://s.id/antriangurubelumserdik> (*s.id in Bing*). Apabila seorang guru mendapati dirinya termasuk dalam daftar tersebut, tindak lanjut akan segera dilakukan melalui notifikasi khusus yang muncul pada akun InfoGTK masing-masing.

Langkah penjaringan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menutup celah sertifikasi, memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam proses peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, diharapkan seluruh guru dapat berdiri sejajar sebagai tenaga pendidik profesional yang diakui secara resmi, sekaligus memperoleh hak-hak yang layak mereka terima.

PENJARINGAN DATA PPG:

LANGKAH NYATA TUNTASKAN SERTIFIKASI GURU

Penjarangan data guru yang belum bersertifikat pendidik tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menutup celah sertifikasi yang masih tersisa. Program PPG memang sudah berjalan lama dan mensertifikasi jutaan guru, tetapi data terbaru menunjukkan masih ada ratusan ribu guru yang belum terfasilitasi.

Pada Webinar Sosialisasi Penjarangan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidikan Tahun 2026 yang digelar oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dalam laporan yang disampaikan, Ferry Maulana Putra menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan semua guru yang memenuhi syarat bisa terjaring. Ia menegaskan,

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kebijakan dan mekanisme penjarangan data guru tertentu yang belum bersertifikat pendidik, serta mendorong peran aktif pemerintah daerah dan UPT dalam pelaksanaan penjarangan,” ujarnya.

Ferry juga mengingatkan capaian besar yang sudah diraih selama hampir dua dekade program sertifikasi berjalan. “Tercatat lebih dari 2,7 juta guru telah tersertifikasi, termasuk 600 ribu di tahun 2024 dan 800 ribu guru di tahun 2025,” ujarnya.

Namun ia menekankan masih ada celah yang harus ditutup, “Berdasarkan data Dapodik masih

terdapat sekitar 200 ribu guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan 174 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang menjadi potensi target penuntasan sertifikasi ini,” ujarnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menambahkan perspektif yang lebih luas dengan menekankan bahwa sertifikasi guru adalah bagian dari strategi besar negara untuk memperkuat kualitas pendidikan. Ia mengingatkan,

“Pendidikan menjadi pilar utama, dan guru memegang peran yang sangat strategis,” ujarnya.

Meski program penuntasan telah berjalan masif, Nunuk menekankan bahwa pekerjaan belum selesai. “Pada awal 2026 masih ditemukan sekitar 200 ribuan guru tertentu yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masih ada pekerjaan yang harus kita tuntas bersama,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peran daerah dalam

menyebarkan informasi secara inklusif, “Dorong mereka untuk segera menyampaikan keberminatannya mengikuti PPG guru tertentu agar tidak ada yang terlewat dari kesempatan ini,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Julia Gitavani menjelaskan tentang teknis pelaksanaan penjarangan dengan detail. Ia menegaskan bahwa sasaran utama adalah guru yang tercatat di Dapodik sampai tahun ajaran 2023–2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik.

“Penjarangan ini menyasar guru yang terdata di Dapodik sampai tahun ajaran 2023–2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik,” ujarnya.

Proses awal dilakukan mandiri oleh guru melalui InfoGTK.

“Para guru menyampaikan keberminatannya sesuai dengan kondisi kesiapan keberminatannya dan harapannya tanpa paksaan apapun,” ujarnya.

Julia menekankan pula fungsi pembersihan data agar program lebih tepat sasaran. “Dengan penjarangan ini harapannya kami bisa bersama-sama membersihkan



Nunuk Suryani



Ferry Maulana Putra

data, meng-clear up data sehingga hanya guru-guru yang memang identifikasi benar datanya berada dalam sistem dan memang mengajar di satuan pendidikan saja yang bisa mengikuti program PPG Guru Tertentu,” ujarnya.

Ia menutup dengan penegasan waktu pelaksanaan, “Insya Allah penjangkaran ini akan dilaksanakan selama dua bulan ke depan,” ujarnya.

Bicara mengenai dasar hukum dan persyaratan, Fitcha Asnyarno



Fitcha Asnyarno

menguraikan dasar hukum dan persyaratan dengan tegas, menekankan bahwa sertifikasi guru bukan sekadar formalitas, melainkan standar profesional yang diatur undang-undang. Ia menjelaskan,

“Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik hanya diberikan oleh perguruan tinggi yang



Julia Gitavani

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan dan terakreditasi,” ujarnya.

Fitcha menegaskan bahwa tidak semua universitas bisa menyelenggarakan PPG, hanya LPTK yang memiliki izin prodi PPG. “Saat ini sudah ada sekitar 150–160 LPTK negeri maupun swasta yang memiliki izin penyelenggaraan program studi PPG,” ujarnya.

Ia juga menyinggung jalur pemenuhan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi syarat. “Guru yang belum memenuhi syarat akademik difasilitasi untuk kuliah agar nantinya bisa mengikuti PPG,” ujarnya. Fitcha menutup dengan penekanan arah masa depan program, “Ketika seluruh guru dalam jabatan telah tersertifikasi, maka kita memasuki fase baru, di mana PPG difokuskan pada penyiapan calon guru sebelum memasuki profesi,” ujarnya.

Dengan paparan kebijakan, teknis, dan suara guru yang nyata, penjangkaran data 2026 tampak bukan sekadar administrasi. Ia adalah langkah terakhir untuk memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam perjalanan panjang sertifikasi pendidik, sekaligus membuka jalan menuju sistem pendidikan yang lebih kuat dan berkelanjutan.



PP TUNAS DAN PERTANYAAN BESAR “MAMPUKAH MENJAGA TUNAS BANGSA”

Dalam sejarah peradaban manusia, setiap gelombang kemajuan teknologi selalu menghadirkan dua sisi yang paradoksal: di satu sisi ia membuka cakrawala baru peradaban, di sisi lain ia membawa serta persoalan-persoalan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Revolusi industri membawa kemakmuran tetapi juga melahirkan eksploitasi buruh anak. Era digital menjanjikan konektivitas tanpa batas, namun diam-diam ia merenggut privasi dan keamanan generasi paling rentan: anak-anak.

Pada 28 Maret 2026, Indonesia mengambil langkah bersejarah. Pemerintah secara resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang lebih dikenal dengan akronim PP TUNAS. Regulasi ini menetapkan batas minimum usia 16 tahun bagi anak-anak untuk mengakses platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Ia adalah pernyataan politik yang jelas: negara hadir untuk melindungi warganya yang paling muda dari jerat algoritma yang dirancang untuk membuat ketagihan, dari eksploitasi data yang tak mereka pahami, dan dari konten-konten destruktif yang mengancam



Meutya Hafid

perkembangan psikologis mereka.

Di balik implementasi yang baru saja dimulai, terdapat narasi panjang tentang proses penyusunan, perdebatan di tingkat publik, respons platform digital global, hingga tantangan implementasi yang membentang ke depan. Artikel ini akan mengupas tuntas PP TUNAS dari seluruh sisinya: latar belakang kelahiran, substansi regulasi, dinamika kepatuhan platform digital, respons masyarakat, hingga prospek ke depan. Semua disajikan berdasarkan fakta, data, dan konteks yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Keresahan ke Regulasi: Perjalanan Panjang PP TUNAS

Gagasan tentang perlindungan anak di ruang digital sebenarnya bukanlah hal baru dalam wacana kebijakan

Indonesia. Keresahan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak-anak telah lama bergema dari berbagai kalangan: pendidik yang melihat perubahan perilaku murid-muridnya, orang tua yang kewalahan mengawasi aktivitas daring anak, hingga aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dengan korban anak-anak.

Namun, perjalanan dari keresahan menjadi regulasi yang operasional ternyata melalui proses yang tidak sederhana. Berdasarkan penelusuran Tempo, ide tentang regulasi pembatasan akses anak di internet sebenarnya telah muncul sejak era Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Pembahasan serupa juga pernah dilakukan di masa Menteri Budi Arie Setiadi, namun belum mencapai titik final.

Puncaknya terjadi pada era Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam tempo yang relatif singkat, pembahasan yang sempat tertunda akhirnya digenjut hingga menghasilkan produk hukum. Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Nomor 17 Tahun 2025 pada 27 Maret 2025. Tepat setahun setelah penandatanganan, regulasi ini mulai diberlakukan secara efektif.

Proses penyusunan yang terbilang cepat ini bukannya tanpa kritik.



Kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang teknologi informasi menyoroti kekhawatiran bahwa PP TUNAS dibuat terburu-buru, tanpa didahului kajian yang memadai tentang kesiapan infrastruktur dan mekanisme implementasinya. Kritik juga muncul terkait minimnya keterlibatan kelompok sipil dalam proses penyusunan.

Menjawab kritik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa substansi PP TUNAS telah melalui proses kajian yang panjang, bahkan sejak 2023. Yang dilakukan pada periode akhir hanyalah percepatan finalisasi untuk menjawab urgensi perlindungan anak di tengah meningkatnya ancaman digital.

Di tingkat internasional, Indonesia tidak sendirian. Australia menjadi pelopor dengan meloloskan undang-undang pelarangan media sosial

bagi anak di bawah 16 tahun pada akhir 2024. PP TUNAS menempatkan Indonesia sebagai negara kedua setelah Australia yang memberlakukan pembatasan usia serupa, sekaligus menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki regulasi komprehensif tentang perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Meutya Hafid bahkan membawa kebijakan ini ke panggung global. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunications Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin di Jenewa, Swiss, pada Juli 2025, ia memperkenalkan PP TUNAS sebagai model regulasi yang bisa menjadi acuan global dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

“PP TUNAS mencerminkan komitmen Indonesia melindungi anak secara daring, demi kesehatan dan kesejahteraan generasi muda,”

ujar Meutya dalam pertemuan tersebut seperti dikutip lama resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB).

Langkah diplomasi ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pelaksanaan program-program ITU di Asia Tenggara, mengingat organisasi PBB tersebut telah memiliki kantor perwakilan di Jakarta.

PP TUNAS, yang merupakan singkatan dari “Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital”, memiliki inti kebijakan yang cukup tegas: pembatasan akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Dalam konteks implementasi awal, pemerintah menetapkan delapan platform digital yang menjadi sasaran utama. Mereka adalah YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemilihan

delapan platform ini didasarkan pada karakteristik layanan mereka yang masuk dalam kategori jejaring sosial dan media sosial berisiko tinggi.

Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 menjadi payung hukum pelaksanaan dari PP TUNAS. Dalam aturan turunan ini dijelaskan secara rinci mekanisme pengawasan dan sanksi yang akan dikenakan kepada platform yang tidak mematuhi ketentuan.

Sanksi yang diatur bersifat berjenjang. Dimulai dari sanksi administratif berupa surat teguran, kemudian penghentian akses sementara, hingga yang paling berat adalah pemutusan akses secara permanen di wilayah Indonesia.

Struktur sanksi ini memberikan ruang bagi platform untuk melakukan perbaikan kepatuhan secara bertahap, namun tetap menegaskan keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi.

Selain pembatasan usia, PP TUNAS juga mengatur tentang perlindungan data pribadi anak. Menteri Meutya Hafid menekankan bahwa regulasi ini dilahirkan untuk melindungi data privasi anak yang saat ini justru tersebar berserakan di berbagai platform media sosial.

“Anak-anak belum tahu mana data yang perlu atau tidak ditayangkan,” kata Meutya dalam keterangannya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat.

Poin ini menjadi krusial mengingat praktik monetisasi data anak oleh platform digital telah menjadi isu global. Studi dan kasus-kasus hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa data dan privasi anak di ruang digital kerap dieksploitasi bahkan dimonetisasi secara tidak etis dan tidak bertanggung jawab.



Fifi Aleyda Yahya

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyebut PP TUNAS sebagai “senjata” untuk melawan konten digital berbahaya dalam forum Sahabat Tunas di Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh, Kota Malang, November 2025.

“Bayangkan internet sebagai perpustakaan raksasa yang penuh dengan jutaan buku. Di dalamnya, ada banyak ilmu bermanfaat, tetapi ada juga buku yang tidak pantas dan berbahaya untuk anak-anak. PP TUNAS hadir sebagai penjaga perpustakaan tersebut, memastikan setiap buku atau konten dapat diakses sesuai usianya dan aman bagi adik-adik kita,” tutur Fifi.

Dinamika Kepatuhan: Antara Dukungan Penuh dan Resistensi Diam-diam

Menjelang masa efektif PP TUNAS pada 28 Maret 2026, pemerintah melakukan serangkaian komunikasi intensif dengan delapan platform digital yang menjadi sasaran awal. Hasilnya menunjukkan peta kepatuhan yang beragam.

Pada 27 Maret 2026, satu hari sebelum regulasi berlaku, Menteri Meutya Hafid melaporkan perkembangan kepatuhan kepada

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hanya dua platform yang mencapai status kepatuhan penuh: X dan Bigo Live.

X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, menjadi salah satu yang paling cepat merespons. Sejak 17 Maret 2026, X secara resmi mengubah batas usia minimum pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun. Langkah ini diumumkan melalui surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital dan dipublikasikan dalam laman Pusat Bantuan khusus Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengapresiasi langkah X sebagai bentuk komitmen kepatuhan dan perlindungan anak di ruang digital. X juga berkomitmen untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum mulai 27 Maret 2026.

Bigo Live, platform live streaming yang juga masuk dalam kategori berisiko tinggi, bahkan mengambil langkah lebih ketat dengan menaikkan batas usia menjadi 18 tahun. Platform ini juga melakukan perubahan pada rating aplikasi di app store dan menerapkan sistem moderasi berlapis menggunakan kecerdasan artifisial serta verifikasi manual.

Dua platform lainnya, TikTok dan Roblox, dikategorikan sebagai “kooperatif sebagian”. Roblox mengajukan proposal untuk membatasi pengguna di bawah 13 tahun hanya pada akses offline. Sementara TikTok berkomitmen untuk melakukan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap dan akan mengumumkan

peta jalan operasional untuk pengguna berusia 14 hingga 15 tahun.

Di sisi lain, empat platform besar masih belum memenuhi ketentuan PP TUNAS hingga H-1 pemberlakuan. Mereka adalah Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube. Keempat platform yang dimiliki oleh Meta dan Alphabet (Google) ini menjadi perhatian utama karena basis pengguna yang sangat besar di Indonesia.

Menghadapi situasi ini, Menteri Meutya Hafid menegaskan sikap tegas pemerintah. “Tidak ada kompromi dalam kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia,” tegasnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat malam.

Ia juga menyoroiti isu kesetaraan perlakuan. Menurutnya, fitur perlindungan anak yang diterapkan platform digital di negara lain harus diterapkan sama di Indonesia tanpa diskriminasi.

“Anak-anak di Indonesia sama berharganya dengan anak-anak di mana pun di Australia. Tidak boleh ada situasi di mana aturan perlindungan anak diterapkan di beberapa negara tetapi tidak di negara lain,” ujarnya.

Prinsip universalitas ini menjadi argumen penting bagi pemerintah. Anak-anak, di mana pun mereka berada, memiliki hak yang sama atas perlindungan di ruang digital. Negara-negara dengan kapasitas tawar lebih rendah tidak boleh mendapatkan perlakuan kelas dua dari platform digital global.

Sejak pengumuman implementasinya, PP TUNAS telah memicu diskusi luas di masyarakat. Di tingkat legislatif daerah, respons cenderung positif. DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,



Lalu Ramdan

misalnya, menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan regulasi ini.

Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat terhadap dampak negatif media sosial pada anak-anak menjadi latar belakang dukungan tersebut. “Kami mendukung penerapan PP Tunas untuk melindungi generasi muda atau anak-anak dari dampak negatif media sosial yang mulai meresahkan semua pihak,” katanya di Praya, Minggu (29/3/2026).

Ramdan menyoroiti beberapa dampak negatif yang telah terlihat di masyarakat, mulai dari perubahan cara berpakaian, pengenalan terhadap judi

online, hingga game dan konten negatif lainnya yang mudah diakses anak-anak. Yang lebih mengkhawatirkan, ia menyebut bahwa beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Lombok Tengah bermula dari perkenalan di media sosial.

“Kondisi saat ini semua mulai kebobolan dalam menjaga anak-anak. Menjaga anak-anak ini merupakan tugas bersama,” tegasnya.

Di tingkat nasional, perdebatan lebih beragam. Kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap kebijakan digital menyoroiti beberapa kelemahan dalam PP TUNAS. Pertama, regulasi ini dinilai tidak secara jelas mendefinisikan batasan usia anak, sementara berbagai undang-undang lain di Indonesia memiliki definisi yang berbeda-beda tentang kategori anak.

Kedua, meskipun PP TUNAS mewajibkan anak untuk menyertakan persetujuan orang tua dalam mendaftar di situs tertentu, mekanisme persetujuan ini tidak diatur secara rinci dalam regulasi. Ketiadaan mekanisme yang jelas berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.

Ketiga, ada kekhawatiran



tentang potensi pelanggaran privasi dalam proses verifikasi usia. Tanpa mekanisme yang tepat, verifikasi usia dapat mengarah pada pengumpulan data sensitif yang justru membahayakan privasi pengguna.

Di sisi lain, kalangan pendidik dan orang tua cenderung menyambut positif regulasi ini. Mereka melihat PP TUNAS sebagai angin segar di tengah kepanikan kolektif tentang dampak media sosial pada generasi muda. Guru-guru di berbagai daerah melaporkan bahwa mereka melihat perubahan perilaku siswa yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti penurunan konsentrasi belajar, peningkatan kasus perundungan daring, hingga gangguan kecemasan sosial.

Forum literasi digital seperti “Sahabat Tunas” yang digelar Kementerian Komdigi di berbagai daerah menjadi wadah sosialisasi sekaligus penjangkauan aspirasi masyarakat. Dalam forum di Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh, Kota Malang, November 2025, Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya menekankan

bahwa tujuan dari regulasi ini adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sebagai tunas bangsa yang cerdas, beretika, dan mampu memilih hal-hal positif di dunia digital.

Meskipun secara formal telah diberlakukan, implementasi PP TUNAS ke depan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah mekanisme verifikasi usia yang efektif namun tidak melanggar privasi.

Platform digital seperti X dan Bigo Live telah mulai menerapkan verifikasi usia, namun belum ada standar baku yang disepakati secara industri. Beberapa opsi yang mungkin dikembangkan termasuk verifikasi melalui data kependudukan, penggunaan teknologi kecerdasan artifisial untuk estimasi usia berdasarkan konten dan perilaku, atau sistem verifikasi yang melibatkan orang tua.

Tantangan kedua adalah kesiapan infrastruktur pengawasan. Kementerian Komdigi, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, memiliki tugas untuk

memantau kepatuhan platform digital. Dengan jumlah platform yang terus bertambah dan pengguna yang mencapai ratusan juta, dibutuhkan sumber daya yang signifikan untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, setelah menerima laporan kesiapan implementasi dari Menteri Meutya, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan PP TUNAS. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa menjadi tugas Kementerian Komdigi semata, tetapi melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri dalam aspek sosialisasi ke daerah.

Tantangan ketiga adalah edukasi masyarakat. PP TUNAS mungkin efektif membatasi akses anak terhadap platform berisiko tinggi, tetapi jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, anak-anak bisa saja mencari celah atau beralih ke platform lain yang tidak terjangkau regulasi.

Orang tua tetap menjadi benteng pertama perlindungan anak di ruang digital. DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan membatasi anak-anak mereka dalam menggunakan telepon genggam maupun media sosial.

“Orang tua harus lebih aktif dalam menjaga anak-anak. Artinya jangan biarkan mereka terlalu bebas dalam menggunakan media sosial. Ajak mereka belajar ngaji maupun kegiatan positif lainnya,” pesannya.

Tantangan keempat bersifat global: harmonisasi dengan kebijakan negara lain dan negosiasi dengan platform digital global. Platform-platform besar

seperti Meta dan Google memiliki kebijakan global yang cenderung seragam. Mereka mungkin enggan membuat pengecualian khusus untuk Indonesia jika dianggap mengganggu model bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesiapan untuk bersikap tegas. Menteri Meutya Hafid memastikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap platform yang tidak patuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pemutusan akses terhadap platform besar tentu bukan langkah yang mudah. Dampaknya terhadap ekonomi digital, terhadap pengguna yang sudah terbiasa dengan platform tersebut, dan terhadap citra Indonesia sebagai pasar digital yang ramah investasi perlu dipertimbangkan secara matang.

PP TUNAS dalam Konteks Perlindungan Anak Global

PP TUNAS tidak lahir dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari gelombang global regulasi perlindungan anak di ruang digital. Australia menjadi pionir dengan Online Safety Act dan pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang disahkan pada akhir 2024.

Inggris memiliki Online Safety Bill yang mewajibkan platform digital untuk melindungi anak dari konten berbahaya. Uni Eropa memberlakukan Digital Services Act yang antara lain mengatur tentang kewajiban transparansi algoritma dan perlindungan anak.

Apa yang membedakan PP TUNAS dengan regulasi serupa di negara lain adalah pendekatannya yang komprehensif. Ia tidak hanya

mengatur tentang batasan usia, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola data, mekanisme persetujuan orang tua, dan sanksi yang berjenjang.

Pada Juli 2025, Indonesia memperkenalkan PP TUNAS kepada International Telecommunications Union (ITU) sebagai model regulasi yang bisa menjadi acuan global. Langkah ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pengikut kebijakan global, tetapi juga ikut membentuk arus utama regulasi perlindungan anak di dunia digital.

Menteri Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia dengan ITU dalam isu-isu strategis global seperti tata kelola kecerdasan artifisial(AI), perencanaan spektrum 5G dan 6G, serta strategi pengembangan talenta digital nasional.

“Panduan dari ITU akan sangat penting untuk memastikan kebijakan kami tetap inklusif, berpandangan ke depan, dan selaras dengan standar global,” ujar Meutya.

Pengakuan internasional terhadap PP TUNAS juga datang dari lembaga-lembaga asing. Kantor berita Malaysia Bernama memberitakan implementasi PP TUNAS sebagai langkah bersejarah Indonesia dalam melindungi anak di ruang digital, menempatkan Indonesia sebagai negara non-Barat pertama yang memberlakukan pembatasan nasional semacam ini.

Catatan Kritis untuk PP TUNAS

Meskipun mendapat dukungan luas, PP TUNAS tetap menyisakan sejumlah pertanyaan kritis yang perlu dijawab dalam implementasinya ke depan. Kelompok masyarakat sipil yang konsentrasi terhadap isu kebebasan berpendapat dan privasi digital menyoroti beberapa catatan penting.

Pertama, soal definisi “anak”. PP TUNAS menggunakan batas usia 16 tahun sebagai ambang batas akses terhadap platform berisiko tinggi. Namun, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, definisi anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, batas usia dewasa adalah 17 tahun. Inkonsistensi definisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi lintas sector.

Kedua, soal mekanisme persetujuan orang tua. PP TUNAS tidak secara rinci mengatur bagaimana persetujuan orang tua harus diperoleh dan diverifikasi. Apakah cukup dengan formulir elektronik sederhana? Apakah diperlukan verifikasi identitas orang tua? Jika ya, data identitas orang tua akan dikumpulkan oleh platform, yang justru menciptakan risiko privasi baru.

Ketiga, soal potensi over-blocking. Dalam upaya melindungi anak dari konten berbahaya, ada risiko bahwa platform akan menerapkan pendekatan yang terlalu agresif dalam memblokir konten. Pengguna dewasa pun bisa terkena dampak pembatasan akses terhadap konten yang sebenarnya sah untuk diakses.

Keempat, soal efektivitas pembatasan usia di tengah maraknya cara-cara untuk mengakali sistem verifikasi. Anak-anak yang cukup melek digital seringkali lebih cekatan dalam mencari celah dibanding orang tua atau bahkan regulator. Tanpa pendekatan yang holistik, pembatasan usia bisa menjadi sekadar “lakban” yang menutupi masalah yang lebih fundamental: rendahnya literasi digital anak dan orang tua.

Kelima, soal dinamika kepatuhan platform. Status kepatuhan yang



Arif Jamali

dinamis, seperti yang diakui oleh Menteri Meutya, menunjukkan bahwa kepatuhan platform tidak bersifat tetap. Platform dapat beralih dari patuh menjadi tidak patuh, atau sebaliknya. Ini menuntut kemampuan pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah.

PP TUNAS, Regulasi Yang Butuh Partisipasi Global

• Keluarga: Benteng Pertama dan Utama

Akademisi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, I Putu Mardika, melihat PP Tunas sebagai respons negara terhadap perubahan lanskap budaya akibat penetrasi teknologi digital yang semakin massif.

Dalam perspektif Mardika, keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak. Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai etika digital sejak dini melalui peran orang tua yang tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Namun, tantangannya tidak sederhana. Banyak orang tua yang juga “kecanduan” gawai dan tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang bahaya paparan digital berlebihan pada anak.

Di sinilah pentingnya sosialisasi masif dari pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif.

Staf Khusus Mendikdasmen, Arif Jamali, menambahkan bahwa Kemendikdasmen menjalankan program konkret seperti Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, serta penguatan kebinekaan dan inklusivitas.

“Sekolah bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi laboratorium kehidupan untuk menanamkan nilai kejujuran, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab,” katanya.

• Sekolah: Laboratorium Kehidupan

Peran sekolah tidak kalah penting. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menegaskan bahwa penguatan karakter memerlukan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, hingga komunitas.

Sekolah dapat menjadi ujung tombak dalam mengajarkan literasi digital yang sehat. Bukan sekadar cara menggunakan teknologi, tetapi juga etika, keamanan, dan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata.

• Masyarakat: Gerakan Kolektif

Pada tingkat yang lebih luas, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito menekankan pentingnya menggerakkan penguatan karakter dari kebijakan menjadi gerakan sosial.

“Dari kebijakan ke gerakan sosial, dari negara ke masyarakat, dari regulasi ke internalisasi nilai terpadu,” tegasnya Warsito.

Ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh pasif menunggu arahan

pemerintah. Komunitas, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta harus turut mengambil peran dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.

“Ini isu lintas generasi. Semua pihak harus terlibat, terutama yang memiliki akses dan literasi lebih baik,” katanya.

PP Tunas adalah langkah berani dan progresif. Dalam konteks global, Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan pembatasan nasional penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun berdasarkan perkembangan regulasi regional. Ini adalah momen penting di mana negara menunjukkan “taringnya” di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

Namun, pada akhirnya, regulasi hanyalah alat. Keberhasilan PP Tunas tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi atau kepatuhan platform, tetapi oleh sejauh mana ia mampu menggerakkan kesadaran kolektif bahwa melindungi anak di ruang digital adalah tanggung jawab kita bersama.

Pertanyaan “Mampukah PP Tunas Menyelamatkan Tunas Bangsa?” tidak akan dijawab hari ini atau besok. Jawabannya akan terlihat dalam satu, dua, atau lima tahun ke depan, ketika kita mulai melihat perubahan perilaku, kesehatan mental yang lebih baik, dan generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi tetapi juga berkarakter kuat dan berbudaya luhur.

Yang pasti, PP Tunas telah membuka babak baru. Babak di mana negara tidak lagi tinggal diam, di mana kepentingan anak ditempatkan di atas kepentingan industri, dan di mana ruang digital mulai dikembalikan pada fungsi awalnya: sebagai alat yang melayani manusia, bukan sebaliknya.

Wajah Baru PP Tunas: Garda Terdepan Perlindungan Anak Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) diterbitkan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Berikut selang pandang tentang PP TUNAS.



1 Apa itu PP TUNAS?

Aturan untuk melindungi anak di ruang digital, seperti media sosial dan game online.

2 PP Tunas mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyorong konten berbahaya bagi anak.

Tujuan Utama PP TUNAS

Mengapa PP TUNAS penting?

48% pengguna internet Indonesia adalah anak yang rentan terpapar konten negatif.



Melindungi anak di ruang digital dari konten berbahaya dan eksploitasi data.



Meningkatkan tanggung jawab PSE.



Mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak.



Menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik.



Mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat.

Batasan usia anak di ruang digital menurut PP TUNAS

<13 tahun

Hanya akses platform khusus anak dan wajib pengawasan orang tua.

13-15 tahun

Akses terbatas dan harus mendapat izin serta pendampingan orang tua.

16-17 tahun

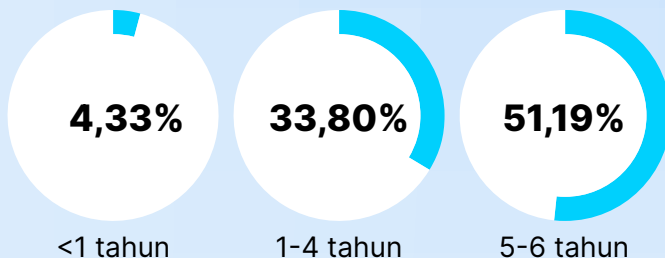
Diizinkan mengakses layanan digital dengan risiko tinggi seperti media sosial asal dengan persetujuan orang tua.

Sasaran PP TUNAS

Anak-anak, orang tua dan wali, pendidik, platform digital, dan pemerintah.

Pengguna internet pada anak

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024



” Aturan ini kita lahirkan untuk melindungi data-data privasi anak.

Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital





MBG: ANTARA HARAPAN, ANGGARAN, DAN PERTANYAAN BESAR

Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** sejak awal digagas sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah pembangunan sosial Indonesia. Ia lahir dari kesadaran bahwa gizi anak adalah fondasi masa depan bangsa. Dengan angka stunting yang masih tinggi, MBG hadir bukan sekadar sebagai kebijakan teknis, melainkan simbol kepedulian negara terhadap generasi muda. Kehadirannya

di sekolah-sekolah memberi pesan moral yang kuat: negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapat hak dasar berupa makanan sehat.

Sejak diluncurkan, MBG segera menjadi sorotan. Di sekolah-sekolah, anak-anak menerima makanan bergizi dengan menu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Guru-guru menyambutnya sebagai dukungan nyata terhadap proses belajar. Orang tua merasa

lega karena beban biaya makan anak berkurang. Viralitas MBG di media sosial memperkuat citra program ini. Video anak-anak tersenyum sambil memegang kotak makanan sehat, unggahan menu harian, hingga testimoni guru dan orang tua menjadikan MBG bukan hanya kebijakan, melainkan fenomena sosial.

Namun, keputusan pemerintah untuk memangkas pelaksanaan MBG dari enam hari menjadi lima hari



sepekan menimbulkan pertanyaan besar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, “Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu.” Pernyataan ini menekankan bahwa kualitas tetap dijaga, terutama di daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini dapat menghemat hingga Rp20

triliun, angka yang signifikan di tengah tekanan fiskal akibat situasi global.

Di media sosial, perdebatan berlangsung sengit. Sebagian warganet menilai pemangkasan ini sebagai bentuk kemunduran komitmen. “Kalau sudah viral dan jadi harapan masyarakat, kenapa justru dikurangi?” tulis seorang pengguna Twitter. Di sisi lain, ada pula yang mendukung langkah efisiensi ini dengan alasan menjaga keseimbangan fiskal negara. Perdebatan ini menunjukkan

bahwa MBG telah melampaui fungsi teknisnya: ia kini menjadi arena tarik-menarik antara idealisme sosial dan realitas fiskal.

Seorang guru di Bekasi mengatakan, “Kami melihat anak-anak lebih bersemangat belajar setelah program ini berjalan. Mereka tidak lagi datang ke sekolah dengan perut kosong.” Kutipan ini menggambarkan dampak langsung MBG terhadap kehidupan sehari-hari. Sementara seorang orang tua di Yogyakarta berkomentar, “Kami tidak masalah kalau hanya lima hari, asal kualitas makanannya tetap terjaga. Yang penting anak-anak tidak kehilangan gizi.” Di sisi lain, seorang aktivis pendidikan menilai, “Pemangkasan ini bisa menjadi sinyal bahwa komitmen negara terhadap gizi anak tidak sekuat yang dijanjikan.”

Pertanyaan besar yang kini muncul adalah apakah publik akan menerima kompromi ini sebagai langkah realistis, atau justru melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap janji besar negara untuk generasi muda. Jika publik menerima, maka MBG lima hari tetap bisa berjalan sebagai program unggulan, dengan kualitas makanan yang terjaga dan distribusi yang





Program Mid-Day Meal Scheme, di India.

merata. Namun, jika publik menolak, maka kebijakan ini bisa menjadi titik balik yang merusak kepercayaan terhadap komitmen pemerintah.

Dari sisi anggaran, pemangkasan ini memang memberikan ruang fiskal yang signifikan. Rp20 triliun yang dihemat bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk penanganan dampak konflik global dan stabilitas ekonomi. Namun, risiko yang muncul adalah berkurangnya asupan gizi anak jika satu hari tanpa MBG tidak digantikan oleh sumber gizi lain di rumah. Hal ini berpotensi

memperlebar kesenjangan antara daerah dengan akses pangan cukup dan daerah yang masih rawan. Guru-guru di daerah terpencil mengungkapkan kekhawatiran mereka. Seorang guru di Nusa Tenggara Timur berkata, “Anak-anak di sini sangat bergantung pada makanan dari sekolah. Kalau dikurangi, kami khawatir mereka akan kembali datang dengan perut kosong.”

Untuk memahami lebih jauh, kita perlu menelusuri sejarah kebijakan gizi di Indonesia. Sejak era Orde Baru, program pemberian makanan tambahan di sekolah sudah pernah

dicoba, namun sering kali terhenti karena keterbatasan anggaran. MBG dianggap sebagai terobosan karena skalanya nasional dan komitmennya jelas. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sebenarnya tidak sendirian. India memiliki program Mid-Day Meal yang memberi makan jutaan anak sekolah setiap hari. Brasil menjalankan program merata di sekolah-sekolah negeri. Di banyak negara, program gizi sekolah menjadi tulang punggung kebijakan pendidikan.

Analisis politik juga penting. MBG bukan hanya kebijakan gizi, melainkan janji kampanye yang besar. Ketika janji itu direalisasikan, publik melihatnya sebagai bukti komitmen. Namun, ketika janji itu dipangkas, publik bisa menilai bahwa komitmen mulai goyah. Dalam politik, simbol sering kali lebih penting daripada angka. Satu hari yang hilang bisa dianggap sebagai tanda bahwa janji besar tidak sepenuhnya ditepati.

Dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang mendapat gizi cukup cenderung lebih fokus belajar, lebih jarang sakit, dan lebih siap menghadapi masa depan. Pemangkasan satu hari mungkin



National School Feeding Programme, di Brasil.



National School Lunch Program, di Amerika.

“Bagi banyak anak, makanan di sekolah adalah satu-satunya makanan bergizi yang mereka dapatkan dalam sehari.”

Perbandingan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak sendirian. Program gizi sekolah adalah standar global, dan MBG menempatkan Indonesia dalam barisan negara yang serius menangani gizi anak. Namun, perbedaan muncul dalam konsistensi. India, Brasil, dan Amerika Serikat menjalankan program ini setiap hari sekolah tanpa pemangkasan. Di sinilah pertanyaan besar kembali muncul: apakah pemangkasan MBG menjadi lima hari sepekan akan membuat Indonesia terlihat kurang berkomitmen dibanding negara lain?

Analisis politik menambahkan lapisan lain. MBG bukan hanya kebijakan gizi, melainkan janji kampanye yang besar. Ketika janji itu direalisasikan, publik melihatnya sebagai bukti komitmen. Namun, ketika janji itu dipangkas, publik bisa menilai bahwa komitmen mulai goyah. Dalam politik, simbol sering kali lebih penting daripada angka. Satu hari yang hilang bisa dianggap sebagai tanda bahwa janji besar tidak sepenuhnya ditepati.

Dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang mendapat gizi cukup cenderung lebih fokus belajar, lebih jarang sakit, dan lebih siap menghadapi masa depan. Pemangkasan satu hari mungkin terlihat kecil, tetapi jika tidak diimbangi dengan sumber gizi lain, dampaknya bisa signifikan. Seorang pakar gizi dari Universitas Indonesia mengatakan, *“Konsistensi adalah kunci. Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang teratur. Jika ada hari kosong, maka ritme itu terganggu.”*

terlihat kecil, tetapi jika tidak diimbangi dengan sumber gizi lain, dampaknya bisa signifikan. Seorang pakar gizi dari Universitas Indonesia mengatakan, *“Konsistensi adalah kunci. Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang teratur. Jika ada hari kosong, maka ritme itu terganggu.”*

Pada akhirnya, pertanyaan besar itu tetap menggema: kompromi atau pengkhianatan. Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi publik, menjaga kualitas makanan, dan memastikan distribusi tetap merata. Jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa kualitas tetap terjaga, publik mungkin akan menerima kompromi ini. Namun, jika ada tanda-tanda penurunan kualitas atau ketidakmerataan distribusi, maka publik bisa melihatnya sebagai pengkhianatan.

Kebijakan Gizi di Dunia

Di India, program *Mid-Day Meal Scheme* telah berjalan sejak tahun 1995 dan kini memberi makan lebih dari 120 juta anak setiap hari di sekolah-

sekolah negeri. Program ini dianggap sebagai salah satu intervensi gizi terbesar di dunia. Seorang pejabat pendidikan India pernah mengatakan, *“Kami melihat anak-anak tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih rajin hadir di sekolah karena adanya makanan gratis.”* Kutipan ini menunjukkan bahwa program gizi sekolah bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal akses pendidikan.

Brasil memiliki *National School Feeding Programme* yang menyediakan makanan bergizi di sekolah-sekolah negeri. Program ini bahkan melibatkan petani lokal, sehingga selain memberi makan anak-anak, ia juga mendukung ekonomi pedesaan. Seorang pakar kebijakan Brasil menekankan, *“Kami tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga membangun rantai pasok pangan yang adil.”*

Di Amerika Serikat, program *National School Lunch Program* sudah berjalan sejak 1946. Meski berbeda konteks, program ini menunjukkan bahwa negara maju pun menaruh perhatian besar pada gizi anak sekolah. Seorang guru di New York mengatakan,

SKANDAL DI BALIK PERANG IRAN VS AS DAN ISRAEL:

TRUMP DIGUNCANG TUDUHAN INSIDER TRADING

Ketika Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat dalam konflik bersenjata pada awal 2026, dunia menyaksikan gelombang baru penderitaan kemanusiaan. Namun di balik gemuruh rudal dan diplomatik yang tegang, sebuah skandal diam-diam bergulir di pasar keuangan global. Tuduhan insider trading menyeruak ke permukaan, mengarah pada satu pertanyaan yang mengganggu: apakah ada orang-orang tertentu yang mengetahui arah kebijakan perang sebelum diumumkan, lalu memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan pribadi?

Yang membuat skandal ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya adalah titik bidiknya yang langsung mengarah ke pusat kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Nama Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan, bukan karena kebijakannya yang kontroversial, melainkan karena transaksi-transaksi mencurigakan yang terjadi tepat sebelum ia menyampaikan pernyataan-pernyataan penting yang mengubah arah pasar global.

Pada pagi hari tanggal 23 Maret 2026, pasar keuangan global masih dalam keadaan tenang. Tidak ada rilis data ekonomi penting. Tidak ada pernyataan bank sentral yang dijadwalkan. Tidak ada peristiwa geopolitik besar yang



diperkirakan akan terjadi. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak.

Pukul 6.49 pagi waktu New York, atau tepatnya 6.49-6.50 waktu setempat, terjadi lonjakan volume transaksi yang tidak biasa di pasar minyak mentah. Menurut data yang dihimpun Bloomberg dan dilaporkan oleh Financial Times, sekitar 6.200 kontrak berjangka (futures) minyak mentah jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) berpindah tangan dalam waktu hanya satu menit. Nilai nominal transaksi tersebut diperkirakan mencapai 5,8 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar

Rp94 triliun.

Angka ini luar biasa. Pada jam-jam awal perdagangan yang biasanya memiliki likuiditas tipis, volume sebesar itu bukan sekadar anomaly, ia adalah gempa bumi kecil yang mengguncang pasar. Lebih mencurigakan lagi, transaksi tersebut tidak terjadi secara acak. Pihak yang melakukan pembelian atau penjualan tersebut mengambil posisi yang sangat spesifik: mereka menjual kontrak berjangka minyak dalam jumlah besar, sambil membeli kontrak berjangka indeks saham S&P 500.

Tidak sampai seperempat jam kemudian, tepatnya pukul 7.04 pagi,



Presiden Donald Trump mengunggah pesan di platform Truth Social miliknya. Isinya mengejutkan dunia.

“Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dan produktif dengan Iran terkait penyelesaian total dan sempurna atas permusuhan kami di timur tengah,” tulis Trump.

Trump juga mengumumkan bahwa serangan yang direncanakan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran ditunda selama lima hari untuk memberi ruang negosiasi lebih lanjut.

Dampaknya langsung terasa. Harga minyak mentah dunia ambruk. Brent crude yang sebelumnya diperdagangkan di kisaran harga tinggi merosot lebih dari 10 persen dalam hitungan menit, bahkan sempat menembus di bawah 100 dolar AS per barel.

Sebaliknya, indeks saham Amerika Serikat melonjak tajam. S&P 500 futures melesat naik lebih dari 2,5 persen dalam perdagangan pramarket. Pasar bereaksi dengan euforia terhadap prospek berakhirnya konflik yang telah membuat ekonomi global cemas selama berminggu-minggu.

Namun bagi para analis pasar yang



Michael Lynch

jeli, lonjakan volume transaksi 15 menit sebelum pengumuman Trump bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. “Dalam satu menit, transaksi yang terjadi beberapa kali lebih besar dari biasanya. Di pasar minyak, transaksi sebesar ini tidak biasa terjadi,” kata Michael Lynch, analis minyak dari Energy Economic Strategy Research, kepada AFP.

Seorang portofolio manager yang berbicara kepada Financial Times dengan syarat anonim menyatakan dengan lebih gamblang.

“Ini sangat tidak biasa untuk hari tanpa risiko peristiwa, tanpa pernyataan The Fed, dan tanpa rilis data pasar minyak penting. Seseorang baru saja menghasilkan banyak uang,” kata sumber tersebut.

Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat langsung bereaksi keras. Dalam unggahan di media sosial,



ia menyoroti bahwa transaksi mencurigakan itu tidak hanya terjadi di pasar minyak, tetapi juga di pasar saham.

“S&P 500 futures dibeli sebesar 1,5 miliar dolar sementara minyak dijual sebesar 192 juta dolar hanya lima menit sebelum pengumuman Trump. Ini 4-6 kali lebih besar dari transaksi lain pada waktu itu. Pedagang itu tampaknya mendapat keuntungan besar. Tidak biasa,” tulis Murphy.

Ia kemudian menambahkan dengan nada penuh kecurigaan.

“1,5 Miliar Dolar. Biarkan saya mengatakannya lagi, taruhan 1,5 Miliar Dolar. Siapa itu? Trump? Anggota keluarga? Staf Gedung Putih? Ini adalah korupsi. Korupsi yang

mencengangkan,” tambahnya.

Gelombang di Dunia Kripto

Namun yang terjadi di pasar tradisional minyak dan saham baru lah permulaan. Di dunia yang lebih tersembunyi, platform prediksi berbasis kripto seperti Polymarket dan Kalshi, gejala serupa juga terjadi, bahkan dengan pola yang lebih terstruktur dan mencurigakan.

Polymarket, platform yang memungkinkan penggunanya memasang taruhan pada berbagai peristiwa dunia menggunakan mata uang kripto, telah menjadi barometer alternatif bagi sentimen geopolitik. Pada akhir Februari 2026, tepat sebelum Amerika Serikat melancarkan

serangan militer terhadap Iran, platform ini mencatat lonjakan taruhan yang tidak biasa. Enam akun yang diduga kuat saling terkait memasang taruhan besar bahwa serangan akan terjadi. Taruhan tersebut terbukti tepat, dan keenam akun itu meraup keuntungan sekitar 1,2 juta dolar AS atau setara dengan Rp19,5 miliar.

Perusahaan analitik kripto Bubblemaps melacak pola transaksi ini dan menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. “Akun-akun ini sebagian besar memasang taruhan dalam 24 jam terakhir, secara spesifik menargetkan taruhan untuk 28 Februari, dan memasang taruhan ‘ya’ beberapa jam sebelum serangan terjadi,” demikian laporan Bubblemaps

**Nicolas Vaiman**

yang dikutip oleh berbagai media.

CEO Bubblemaps, Nicolas Vaiman, menjelaskan kepada Bloomberg bahwa fenomena ini mencerminkan celah struktural yang serius.

“Pasar prediksi adalah salah satu produk pertama yang memungkinkan taruhan langsung pada peristiwa geopolitik. Dalam kasus perang atau konflik, informasi terkait bisa beredar di lingkaran kecil sebelum diumumkan ke publik. Ditambah lagi, platform seperti Polymarket biasanya hanya membutuhkan akun kripto untuk bertransaksi, yang menawarkan anonimitas tinggi. Ini bisa mendorong pihak yang memiliki informasi dalam untuk bertindak lebih awal,” tuturnya seperti dikutip Bloomberg.

Senator Chris Murphy, yang sama-sama menyoroiti kasus ini, menyatakan kemarahannya dalam pernyataan yang keras.

“Ini gila kalau ini legal. Orang-orang di sekitar Trump mengambil untung dari perang dan kematian. Aku akan segera mengajukan undang-undang untuk melarang ini,” katanya.

Namun yang terjadi pada Maret 2026 jauh lebih sistematis daripada kasus akhir Februari. Setelah Trump mengumumkan “pembicaraan produktif” dengan Iran pada 23 Maret, para analis kembali mendeteksi pola

**Chris Murphy**

yang sama.

Sepuluh akun baru di Polymarket secara kolektif memasang taruhan sekitar 160.000 dolar AS bahwa gencatan senjata akan tercapai pada 31 Maret atau 15 April 2026. Jika taruhan itu terbukti benar, potensi keuntungan mereka bisa melampaui 1 juta dolar AS. Setelah pengumuman Trump, posisi taruhan tersebut langsung menunjukkan keuntungan belum terealisasi lebih dari 300.000 dolar AS.

Satu akun bernama “Nothineverfrickinghappens” menjadi pusat perhatian. Akun yang baru dibuat pada akhir Februari 2026 ini pertama kali muncul dengan memasang taruhan bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan militer terhadap Iran pada akhir Februari hingga awal Maret.

Taruhan itu sukses besar, menghasilkan lebih dari 85.000 dolar AS. Kini, akun yang sama kembali muncul dengan taruhan pada skenario sebaliknya: bahwa perang akan segera berakhir.

Pola ini tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan semata. Para analis mulai berbicara tentang kemungkinan adanya “insider” yang memiliki akses ke informasi sensitif dari dalam pemerintahan. Seperti yang dilaporkan The New Yorker,

berdasarkan temuan perusahaan analitik kripto, taruhan-taruhan ini kemungkinan besar berasal dari pihak yang bertindak berdasarkan informasi rahasia (classified information).

Platform Polymarket sendiri akhirnya bereaksi. Pada 23 Maret 2026, perusahaan mengumumkan pembaruan aturan internal yang secara tegas melarang penggunaan informasi rahasia atau ilegal untuk bertransaksi. Mereka juga membatasi pengguna yang memiliki kemampuan memengaruhi hasil suatu peristiwa untuk tidak dapat memasang taruhan. Neal Kumar, petugas hukum Polymarket, menyatakan bahwa pasar bergantung pada transparansi dan aturan baru ini akan memperkuat mekanisme kepatuhan platform.

Langkah serupa juga diambil oleh Kalshi, pesaing Polymarket. Platform ini bahkan telah memblokir dua akun yang terbukti terlibat dalam insider trading dan untuk pertama kalinya mempublikasikan temuan investigasi mereka. Namun langkah-langkah ini terasa seperti menutup pintu kandang setelah kuda-kuda terlanjur berlari. Keuntungan telah dikantongi, dan identitas para pelaku tetap tersembunyi di balik anonimitas blockchain.

Babak Ketiga: Bisnis Keluarga dan Dron yang Mengincar Kontrak Pentagon

Skandal insider trading di pasar minyak dan platform prediksi hanyalah bagian paling kasat mata dari fenomena yang lebih besar. Di balik layar, jaringan kepentingan bisnis keluarga Trump mulai terpapar, memperkuat kecurigaan bahwa konflik di Timur Tengah tidak semata-mata didorong oleh kepentingan nasional Amerika Serikat.



Zach Witkoff

The Wall Street Journal melaporkan sebuah eksklusif yang mengejutkan: putra-putra Donald Trump, Eric Trump dan Donald Trump Jr., mendukung pendirian perusahaan drone yang menargetkan penjualan ke Pentagon. Perusahaan ini berencana memproduksi 10.000 drone per bulan, membidik pangsa dari 1,1 miliar dolar AS yang telah dikomitmenkan Departemen Pertahanan untuk dibelanjakan pada drone buatan Amerika Serikat hingga tahun 2027.

Ini bukan pertama kalinya bisnis keluarga Trump bersinggungan dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Trump sendiri. Pada masa kepresidenan sebelumnya, berbagai konflik kepentingan muncul ketika keluarga Trump tetap menjalankan bisnis internasional mereka sambil memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Namun kasus ini berbeda karena terjadi di tengah konflik aktif yang melibatkan keputusan-keputusan presiden yang secara langsung memengaruhi prospek bisnis tersebut.

Yang lebih dekat dengan kronologi Maret 2026 adalah laporan tentang Zachary Witkoff, putra dari Steve Witkoff, salah satu penasihat terdekat Trump. Zachary adalah CEO World Liberty Financial, platform kripto yang



Bilal Bin Saqib

ikut didirikan oleh Donald Trump sendiri.

Pada Januari 2026, Zachary Witkoff melakukan kunjungan kenegaraan yang tidak biasa ke Islamabad, Pakistan. Ia diterima oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan bahkan oleh Panglima Militer Pakistan, Jenderal Asim Munir—figur yang disebut lebih berkuasa dari perdana menteri itu sendiri.

Kunjungan itu bukan sekadar kunjungan bisnis biasa. Kehadiran Zachary Witkoff di Islamabad bertepatan dengan upaya Pakistan menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan kemudian menyampaikan rencana aksi 15 poin kepada pemerintahan Trump, dan Islamabad disebut-sebut sebagai lokasi potensial untuk pembicaraan sebelum tenggat waktu 6 April yang diberikan Trump kepada Iran.

Bilal Bin Saqib, seorang pejabat Pakistan yang saat itu menjabat Ketua Otoritas Regulasi Aset Virtual Pakistan, memainkan peran penting dalam hubungan ini. Saqib adalah penasihat World Liberty Financial sebelum ia memasuki pemerintahan Pakistan. Ia secara terbuka mengakui bahwa hubungan dengan World Liberty Financial membantu “menempatkan Pakistan di peta” dan membuka pintu-



Michael Kugelman

pintu diplomasi yang sebelumnya tertutup.

Michael Kugelman, peneliti senior di Atlantic Council yang berbasis di Washington DC, memberikan analisis yang tajam.

“Mengingat betapa pentingnya koneksi personal dalam proses kebijakan Gedung Putih Trump, Pakistan mungkin telah membeli pengaruh di Gedung Putih yang menguntungkan mereka ketika mereka menawarkan diri sebagai mediator. Dengan pemerintahan yang tidak konvensional ini, faktor-faktor tidak konvensional dapat membantu tujuan Anda—dan itulah yang terjadi dengan kripto,” kata Kugelman.

Gedung Putih membantah adanya konflik kepentingan. Anna Kelly, wakil sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan Pakistan dalam sejumlah topik yang menjadi kepentingan bersama, termasuk energi, mineral kritis, dan kontraterorisme. Menanggapi pertanyaan tentang adopsi kripto oleh Pakistan dan hubungan dengan World Liberty Financial, Kelly mengatakan tidak ada konflik kepentingan.

“Trump hanya bertindak demi ‘kepentingan terbaik rakyat Amerika’ dan asetnya berada dalam kepercayaan



yang dikelola oleh anak-anaknya,” tegasnya.

Namun bagi kritikus, argumen ini tidak cukup meyakinkan. Senator Chris Murphy dan anggota Kongres lainnya telah mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) untuk membuka investigasi formal. Pada minggu yang sama, Murphy bersama dengan Perwakilan AS Greg Casar (D-Texas) memperkenalkan undang-undang yang akan melarang pasar prediksi pada tindakan pemerintah, terorisme, perang, pembunuhan, dan peristiwa di mana seseorang mengetahui atau mengendalikan hasilnya.

Bantahan Gedung Putih dan Efek Trump yang “Diperhitungkan”

Menghadapi gelombang kritik yang terus membesar, Gedung Putih mengambil sikap defensif namun tegas. Pada 24 Maret 2026, sehari setelah transaksi mencurigakan itu terjadi, juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengeluarkan pernyataan resmi.

“Gedung Putih tidak mentolerir pejabat pemerintahan mana pun yang mengambil keuntungan ilegal dari informasi orang dalam,” demikian bunyi pernyataan Desai. “Klaim apa pun tanpa bukti yang menyiratkan bahwa pejabat terlibat dalam kegiatan

semacam itu adalah pelaporan yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab,” ujar Jubir Gedung Putih, Kush Desai.

Bantahan ini disampaikan dengan nada yang sama seperti respons Gedung Putih terhadap skandal-skandal sebelumnya. Namun seperti yang dicatat oleh Financial Times dan International Financial News, ini bukan pertama kalinya pasar mencatat transaksi mencurigakan menjelang pengumuman penting dari Trump.

Dalam pernyataannya yang lebih rinci, Desai menambahkan bahwa “Trump hanya bertindak demi kepentingan terbaik rakyat Amerika



Tom Garretson

dan asetnya berada dalam kepercayaan yang dikelola oleh anak-anaknya.” Pernyataan ini tampaknya berusaha menciptakan jarak antara kebijakan presiden dan kepentingan bisnis keluarganya—sebuah distingsi yang menurut para kritikus semakin kabur.

Di luar perdebatan tentang ada atau tidaknya insider trading, fenomena yang lebih besar sedang terjadi di pasar keuangan global. Para investor telah mengembangkan semacam “model” untuk membaca perilaku Trump. Mereka menyebutnya sebagai “TACO trade”, akronim dari “Trump Always Chickens Out” atau “Trump Selalu Mengundurkan Diri”.

Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa meskipun Trump sering membuat pernyataan agresif yang mengguncang pasar, pada akhirnya ia akan mundur ketika tekanan ekonomi menjadi terlalu besar. Hasilnya: harga aset awalnya jatuh karena ketakutan, lalu melonjak ketika Trump membatalkan atau menunda kebijakannya.

Dalam konteks perang Iran, pola ini kembali terlihat. Pernyataan Trump tentang “pembicaraan produktif” pada 23 Maret terjadi hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan menghancurkan infrastruktur energi

Iran. Pergantian sikap yang dramatis ini, dari ancaman perang total ke janji perdamaian dalam hitungan hari adalah contoh sempurna dari pola yang telah dipelajari para investor.

Tom Garretson, manajer portofolio senior di RBC Wealth Management, menjelaskan dinamika ini. Menurutnya, Donald Trump jelas-jelas berusaha keras untuk menekan harga minyak.

BCA Research, firma riset investasi global, bahkan lebih blak-blakan. Marco Papic, kepala strategi di BCA, mengatakan jika ini tidak selesai dalam 7 hingga 10 hari ke depan, dunia akan menghadapi penghentian besar-besaran ekonomi global.

Namun, ada yang berbeda dalam konflik Iran dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Marko Kolanovic, mantan kepala analis kuantitatif JPMorgan yang kini menjadi kritikus pasar, memperingatkan bahwa “TACO trade” mungkin tidak bekerja dalam perang.

“Tarif adalah kebijakan administratif yang bisa dibalikkan dengan satu cuitan. Tapi perang, setelah dimulai, memiliki momentumnya sendiri, melibatkan banyak kekuatan kuat di luar kendali satu pemimpin mana pun secara real-time,” tuturnya.

Peringatan Kolanovic ini penting karena menyentuh inti perbedaan antara krisis dagang dan konflik militer. Dalam perang, ada aktor lain yang memiliki kepentingan dan kemampuan untuk bertindak secara independen dari kehendak presiden Amerika Serikat. Iran, dengan sekutu-sekutunya di kawasan, bukanlah pihak yang bisa ditekan semudah mitra dagang dalam negosiasi tariff.

Jordan Rochester, ahli strategi di Mizuho Bank, menangkap kebingungan pasar dengan tepat

dalam catatannya.

“Bagian tersulit bukanlah memprediksi perang, tetapi memprediksi bagaimana Gedung Putih akan bersuara. Kita menghadapi pasar yang bingung, tidak yakin apakah ini sinyal kredibel bahwa akhir sudah dekat, atau ini sekadar momen ‘sangat lengkap, hampir pasti’ lainnya,” tulis Jordan dalam catatan tersebut.

Dalam melaporkan skandal yang melibatkan figur setinggi presiden, jurnalisme yang bertanggung jawab menuntut keseimbangan antara menyampaikan fakta dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Tuduhan insider trading terhadap Trump dan lingkaran dalamnya didasarkan pada fakta-fakta yang kuat namun belum sepenuhnya terbukti.

Pertama, fakta tentang transaksi mencurigakan tidak dapat disangkal. Data Bloomberg dan laporan Financial Times secara jelas menunjukkan lonjakan volume transaksi yang tidak normal pada 23 Maret 2026, tepat 15 menit sebelum pengumuman Trump. Nilai 5,8 miliar dolar AS dalam satu menit pada jam-jam awal perdagangan adalah anomali statistik yang signifikan. Demikian pula dengan pola taruhan di Polymarket yang melibatkan akun-akun baru yang secara konsisten tepat memprediksi arah kebijakan.

Kedua, fakta tentang hubungan antara bisnis keluarga Trump dan kebijakan luar negeri juga terdokumentasi dengan baik. Laporan Wall Street Journal tentang dukungan putra-putra Trump terhadap perusahaan drone yang membidik kontrak Pentagon, serta hubungan erat antara World Liberty Financial (yang ikut didirikan Trump) dengan upaya diplomasi Pakistan, menciptakan gambaran tentang tumpang tindih kepentingan yang sulit diabaikan.

Ketiga, belum ada bukti langsung yang menghubungkan transaksi mencurigakan itu dengan Trump, keluarganya, atau pejabat pemerintahannya. Anonimitas yang ditawarkan oleh pasar futures dan platform kripto membuat identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Gedung Putih secara konsisten membantah adanya keterlibatan dan menekankan bahwa aset presiden dikelola dalam kepercayaan yang terpisah.

Keempat, respons pasar terhadap pernyataan Trump mengikuti pola yang telah dikenali investor sebagai “TACO trade”. Ini berarti bahwa setidaknya sebagian dari pergerakan harga mungkin disebabkan oleh perdagangan spekulatif berdasarkan model yang sudah mapan, bukan berdasarkan informasi orang dalam.

Namun polainisendirimenimbulkan pertanyaan etis: apakah seorang presiden seharusnya menciptakan situasi di mana para spekulasi dapat secara konsisten menghasilkan uang dengan memprediksi pembalikan kebijakannya?

Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menekankan bahwa tanpa bukti, tuduhan tidak berdasar. Di sisi lain, Senator Murphy dan anggota Kongres lainnya berargumen bahwa pola transaksi yang begitu konsisten dan menguntungkan tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Mereka mendesak SEC untuk membuka investigasi formal.

Yang jelas, skandal ini telah meninggalkan luka pada kredibilitas institusi kepresidenan Amerika Serikat di mata dunia. Pernyataan Menteri Keuangan Inggris dalam sesi parlemen, yang disampaikan oleh pemimpin Partai Liberal Demokrat Ed Davey, merangkum kekhawatiran yang meluas.



Ed Davey

“Ini terlihat seperti Donald Trump memberikan informasi orang dalam kepada teman-temannya sehingga mereka bisa memperkaya diri, sementara perang ilegalnya di Iran membuat semua orang lain menjadi lebih miskin. Ini terlihat seperti korupsi tingkat terburuk,” ujar Ed Davey.

Ketika Perang Menjadi Ladang Bisnis

Skandal insider trading yang melibatkan lingkaran dalam Presiden Trump bukan sekadar kisah tentang transaksi mencurigakan di pasar keuangan. Ia adalah cermin dari persoalan struktural yang lebih dalam, bagaimana konflik bersenjata yang seharusnya menjadi urusan publik, menyangkut nyawa manusia dan nasib bangsa, dapat berubah menjadi ladang bisnis pribadi bagi segelintir orang yang memiliki akses istimewa.

Data dan fakta yang terungkap hingga saat ini menunjukkan adanya anomali pasar yang terlalu signifikan untuk diabaikan. Transaksi 5,8 miliar dolar AS dalam satu menit, taruhan terkoordinasi di platform kripto yang secara konsisten tepat, dan jaringan bisnis keluarga yang bersinggungan langsung dengan kebijakan luar negeri, semua ini membentuk pola yang tidak

bisa dengan mudah dijelaskan sebagai kebetulan.

Namun di tengah semua ini, ada satu hal yang sering terlupakan. Perang yang menjadi panggung dari skandal ini adalah perang sungguhan dengan korban sungguhan. Iran telah melaporkan kerusakan infrastruktur energi yang signifikan akibat serangan udara Amerika Serikat. Selat Hormuz, jalur vital pengangkutan minyak dunia, sebagian besar ditutup, mengancam pasokan energi global dan meningkatkan harga komoditas yang pada akhirnya membebani konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sementara spekulasi dan trader merayakan keuntungan mereka, masyarakat luas membayar harga yang tidak terlihat. Harga BBM naik, inflasi mengintai, dan ketidakpastian ekonomi membayangi rumah tangga di berbagai negara. Inilah ironi terbesar dari skandal ini. Perang yang diklaim untuk “kepentingan nasional” justru menjadi sumber kekayaan bagi segelintir orang, sementara beban ekonominya ditanggung oleh rakyat banyak.

Pertanyaan yang tersisa kini adalah apakah sistem hukum dan regulasi di Amerika Serikat akan mampu menjawab tantangan ini. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) belum menyatakan akan membuka investigasi formal.

Kongres baru mengajukan rancangan undang-undang yang belum tentu disahkan. Dan di tengah semua itu, pemilihan umum paruh waktu di Amerika Serikat yang akan datang akan menjadi ujian apakah skandal ini cukup signifikan untuk memengaruhi pilihan politik rakyat Amerika.



KETIKA SELAT HORMUZ JADI ANCAMAN BAGI SELURUH DUNIA

Selat Hormuz, jalur air sempit sepanjang 167 kilometer yang memisahkan Iran dari Oman, pernah menjadi sekadar garis biru pada peta dunia. Namun sejak 28 Februari 2026, hari ketika rudal pertama menghantam sasaran di wilayah Iran dalam konflik terbuka dengan Amerika Serikat dan Israel, selat itu berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar jalur pelayaran. Ia menjadi senjata yang mampu mengancam elit global.

Dalam satu bulan terakhir, dunia menyaksikan transformasi dramatis sebuah perairan internasional menjadi alat pemeras ekonomi. Iran, yang secara militer berada dalam posisi inferior menghadapi kekuatan gabungan AS dan Israel, memilih jalur yang berbeda. Mereka tidak hanya menutup Selat Hormuz, namun dibarengi dengan strategi memasang tariff yang jumlahnya tidak main-main, dua juta dolar Amerika Serikat per kapal. Sekitar Rp34 miliar untuk sekali

melintas.

Keputusan ini mengguncang fondasi ekonomi global. Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Seperlima hingga seperempat pasokan minyak mentah global, sekitar 20 juta barel per hari, biasanya melewati celah sempit ini. Ketika aliran itu terhenti, harga minyak melonjak. Inflasi mengintai. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berada di barisan terdepan yang merasakan getarannya.

Konflik antara Amerika Serikat dan

Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 tidak berlangsung sesuai prediksi banyak pengamat. Secara militer, AS dan Israel memiliki keunggulan yang tak terbantahkan. Jet-jet tempur canggih, rudal presisi, dan kekuatan angkatan laut yang dominan di kawasan Teluk Persia seharusnya membuat Iran terdesak dalam hitungan hari.

Namun Iran memiliki senjata yang tidak dapat dihancurkan oleh bom apa pun: posisi geografis. Selat Hormuz terletak sepenuhnya dalam jangkauan artileri, rudal, dan kapal cepat Iran. Di ujung timur selat ini, Semenanjung Musandam milik Oman menjorok ke arah Iran, menciptakan koridor sempit dengan lebar hanya 39 kilometer di titik tersempitnya. Kapal tanker raksasa yang melintas di sini bergerak dalam jalur yang telah ditentukan dan Iran dapat mengawasi setiap gerakannya.

Saat perang pecah, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) segera menyatakan Selat Hormuz ditutup. Peringatan dikeluarkan: setiap kapal yang mencoba melintas akan diserang. Dalam hitungan hari, lalu lintas di selat itu runtuh drastis. Menurut laporan Bloomberg yang dikutip berbagai media, hampir 2.000 kapal kini tertahan di sekitar selat sempit tersebut, tidak berani bergerak maju atau mundur.

Namun yang mengejutkan dunia adalah langkah selanjutnya Iran. Setelah menutup selat, mereka membukanya kembali tetapi dengan syarat. Kapal-kapal yang ingin melintas harus membayar.

Seorang pejabat Iran, berbicara kepada Al Jazeera pada akhir Maret 2026, membela kebijakan ini dengan argumen yang terkesan pragmatis.

“Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk memastikan

keamanan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” ujarnya.

“Hal ini sepenuhnya wajar. Sama seperti di koridor lain, ketika barang melewati suatu negara, bea masuk dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami memastikan keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea masuk kepada kami,” ujar Pejabat Iran yang tidak diketahui namanya tersebut seperti yang dikutip oleh Al Jazeera.

Argumentasi ini, meskipun diragukan legitimasinya menurut hukum laut internasional, menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Iran tidak lagi sekadar mengancam akan menutup selat. Mereka justru membukanya dengan harga. Dengan kata lain, mereka mengubah blokade menjadi bisnis.

Mekanisme pembayaran ini masih diwarnai ketidakjelasan. Bloomberg melaporkan bahwa tarif diterapkan secara selektif dan belum ada regulasi formal yang mengaturnya. Beberapa kapal dilaporkan telah membayar,

namun metode pembayaran apakah tunai, transfer bank, atau melalui mata uang kripto, tidak diungkapkan secara rinci. Yang jelas, kebijakan ini menciptakan ketidakpastian luar biasa bagi industri pelayaran global.

Data dari International Energy Agency (IEA) menggambarkan skala bencana yang terjadi. Dalam laporan Maret 2026, IEA menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Sebelum konflik, sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk olahan melintasi selat setiap hari. Setelah penutupan, volume yang berhasil melewati selat hanya sepersekian dari angka tersebut.

Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, dua produsen minyak terbesar di kawasan Teluk, telah mengaktifkan jalur pipa alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Pipa-pipa ini mengalirkan minyak mentah dari ladang-ladang di timur Arab Saudi ke pelabuhan di Laut Merah dan Teluk Oman. Namun kapasitas



gabungan pipa-pipa ini hanya sekitar sembilan juta barel per hari, kurang dari setengah volume normal yang melintasi Hormuz.

Lebih penting lagi, pipa-pipa ini hanya mengangkut minyak mentah, bukan bahan bakar olahan, gas alam cair (LNG), atau bahan baku pupuk yang juga menjadi komoditas vital yang biasanya melewati selat.

Akibatnya, produsen minyak Teluk terpaksa memangkas produksi. Dengan tempat penyimpanan di darat (on-shore storage) yang terus terisi dan tidak ada kapal yang berani mengambil risiko melintasi Hormuz, produksi minyak mentah di kawasan Teluk turun setidaknya 10 juta barel per hari. Angka ini lebih besar dari

gabungan dua krisis minyak 1970-an yang masing-masing mencapai sekitar 5 juta barel per hari.

Harga Melonjak, Ekonomi Dunia Tertekan

Dampak dari penutupan Selat Hormuz terhadap harga minyak dunia tidak butuh waktu lama untuk terasa. Sehari sebelum perang pecah, 27 Februari 2026, harga minyak mentah Brent masih berada di level 72,48 dolar AS per barel.

Ketika konflik dimulai keesokan harinya, harga langsung melesat. Dalam sepuluh hari pertama perang, Brent sempat menyentuh 108,23 dolar AS per barel.

Memasuki akhir Maret 2026, situasi

tidak kunjung mereda. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan selama lima hari pada 23 Maret untuk memberi ruang diplomasi, Iran menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan mengalah. Pada pekan terakhir Maret, harga minyak mentah Brent ditutup pada 112,57 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 2022 dan naik 86 persen dibandingkan awal tahun.

Fluktuasi harga ini mencerminkan kebingungan pasar dalam membaca sinyal dari Gedung Putih. Trump memberikan pernyataan yang kerap berubah-ubah. Ia memberi Iran tenggat waktu 48 jam untuk membuka kembali Hormuz, lalu



memperpanjangnya menjadi lima hari, lalu sepuluh hari. Ia mengatakan perang telah dimenangkan.

Iran membantah. Ia mengklaim pembicaraan dengan Iran berjalan sangat baik. Teheran menyatakan tidak ada negosiasi dengan musuh.

Akibat dari kebingungan ini, pasar keuangan global ikut terombang-ambing. Indeks saham di Amerika Serikat dan kawasan Asia memasuki zona koreksi—definisi teknis untuk penurunan 10 persen atau lebih dari puncak terbaru. Dow Jones Industrial Average turun 1,7 persen dalam sepekan terakhir Maret. Nasdaq merosot 2,2 persen. S&P 500 mencatat pelemahan mingguan kelima berturut-turut.

Di Asia Tenggara, dampaknya tak kalah terasa. Filipina, salah satu negara yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi, mencatat indeks saham utamanya, PSEi, turun lebih dari sembilan persen dibandingkan level sebelum perang. Peso Filipina menyentuh rekor terendah baru terhadap dolar AS. Pemerintah Filipina merespons dengan memberikan kewenangan darurat kepada presiden untuk menangguk pajak cukai bahan bakar ketika harga minyak Dubai melebihi 80 dolar AS per barel.

Thailand, negara tetangga yang juga sangat bergantung pada impor energi, mengambil langkah serupa. Pemerintah Thailand memperpanjang pemotongan pajak cukai solar dan mengurus dana minyak nasional untuk menjaga harga eceran solar di bawah 33 baht per liter. Tanpa subsidi ini, biaya logistik di Thailand dipastikan melonjak dan memicu kenaikan harga pangan secara massif.

Vietnam, yang memiliki dua kilang minyak domestik, memaksa keduanya beroperasi di atas kapasitas



normal, lebih dari 110 persen, untuk menambal celah impor yang hilang akibat penutupan Hormuz. Langkah ini menunjukkan tingkat kepanikan yang melanda negara-negara pengimpor energi di kawasan.

Di India, Perdana Menteri Narendra Modi melakukan pembicaraan telepon dengan Trump dan menekankan pentingnya kebebasan navigasi. India, yang berhasil meloloskan empat kapal berbendera nasionalnya melalui Hormuz pada minggu ketiga Maret, menyatakan bahwa hukum internasional menjamin kebebasan berlayar dan melarang pemungutan biaya sepihak seperti yang dilakukan Iran.

Sri Lanka, yang baru saja mulai pulih dari krisis ekonomi yang melumpuhkan negara itu pada tahun-tahun sebelumnya, terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 25 persen pada 22 Maret 2026. Pemerintah Kolombo bahkan memberlakukan kebijakan empat hari kerja per pekan untuk membatasi mobilitas warga dan menghemat stok bahan bakar yang kian menipis.

Bahkan Amerika Serikat, yang secara energi relatif mandiri berkat revolusi shale oil, tidak luput dari dampak. Harga bensin di Negeri Paman Sam melonjak lebih dari 30 persen dalam satu bulan terakhir. Kenaikan ini menjadi isu politik yang sensitif bagi pemerintahan Trump di tengah tekanan inflasi yang sudah ada sebelumnya.

Indonesia: Kapal Tertahan, BUMN Tertekan

Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, berada dalam posisi yang rentan dalam krisis ini. Dampaknya terasa langsung dan berlapis.

Pertama, dari sisi pasokan. Dua kapal tanker milik Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro, tertahan di perairan Teluk Persia akibat penutupan Selat Hormuz. Pejabat Sementara Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita, menjelaskan bahwa persiapan teknis sedang dilakukan untuk memastikan kedua kapal dapat melintasi selat dengan



Suyono Saputra

aman. Pertamina berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas teknis perlintasan.

Hingga akhir Maret 2026, kedua kapal tersebut belum juga bergerak. Pihak Pertamina menyebut kondisi ini berkaitan dengan penyiapan jalur aman perjalanan saat melintasi kawasan Hormuz.

Sementara itu, pemerintah Iran terus membahas kemungkinan pemberlakuan biaya tol secara resmi melalui undang-undang yang sedang diproses di parlemen.

Kedua, dari sisi harga. Lonjakan harga minyak mentah global langsung berdampak pada biaya impor energi. Badan Pusat Statistik belum merilis data inflasi terkini, namun para ekonom memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Studi dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) yang dirilis pada 28 Maret 2026 memberikan gambaran detail tentang tekanan yang dihadapi BUMN Indonesia.

Studi yang bertajuk “Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026” ini menemukan bahwa dampak krisis tidak merata di antara BUMN.

Kelompok yang paling tertekan adalah perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, nilai tukar, serta bahan baku dari luar negeri.

Pertamina, misalnya, menghadapi beban impor minyak yang sangat besar di tengah lonjakan harga global. Setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berarti tambahan beban miliaran rupiah bagi perusahaan pelat merah ini. PLN juga berada dalam tekanan serupa, karena kontrak pembelian listrik banyak yang menggunakan denominasi dolar AS. Kesenjangan antara biaya pokok produksi dan tarif jual listrik yang selama ini sudah ada semakin melebar.

Sektor transportasi juga ikut terdampak. Garuda Indonesia, maskapai nasional yang sedang dalam proses restrukturisasi, kembali mengalami tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga avtur. Avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional maskapai penerbangan. ASDP, yang mengelola pelabuhan penyeberangan, juga merasakan tekanan melalui kenaikan harga aspal dan bahan baku konstruksi lainnya.

Kelompok BUMN lain yang terdampak adalah Pupuk Indonesia. Gangguan rantai pasok di Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada minyak mentah, tetapi juga pada bahan baku pupuk yang sebagian masih diimpor. Keterlambatan pasokan berpotensi mengganggu produksi pupuk dalam negeri, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sektor pertanian.

Namun studi LM FEB UI juga menemukan fenomena menarik. Ternyata tidak semua BUMN terdampak negatif. Perusahaan yang bergerak di sektor komoditas ekspor justru memperoleh keuntungan

dari lonjakan harga energi global. Bukit Asam, perusahaan batu bara, menikmati kenaikan harga batu bara sebagai substitusi energi. Sektor kelapa sawit juga mendapatkan windfall profit karena biodiesel berbasis CPO menjadi lebih kompetitif ketika harga minyak mentah mahal.

Perusahaan tambang lainnya seperti Freeport Indonesia dan holding industri pertambangan MIND ID juga diuntungkan dari kenaikan harga mineral seperti tembaga dan emas yang ikut terdongkrak oleh gejolak pasar.

Toto Pranoto, Managing Partner BRG LM FEB UI, menjelaskan bahwa pola asimetris ini sebenarnya menciptakan potensi natural hedge dalam portofolio BUMN yang dikelola Danantara. Keuntungan dari satu kelompok BUMN dapat membantu mengimbangi tekanan pada kelompok lain. Namun potensi ini belum dapat dioptimalkan karena mekanisme koordinasi lintas BUMN masih terbatas.

“Potensi natural hedge ini ada, tetapi belum sepenuhnya terkelola karena mekanisme alokasi dan koordinasi lintas BUMN masih terbatas,” ujar Toto dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu, 28 Maret 2026.

Dari sisi APBN, lonjakan harga minyak juga menciptakan tekanan. APBN 2026 menggunakan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel. Ketika harga melonjak hingga di atas 90 dolar AS, apalagi menyentuh 112 dolar AS seperti kondisi terkini, beban subsidi dan kompensasi energi meningkat secara signifikan. Pemerintah harus memutar otak untuk menjaga defisit APBN tetap dalam batas yang telah ditetapkan.

Ketiga, dari sisi industri manufaktur dan logistik. Dampak krisis Hormuz tidak hanya dirasakan di Jakarta,



Toto Pranoto

tetapi juga di daerah-daerah industri seperti Batam. Batam, sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan internasional, mulai merasakan getaran krisis ini.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam, Suyono Saputra, mengungkapkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menekan ekonomi Batam dalam jangka pendek. Kenaikan harga energi dan biaya logistik global menjadi ancaman utama bagi daya saing industri di daerah tersebut.

“Batam akan terdampak dari shock energi dan kenaikan biaya logistik global. Ini bisa terjadi jika ketegangan di Selat Hormuz berkepanjangan hingga mendorong harga minyak menembus 150 dolar AS per barel,” ujar Suyono pada Jumat, 27 Maret 2026.

Kenaikan harga minyak berdampak langsung pada biaya operasional industri. Tarif listrik, bahan bakar minyak, serta ongkos transportasi berpotensi meningkat. Bagi sektor manufaktur yang bergantung pada efisiensi biaya produksi, tekanan ini sangat signifikan.

Selain itu, biaya logistik internasional juga naik akibat penyesuaian fuel surcharge dan premi risiko perang (war

risk premium). Kondisi ini berisiko menggerus margin industri sekaligus mengganggu rantai pasok global. Jika jalur pelayaran terganggu, traffic kapal bisa menurun dan lead time impor bahan baku menjadi lebih lama.

Keterlambatan pasokan berpotensi memicu kelangkaan bahan baku, terutama pada sektor elektronik dan galangan kapal yang sangat bergantung pada impor. Indikasi awal dampak ini mulai terlihat. Operator feri rute Singapura–Batam telah memberlakukan tambahan biaya sebesar 6 dolar AS per penumpang.

Meskipun Batam tidak berada di jalur langsung Selat Hormuz, keterkaitan ekonomi global membuat kawasan ini tetap terdampak secara tidak langsung. Sekitar 20 hingga 25 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Gangguan di sana akan meningkatkan biaya bahan bakar kapal, premi asuransi, dan memaksa pengalihan rute pelayaran. Pada akhirnya, ongkos ekspor-impor naik dan daya saing produk industri Batam di pasar global menurun.

Menghadapi krisis yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, Indonesia dan negara-negara lain harus mencari jalan keluar. Studi LM FEB UI memberikan sejumlah rekomendasi langkah mitigasi yang terbagi dalam tiga jangka waktu.

Dalam jangka pendek (0–6 bulan), studi ini merekomendasikan empat langkah utama. Pertama, diversifikasi sumber pasokan minyak mentah secara bertahap dengan memperhatikan kompatibilitas teknis kilang domestik. Kedua, peningkatan kapasitas cadangan BBM melalui kerja sama bilateral cadangan darurat. Ketiga, pengembangan kapasitas lindung nilai (hedging) harga komoditas energi. Keempat,



Abbas Araghchi

pembentukan mekanisme alokasi sumber daya di tingkat Danantara.

Untuk jangka menengah (6–36 bulan), rekomendasi meliputi pembangunan cadangan minyak strategis secara bertahap, reformasi mekanisme harga BBM yang lebih responsif terhadap kondisi pasar, percepatan penyelesaian proyek kilang domestik, serta penguatan manajemen risiko valuta asing bagi PLN.

Secara lintas sektoral, studi ini juga mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh Danantara. Dana ini berfungsi sebagai penyangga untuk menampung penerimaan saat harga komoditas tinggi dan digunakan ketika terjadi krisis. Pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN juga menjadi rekomendasi penting.

“Penguatan koordinasi di tingkat holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci agar BUMN lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global,” ujar Toto Pranoto.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah mempersiapkan 13 proyek tambahan hilirisasi energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan



Bahlil Lahadalia

untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik, termasuk etanol dan biodiesel dari CPO.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” kata Bahlil dalam pernyataannya.

Langkah-langkah ini menunjukkan arah kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi. Namun dalam jangka pendek, tantangan tetap besar. Harga minyak yang masih tinggi dan ketidakpastian geopolitik yang belum reda akan terus membayangi perekonomian nasional.

Di tingkat global, upaya diplomasi terus dilakukan. Trump telah dua kali memperpanjang tenggat waktu ultimatumnya kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, dengan tenggat waktu terakhir 6 April 2026. Namun pernyataan Trump bahwa pembicaraan dengan Iran berjalan sangat baik dibantah langsung oleh Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan musuh.

Sementara itu, Iran sendiri terus memperkuat posisinya. Selain kebijakan tarif yang sedang diformalkan melalui undang-undang, parlemen Iran sedang mengupayakan pengesahan aturan yang memungkinkan penarikan biaya tol secara permanen bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Jika aturan

ini disahkan, maka kebijakan yang semula bersifat ad hoc dan selektif akan menjadi kebijakan permanen yang mengubah status Selat Hormuz dari jalur internasional bebas menjadi jalur berbayar di bawah kendali Iran.

Selat Hormuz, yang selama puluhan tahun menjadi jalur vital perdagangan energi dunia, kini telah berubah menjadi senjata. Iran, dengan segala keterbatasan militernya, menemukan cara untuk memanfaatkan posisi geografisnya sebagai alat untuk menekan lawan-lawan politiknya sekaligus mengisi kas negara. Kebijakan tarif hingga dua juta dolar AS per kapal yang diterapkan secara selektif sejak konflik pecah pada akhir Februari 2026 adalah inovasi geopolitik yang tidak terduga—namun sangat efektif.

Dampaknya sudah terasa di seluruh dunia. Harga minyak melonjak lebih dari 80 persen dalam satu bulan. Inflasi mengintai di berbagai negara. Pasar saham memasuki zona koreksi. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berada dalam posisi paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi.

Indonesia merasakan dampak ini secara langsung. Dua kapal tanker Pertamina tertahan di Teluk Persia. BUMN-BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Garuda Indonesia mengalami tekanan biaya operasional yang signifikan. Industri di Batam, dengan ketergantungannya pada rantai pasok global, mulai merasakan kenaikan biaya logistik. Studi LM FEB UI menunjukkan bahwa dampak krisis ini asimetris: beberapa BUMN tertekan, namun sebagian lain justru diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas.

DAFTAR NEGARA DAPAT IZIN MELINTASI SELAT HORMUZ

Negara-negara yang dianggap sebagai negara sahabat oleh Iran



Rusia



Tiongkok



India



Irak



Pakistan

"Kami mengizinkan pelayaran melalui Selat Hormuz bagi negara-negara sahabat termasuk China, Rusia, India, Irak, dan Pakistan."

Menteri Luar Negeri Iran
Abbas Araghchi

(diterjemahkan oleh detik.com, 26 Maret 2026)

Negara-negara yang berhasil diizinkan melintas melalui diplomasi langsung dengan Iran



Bangladesh



Thailand



Malaysia

"Sebuah kesepakatan telah tercapai untuk memungkinkan kapal-kapal tanker minyak Thailand melintas dengan aman melalui Selat Hormuz."

PM Thailand Anutin Charmvirakul
(diterjemahkan oleh detik.com, 28 Maret 2026)

"Kami sekarang dalam proses melepaskan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang."

PM Malaysia Anwar Ibrahim
(diterjemahkan oleh cnbcindonesia.com, 26 Maret 2026)

Negara dengan kemajuan positif dalam upaya diplomasi Selat Hormuz



Spanyol

"Iran menganggap Spanyol sebagai negara yang menghormati hukum internasional, sehingga menunjukkan keterbukaan terhadap setiap permintaan dari Madrid terkait Selat Hormuz"

Dubes Iran untuk Spanyol Reza Zabib
(diterjemahkan oleh kompas.com, 27 Maret 2026)



Indonesia

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,"

Jubir Kemlu RI
Yvonne Mawengkang
(via kontan.co.id)

NO KINGS: TUNTUTAN PEMAKZULAN TRUMP YANG MENGGUNCANG AMERIKA

Ribuan aksi serentak di 50 negara bagian AS diikuti jutaan warga, tuntutan pemakzulan mengemuka di tengah krisis Iran dan kebijakan imigrasi kontroversial.

Lebih dari 3.300 aksi demonstrasi serentak melanda seluruh Amerika Serikat pada 28 Maret 2026, menandai eskalasi terbesar dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Gelombang protes nasional yang bertajuk “No Kings” ini tidak hanya menuntut peninjauan ulang kebijakan imigrasi dan intervensi militer AS di Iran, tetapi juga secara terbuka menyerukan proses pemakzulan terhadap Presiden ke-45 sekaligus ke-47 Amerika Serikat tersebut.

Aksi ini diperkirakan melibatkan jutaan warga dari berbagai lapisan

masyarakat, mulai dari tokoh politik senior, aktivis HAM, hingga musisi legendaris seperti Bruce Springsteen dan Joan Baez. Demonstrasi ini menjadi ujian terbesar bagi stabilitas politik domestik AS setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025, sekaligus menjadi momentum penyatuan oposisi yang selama ini terfragmentasi.

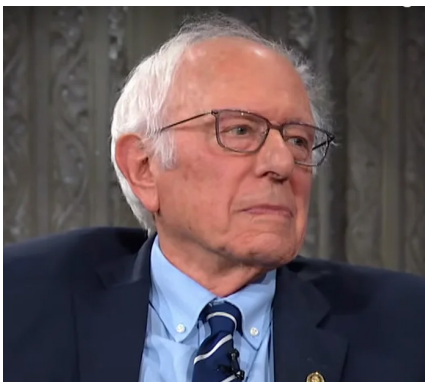
Titik Api di Minnesota: Dari Penembakan Warga hingga Panggung Perlawanan

Jika dilihat dari peta persebarannya, titik pusat gelombang protes kali ini berada di Gedung Capitol Negara



Bagian Minnesota, St. Paul. Lokasi ini dipilih bukan tanpa sebab. Bulan Januari lalu, insiden penembakan yang menewaskan dua warga Minneapolis, Renée Good dan Alex Pretti, oleh aparat Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) menjadi pemicu utama kemarahan publik yang sulit dibendung.

Kedua korban diketahui bukan imigran gelap, melainkan warga negara AS yang sedang memantau aktivitas penegakan hukum imigrasi di



Bernie Sanders

lingkungan mereka. Kematian mereka memicu gerakan perlawanan sipil yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional “No Kings”.

Dalam aksi tersebut, musisi Bruce Springsteen yang dikenal kritis terhadap kekuasaan membawakan lagu baru berjudul “Streets of Minneapolis”, yang secara spesifik mengisahkan tragedi kemanusiaan akibat kebijakan federal yang dinilai kejam.

Pawai yang dimulai pukul 12.00 waktu setempat itu berhasil memobilisasi lebih dari 100.000 orang hanya di Minnesota saja. Mereka membentuk rantai manusia mengelilingi gedung pemerintahan, sebuah simbol persatuan melawan apa yang mereka sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Senator independen Bernie Sanders, yang hadir sebagai pembicara kunci, menyatakan bahwa aksi ini



bukan sekadar tentang satu kebijakan, melainkan tentang masa depan demokrasi Amerika.

“Besok, jutaan warga Amerika akan bergabung dalam aksi “No Kings”. Kita mengatakan tidak pada otoritarianisme, tidak pada oligarki, dan tidak pada perang tanpa akhir,” ujar Sanders dalam pidatonya yang disambut riuh.

Tiga Pemicu Utama yang Menggerakkan Jutaan Massa

Di balik besarnya gelombang aksi yang tersebar dari Times Square, New York, hingga pusat kota Richmond, Virginia, terdapat tiga isu utama yang menjadi pemicu sentimen publik. Para pengunjuk rasa menilai pemerintahan Trump telah melampaui batas kewenangan konstitusional.

Pertama, kebijakan perang dengan Iran. Operasi militer yang dikenal sebagai “Operation Epic Fury” yang

melibatkan AS dan Israel dinilai publik sebagai perang agresif yang menguras anggaran negara. Para demonstran mempertanyakan mengapa miliaran dolar dialokasikan untuk konflik di luar negeri, sementara biaya hidup di dalam negeri meroket.

Di Richmond, Virginia, ribuan peserta aksi membawa bendera Iran dan Amerika secara berdampingan sebagai simbol penolakan terhadap perang.

Kedua, kewenangan eksekutif yang tak terkendali. Gerakan “No Kings” secara spesifik menargetkan apa yang mereka sebut sebagai “kekuasaan seperti raja”. Kritik ini merujuk pada perluasan kekuasaan presiden yang dianggap mengabaikan checks and balances, termasuk penggunaan pasukan Garda Nasional di dalam negeri serta upaya menuntut musuh politik. Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan “This is America, power belongs to the people, not

to wannabe kings” (Ini Amerika, kekuasaan milik rakyat, bukan milik raja-raja kecil).

Ketiga, krisis ekonomi dan biaya hidup. Di tengah inflasi yang belum mereda, banyak warga kelas menengah yang merasa terpinggirkan. Demonstrasi ini juga menjadi ajang meluapkan kekesalan terhadap kebijakan tarif dan pajak yang dianggap hanya menguntungkan kalangan oligarki. Seorang pengunjuk rasa di Richmond, Aurora Britt, menyatakan bahwa gerakan ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar.

“Saya pikir kita kehabisan alternatif. Mogok kerja umum di negara ini akan menjadi sesuatu yang revolusioner,” tegasnya.

Reaksi Dingin Gedung Putih

Skala besar aksi “No Kings” tidak lepas dari peran tokoh-tokoh publik yang turun langsung ke jalan. Kehadiran aktris sekaligus aktivis



lama Jane Fonda, yang dikenal sejak era Perang Vietnam, memberikan legitimasi antargenerasi bagi gerakan ini. Joan Baez, ikon musik folk yang juga simbol perlawanan terhadap perang, turut menyemarakkan aksi damai ini.

Namun, respons dari Gedung Putih justru menunjukkan sikap meremehkan. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, dalam pernyataannya di Washington, menyebut aksi tersebut sebagai “Trump Derangement Therapy Sessions” atau sekadar sesi terapi bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan akibat kebencian terhadap Trump.

Jackson bahkan meremehkan liputan media dengan pernyataan sarkastis, Satu-satunya pihak yang peduli dengan aksi ini adalah jurnalis yang meliputnya.

Pemerintah juga mengeklaim bahwa demonstrasi tersebut didanai oleh jaringan kelompok sayap kiri radikal dan tidak mencerminkan suara mayoritas rakyat Amerika. Meskipun demikian, data yang dihimpun dari

berbagai wilayah menunjukkan bahwa demonstrasi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles, tetapi juga menjangkau lebih dari 3.100 lokasi di wilayah suburban dan pedesaan, menjadikannya salah satu demonstrasi terkoordinasi terbesar dalam sejarah AS.

Gelombang protes ini tidak hanya bergema di dalam negeri AS. Dukungan dan aksi solidaritas juga digelar di berbagai ibu kota dunia. Di London, Paris, Lisbon, hingga Australia, warga negara Amerika yang tinggal di luar negeri (expatriates) berkumpul menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah kebijakan luar negeri Trump. Dalam demonstrasi tersebut, seruan untuk memakzulkan presiden terdengar lantang, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan stabilitas global.

Di tingkat domestik, tuntutan pemakzulan ini mengemuka seiring dengan gagalnya upaya-upaya legislatif sebelumnya untuk mengendalikan kekuasaan presiden. Meskipun Partai Demokrat saat ini tidak memiliki suara

mayoritas yang cukup di Kongres untuk memulai proses impeachment, para pengunjung rasa berharap tekanan publik yang masif dapat mendorong anggota parlemen dari Partai Republik untuk bersikap kritis terhadap presiden dari partainya sendiri.

Para pengamat politik menilai bahwa demonstrasi “No Kings” gelombang ketiga ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan aksi-aksi sebelumnya pada Juni dan Oktober 2025. Kali ini, momentumnya lebih tajam karena dikombinasikan dengan isu perang yang baru meletus, serta insiden kekerasan oleh aparat negara yang menyentuh langsung warga sipil.

Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, para penyelenggara gerakan “No Kings” menyatakan bahwa ini bukanlah aksi pamungkas. Mereka mengisyaratkan akan terus melakukan mobilisasi secara berkala, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang aksi mogok kerja nasional jika tuntutan mereka tidak didengarkan.

Aurora Britt, salah satu penggagas aksi di Richmond, menekankan bahwa waktu untuk bertindak santai telah usai.

“Richmond adalah kota yang kuat yang siap melawan,” ujarnya, menggambarkan semangat yang juga menyala di kota-kota lain.

Sementara itu, Gedung Putih tampaknya masih akan bertahan pada posisinya. Dengan menyebut aksi ini tidak signifikan, pemerintahan Trump berharap opini publik akan beralih dalam beberapa minggu ke depan. Namun, sejarah mencatat bahwa tekanan jalanan pernah menjadi faktor kunci dalam perubahan kebijakan besar di AS, terutama terkait perang dan hak-hak sipil.

MENELUSURI ARAH POLITIK LUAR NEGERI PRABOWO DI TENGAH PUSARAN GEOPOLITIK GLOBAL

Dalam kurang dari setahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan dinamika yang intens dalam politik luar negeri Indonesia. Berbagai langkah diplomatik yang diambil kerap menunjukkan dua arah yang berbeda. Di satu sisi, retorika “bebas aktif” terus digaungkan, termasuk janji untuk tidak terlibat dalam pakta militer asing.

Namun di sisi lain, realitas hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang transaksional, serta keputusan untuk bergabung dalam inisiatif perdamaian yang kontroversial, memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia masih berada di jalur non-blok yang selama ini menjadi identitas diplomasinya, atau sedang merumuskan ulang makna “bebas aktif” itu sendiri?

Kebijakan luar negeri bebas aktif yang diwarisi dari para pendiri bangsa memiliki dua kata kunci: “bebas, yang berarti Indonesia tidak memihak pada blok-blok kekuatan yang sedang berseteru, dan “aktif”, yang berarti berperan serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Namun, dalam praktiknya, konsistensi prinsip ini diuji oleh pragmatisme politik dan kepentingan nasional

jangka pendek.

Kontroversi Board of Peace: Antara Perdamaian dan Politik Transaksional

Salah satu sumber kebingungan utama berasal dari intensitas hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di era pemerintahan Donald Trump. Secara historis, Indonesia dan AS memiliki hubungan yang kompleks. Prabowo Subianto sendiri sempat mendapat larangan masuk ke AS selama satu dekade karena isu pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan peristiwa 1998. Larangan tersebut baru dicabut pada tahun 2020 saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, di periode pertama pemerintahan Trump.

Kini, hubungan yang tadinya tegang berubah menjadi kedekatan yang signifikan. Prabowo menjadi salah satu pemimpin yang paling getol membangun kemitraan dengan pemerintahan Trump yang baru. Hal ini paling nyata terlihat dari keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Trump.

Langkah ini diikuti dengan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 8.000 tentara ke Gaza



Jusuf Kalla

sebagai bagian dari “International Stabilisation Force”. Keputusan ini sontak memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun pengamat internasional.

Banyak pihak meragukan independensi forum ini. *The Guardian* dalam laporan editorial Februari 2026 menyebut BoP sebagai «instrumen negosiasi sepihak yang membalut kepentingan geopolitik Washington dalam bahasa kemanusiaan».

Ekonom senior Jeffrey Sachs juga mengkritik pendekatan Trump sebagai “*deal-making diplomacy*” yang memperlakukan kedaulatan rakyat Palestina sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan, bukan sebagai hak yang harus dipenuhi.

Yang lebih mencengangkan adalah

struktur keanggotaan BoP. Negara yang ingin menjadi anggota permanen dikabarkan harus membayar satu miliar dolar AS, sebuah angka yang memicu kritik bahwa forum ini adalah versi berbayar dari Dewan Keamanan PBB.

Menghadapi kritik, Presiden Prabowo membantah bahwa Indonesia membayar biaya tersebut. Dalam pernyataan yang diunggah di kanal YouTube kepresidenan pada 23 Maret 2026, ia menegaskan bahwa Indonesia hanya berkomitmen mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, bukan uang.

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami ingin menyumbang satu miliar dolar,” katanya.

Namun, penjelasan itu dinilai tidak cukup untuk meredam kritik. Bagi para pengamat, persoalan utamanya bukanlah soal uang, melainkan soal keberpihakan struktural. Dengan bergabung dalam forum yang dipimpin AS, Indonesia secara tidak langsung memberikan legitimasi pada kebijakan luar negeri Washington.

Ahmadie Thaha, kolumnis *Republika*, dalam tulisannya pada 27 Maret 2026, menyindir situasi ini dengan tajam.

“Di negeri ini, politik luar negeri kadang diperlakukan seperti konten media sosial: yang penting viral dulu, urusan kenyataan belakangan. Di papan yang sebenarnya, kita lebih mirip pion yang tersenggol-senggol, sambil tetap percaya diri merasa sebagai ratu,” tulisnya yang dikutip *Republika* (27/3/2026).

Kritik senada juga dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Dalam keterangan tertulis pada 7 Maret 2026, JK menyatakan bahwa Indonesia seharusnya bersikap tegas dalam konflik yang melibatkan Iran.



“Iran adalah negara yang diserang dan teraniaya. Logikanya, kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” ujar JK dikutip *Media Indonesia*.

JK juga menyoroti ketidakkonsistenan sikap Indonesia.

“Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” katanya.

Pernyataan JK ini penting karena ia adalah figur yang dikenal dekat dengan Prabowo dan memiliki pengalaman luas dalam diplomasi internasional. Kritik dari tokoh sekaliber JK menunjukkan bahwa keresahan terhadap arah kebijakan luar negeri tidak hanya datang dari kalangan akademisi atau oposisi, tetapi juga dari internal elit politik.

Mengutip *Times of Suriname*, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan pendiri “Foreign Policy Community of Indonesia” (FPCI), menyebut ide tersebut tidak realistis dan patut dipertanyakan mengapa

tidak melalui proses pertimbangan yang matang sebelum dipublikasikan.

Times of Suriname juga melaporkan Ian Wilson, pengajar politik dan keamanan dari Murdoch University, Australia, menilai bahwa tawaran ini justru memperkuat persepsi domestik bahwa Indonesia semakin selaras dengan kebijakan AS dan Israel, yang saat itu sedang dalam konflik dengan Iran.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Analisis dari “The Conversation” menyebut bahwa langkah Prabowo membawa Indonesia mendekati Trump mengindikasikan adanya transaksionalisme dalam diplomasi. Hubungan antara Prabowo dan Trump digambarkan sebagai “cermin pemimpin kuat” (strongman’s mirror), di mana kekuasaan dipersonalisasi dan hubungan dibangun atas dasar loyalitas dan keuntungan timbal balik, bukan pada prinsip-prinsip jangka panjang.

Bagi Prabowo, kedekatan ini memberikan keuntungan personal: ia mendapatkan pengakuan dari



pemimpin negara adidaya yang dulu pernah menolaknya. Bagi Indonesia, dampaknya lebih kompleks. Pengecualian tarif yang diberikan AS melalui “Agreement on Reciprocal Trade” (ART) memang menguntungkan secara ekonomi jangka pendek, namun hal ini dikhawatirkan mengorbankan posisi tawar Indonesia dalam isu-isu prinsipil, seperti hak asasi manusia dan kemerdekaan Palestina.

Mantan Duta Besar Dewi Fortuna Anwar mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu negara adidaya adalah situasi yang tidak sehat, sebagaimana pengalaman Indonesia sebelumnya dengan ketergantungan pada investasi China.

Kritik juga datang dari dalam negeri, bahkan dari partai oposisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa keputusan bergabung dengan Badan

Perdamaian bentukan AS dinilai menjadi ganjalan bagi Indonesia untuk bersikap netral dalam menghadapi krisis di Timur Tengah.

Hasto menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif adalah amanat konstitusi yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang mengharuskan Indonesia berdiri kokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain.

Doktrin Diplomasi Ketahanan dan Ambiguitas Strategi

Kebingungan arah politik luar negeri Prabowo tidak hanya tercermin dari langkah-langkah taktisnya, tetapi juga dari kerangka konseptual yang ditawarkan. Pada awal tahun 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono memperkenalkan konsep baru, yaitu Diplomasi Ketahanan.

Dalam pandangannya, dunia sedang

mengalami fragmentasi, penerapan hukum internasional bersifat selektif, dan tata kelola global melemah. Sebagai respons, Indonesia perlu membangun ketahanan, yang dimulai dari dalam negeri.

Secara sekilas, diplomasi ketahanan terdengar selaras dengan prinsip bebas aktif. Ia menekankan otonomi, kesiapsiagaan, dan keamanan warga negara. Namun, dalam analisis mendalam yang dimuat di East Asia Forum, konsep ini dinilai memiliki kelemahan mendasar, ia terlalu ambigu dan tidak terdefinisi dengan jelas.

Norman Joshua dari Stanford University menulis bahwa diplomasi ketahanan berisiko menjadi sekadar “bahasa kehati-hatian” (language of caution), bukan fondasi untuk strategi yang efektif.

Alih-alih menjadi kompas yang menunjukkan arah, diplomasi



Hasto Kristiyanto

ketahanan justru bisa digunakan untuk membenarkan khamenei hampir semua kebijakan tanpa bimbingan yang jelas.

Ketika hampir semua tantangan eksternal diperlakukan sebagai masalah keamanan (securitization), maka kebijakan ekonomi berubah menjadi kebijakan keamanan nasional, dan diplomasi menjadi reaktif. Padahal, prinsip bebas aktif secara historis berfungsi sebagai alat untuk menegaskan peran Indonesia di panggung dunia, bukan hanya untuk mengisolasi diri dari risiko.

Kekaburan konsep ini juga tercermin dalam prioritas kebijakan. Dalam pidato tahunan Menlu Sugiono, isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan internasional berbasis aturan nyaris tidak mendapat tempat. Peran ASEAN, yang merupakan pilar utama diplomasi lingkaran konsentris Indonesia, juga kurang mendapat penekanan dibandingkan kemitraan bilateral baru.

Dino Patti Djalal bahkan mengingatkan bahwa ada kekhawatiran di kawasan bahwa Indonesia kurang memprioritaskan ASEAN dan lebih memilih fokus pada panggung global. Jika dibiarkan, kekosongan strategi ini akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan



untuk membentuk lanskap geopolitik di sekitarnya.

Dampak Nyata: Tanker Tertahan dan Diplomasi yang Terseok

Kebingungan arah politik luar negeri Indonesia tidak hanya berhenti pada kritik di media. Ia berwujud nyata dalam bentuk dua kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz.

Konflik AS-Israel dengan Iran yang pecah pada 28 Februari membuat Iran memberlakukan pembatasan ketat di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan akan menembak kapal-kapal yang mencoba

melintas tanpa izin. Akibatnya, lalu lintas maritim di selat tersebut anjlok lebih dari 90 persen dibandingkan kondisi normal.

PT Pertamina International Shipping (PIS) memiliki empat kapal yang beroperasi di kawasan tersebut. Dua kapal, yakni *PIS Rinjani* dan *PIS Paragon*, berhasil melintas pada 10 Maret. Namun, dua lainnya, *Pertamina Pride* dan *Gamsunoro*, tertahan dan tidak mendapatkan izin lintas.

Sejak saat itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran melakukan koordinasi intensif. Juru Bicara Kemlu, Vahd



Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa komunikasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia.

Pada 27 Maret, angin segar mulai berembus. Kemenlu mengumumkan bahwa pemerintah Iran telah memberikan respons positif.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Nabyl.

Menyusul respons positif itu, PIS bersama Kemlu mulai membahas teknis pembebasan kedua kapal. Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menjelaskan bahwa fokus utama adalah keselamatan kru, kapal, dan muatan.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Meski ada kabar baik, kecepatan penanganan Indonesia dinilai masih kalah dibandingkan negara tetangga. Saut Gurning dari ITS mencatat bahwa Malaysia dan Thailand berhasil membebaskan kapal mereka lebih cepat karena menggunakan pendekatan “diplomasi kilat” melalui komunikasi langsung antarpemimpin

negara.

“Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, misalnya, berkomunikasi intensif dengan pemimpin Turki dan Mesir, tidak hanya Iran. Hal ini dilakukan demi membangun tekanan diplomatik kolektif,” ujar Saut.

“Menurut saya, kita masih melihat tertahannya dua kapal kita belum menjadi *point of urgency*. Sementara negara lain menempatkan kondisi ini sebagai hal penting,” tambahnya.

Analisis Saut ini menyentuh akar persoalan: koordinasi diplomatik Indonesia masih terjebak dalam birokrasi yang lamban, sementara negara lain bergerak cepat dengan pendekatan lintas negara.

Yang tak kalah penting adalah bahwa tertahannya kapal tanker ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia terkait erat dengan kasus lain yang lebih sensitif: penyitaan kapal tanker Iran, MT Arman 114, di perairan Batam.

Ahmadie Thaha dalam tulisannya mengungkap bahwa MT Arman 114, kapal tanker Iran yang membawa 166.975 metrik ton minyak mentah, disita oleh pemerintah Indonesia pada 2023. Kapal itu diduga melakukan

transfer minyak ilegal dan mencemari laut. Nilai kapal beserta muatannya diperkirakan lebih dari Rp1,17 triliun.

Kasus ini, menurut Ahmadie, menjadi titik rawan dalam hubungan Indonesia-Iran.

“Ia berada di persimpangan antara hukum dan geopolitik,” tulisnya.

Dengan kata lain, ketika Indonesia bergabung dengan BoP pimpinan AS, Teheran memiliki alasan untuk mempertanyakan niat baik Pemerintah, apalagi ketika kapal Iran masih disita di perairan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam keterangannya di Tokyo pada 30 Maret, menyatakan bahwa negosiasi masih terus berlangsung dan ada sinyal positif.

“Ini masih terus dibahas, masih terus dinegosiasikan, dan ada sinyal positif. Kita lihat nanti implementasinya seperti apa,” ujarnya.

Pernyataan ini memberikan harapan, tetapi juga menyisakan pertanyaan: mengapa prosesnya begitu alot? Apakah karena Indonesia dianggap terlalu dekat dengan AS? Ataukah ada persoalan teknis yang belum terselesaikan?

Membaca Sinyal: Antara Pragmatisme dan Upaya Kembali ke Rel Konstitusi

Meski sempat menunjukkan kecenderungan yang membingungkan, beberapa bulan terakhir memperlihatkan adanya upaya dari pemerintahan Prabowo untuk mengoreksi arah. Tekanan domestik dan dinamika global yang berubah cepat tampaknya memaksa adanya penyesuaian.

Perang AS dan Israel vs Iran serta tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, menjadi ujian berat bagi konsistensi politik luar negeri

**Vahd Naby Achmad Mulachela**

Indonesia.

Dalam situasi ini, Presiden Prabowo mengambil langkah yang kontras dengan kebiasaan sebelumnya. Indonesia secara resmi mengutuk serangan tersebut dan menawarkan diri menjadi mediator.

“Jika Iran menerima kami, dan jika negara-negara Teluk masih mempercayai kami, itu bagus. Mungkin kami bisa menjadi mediator,” ujar Prabowo yang dikutip Anadolu.

Yang lebih penting adalah penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip non-blok secara terbuka. Dalam berbagai kesempatan setelah serangan Iran, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa menerima pangkalan militer asing dan tidak ingin bergabung dengan pakta militer apa pun.

Ia juga membatalkan rencana pengiriman 8.000 tentara ke Gaza di bawah bendera Badan Perdamaian pimpinan Trump, sebuah langkah yang sebelumnya memicu banyak kontroversi.

Penegasan ini semakin kuat ketika Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Jepang pada akhir Maret 2026 menyatakan di hadapan para pengusaha Jepang bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu berprinsip non-blok.

Ia mengulang filosofi yang kerap

**Ayatollah Ali Khamenei**

ia gunakan, “seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” sambil menegaskan bahwa Indonesia adalah negara terbuka yang bergantung pada perdagangan dan kemitraan ekonomi erat.

Sinyal ini ditangkap positif oleh kalangan politisi. Hasto Kristiyanto dari PDIP menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo sedang berupaya mengembalikan politik luar negeri ke rel konstitusi. Menurut Hasto, langkah-langkah Presiden setelah serangan AS-Israel ke Iran menunjukkan adanya upaya koreksi atas kebijakan sebelumnya, termasuk upaya agar PBB mengambil sikap tegas.

Ia menekankan bahwa pembelaan terhadap kemerdekaan bangsa lain adalah amanat Pembukaan UUD 1945 yang harus dilanjutkan oleh setiap presiden.

Arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memang menyisakan teka-teki. Dalam satu periode, kita melihat ketergesaan untuk mendekati Washington dengan model diplomasi transaksional yang berisiko. Di saat yang sama, kita juga menyaksikan upaya untuk kembali ke prinsip bebas aktif ketika situasi krisis Timur Tengah memuncak.

Kebingungan ini, setidaknya,

**Anwar Ibrahim**

dapat dijelaskan oleh tiga faktor. Pertama, adanya tarik-menarik antara kepentingan pragmatis jangka pendek, seperti insentif ekonomi dan pengakuan internasional dengan prinsip-prinsip konstitusional jangka panjang.

Kedua, belum terdefinisiannya secara jelas apa yang dimaksud dengan “diplomasi ketahanan” sebagai kerangka kebijakan, sehingga seringkali kebijakan luar negeri terlihat seperti manajemen risiko yang reaktif, bukan strategi proaktif.

Ketiga, dinamika politik domestik dan tekanan publik yang kuat, terutama dari kelompok masyarakat sipil dan partai politik yang concern terhadap warisan konstitusional Bung Karno, menjadi faktor pengimbang yang efektif.

Pernyataan terbaru Presiden di Jepang dan penolakannya terhadap pangkalan militer asing adalah sinyal penting. Namun, dalam dunia geopolitik yang sedang bergolak, retorika harus dibuktikan dengan konsistensi kebijakan.

Seperti yang diingatkan oleh Norman Joshua, diplomasi yang hanya dibangun di atas ketahanan mungkin akan selamat dari badai, tetapi tidak akan pernah mampu membentuk arah angin.

TUNGGU AKU SUKSES NANTI, MEJA MAKAN SEBAGAI METAFORA LUKA DAN HARAPAN

Dalam budaya Indonesia, meja makan saat Lebaran bukan sekadar tempat menyantap hidangan, melainkan ruang simbolis yang sarat makna. Film *Tunggu Aku Sukses Nanti* menangkap esensi itu dengan sangat tajam. Meja makan menjadi metafora luka dan harapan: di satu sisi ia menghadirkan nostalgia, kebersamaan, dan rasa syukur; di sisi lain ia membuka kembali luka lama, rasa iri, dan ekspektasi yang belum selesai.

Lebaran di Indonesia selalu identik dengan silaturahmi. Keluarga besar berkumpul, hidangan khas tersaji, dan percakapan mengalir. Namun, di balik suasana hangat itu, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang menekan: kapan menikah, kapan punya anak, kapan sukses. Meja makan menjadi panggung di mana pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan, kadang dengan nada bercanda, kadang dengan nada menghakimi. Film ini dengan cermat menyoroti bagaimana meja makan bisa menjadi ruang yang menegangkan,

tempat di mana luka lama kembali menagih jawaban.

Arga, tokoh utama, duduk di meja makan dengan beban masa lalu yang terus menghantuinya. Ia merasa selalu disalahkan, dibandingkan dengan sepupu yang lebih sukses, dan melihat orang tuanya dimanfaatkan oleh keluarga besar. Meja makan menjadi arena di mana semua perasaan itu kembali hidup. Kamera Naya Anindita sering menyorot detail kecil: sendok yang diletakkan dengan keras, tatapan mata yang penuh penilaian, atau senyum tipis yang menyimpan luka. Semua itu memperkuat pesan bahwa meja makan adalah tempat di mana keluarga bisa saling menguatkan, tetapi juga bisa saling melukai.

Namun, meja makan juga menghadirkan harapan. Di sanalah Arga berusaha menunjukkan bahwa ia mampu bangkit, bahwa ia tidak selamanya menjadi anak yang dianggap gagal. Percakapan di meja makan, meski penuh ketegangan, juga membuka ruang untuk



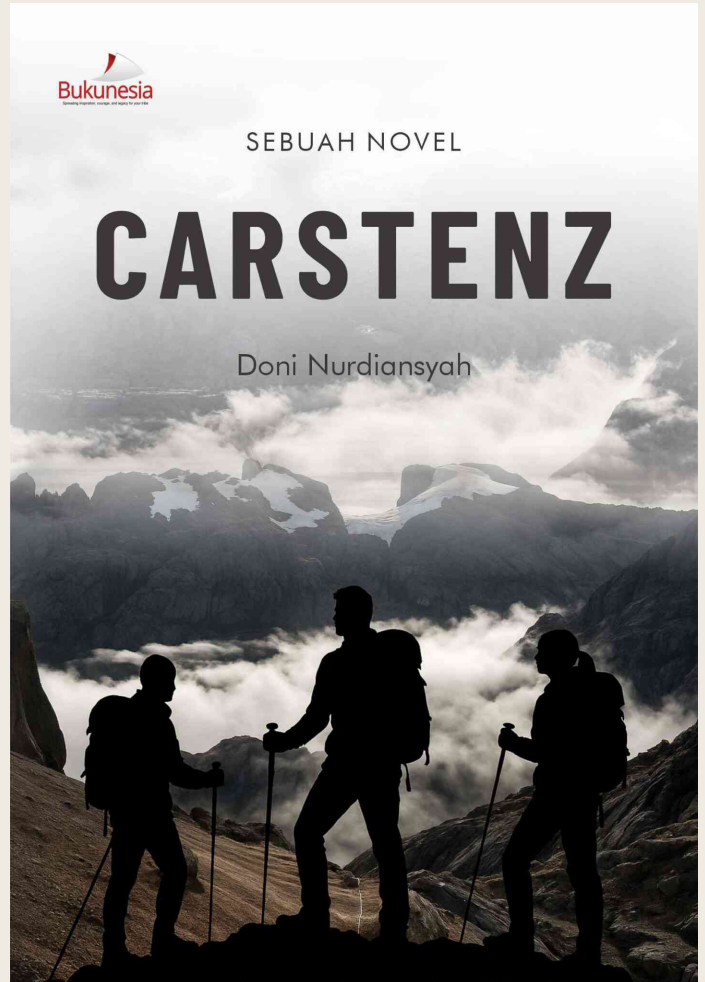
pengakuan dan penerimaan. Meja makan menjadi metafora perjalanan hidup: ada rasa pahit yang harus ditelan, tetapi juga ada kesempatan untuk merasakan manisnya kebersamaan.

Dalam tradisi Lebaran Indonesia, meja makan adalah simbol silaturahmi. Hidangan seperti ketupat, opor ayam, dan sambal goreng hati bukan hanya makanan, tetapi juga simbol kebersamaan. Film ini menempatkan simbol itu dalam konteks sosial yang lebih luas: bagaimana meja makan bisa menjadi ruang untuk menyembuhkan luka, tetapi juga bisa memperdalam jurang jika komunikasi tidak terjalin.

Dengan fokus pada meja makan sebagai metafora, *Tunggu Aku Sukses Nanti* berhasil menghadirkan drama yang intim sekaligus universal. Ia mengajak penonton merenungkan

bagaimana ruang sederhana dalam rumah bisa menyimpan begitu banyak cerita, luka, dan harapan. Film ini tidak hanya menampilkan konflik keluarga, tetapi juga mengajak kita melihat meja makan sebagai cermin kehidupan: tempat di mana kita belajar menerima, memaafkan, dan berharap.

Meja makan dalam film ini merepresentasikan tradisi Lebaran sebagai ruang sosial yang kompleks. Ia bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga arena di mana generasi muda berjuang untuk diakui, dan generasi tua belajar untuk melepaskan ekspektasi. Dengan begitu, film ini tidak hanya menjadi drama keluarga, tetapi juga refleksi budaya tentang arti silaturahmi, luka, dan harapan dalam masyarakat Indonesia.



**CARSTENZ:
GUNUNG, MIMPI, DAN
LUKA YANG DISEMBUHKAN**

Novel *Carstenz* karya Doni Nurdiansyah bisa dikembangkan lebih jauh sebagai sebuah refleksi budaya tentang bagaimana pendakian gunung di Indonesia bukan hanya aktivitas fisik, melainkan simbol perjuangan, kebanggaan, dan pencarian jati diri. Carstenz Pyramid, sebagai puncak tertinggi di Indonesia, menjadi metafora yang kuat: ia berdiri sebagai tantangan yang tampak mustahil, namun justru di situlah semangat anak muda diuji.

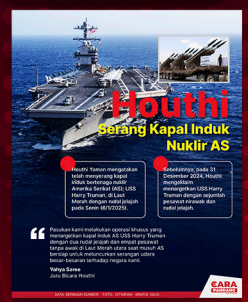
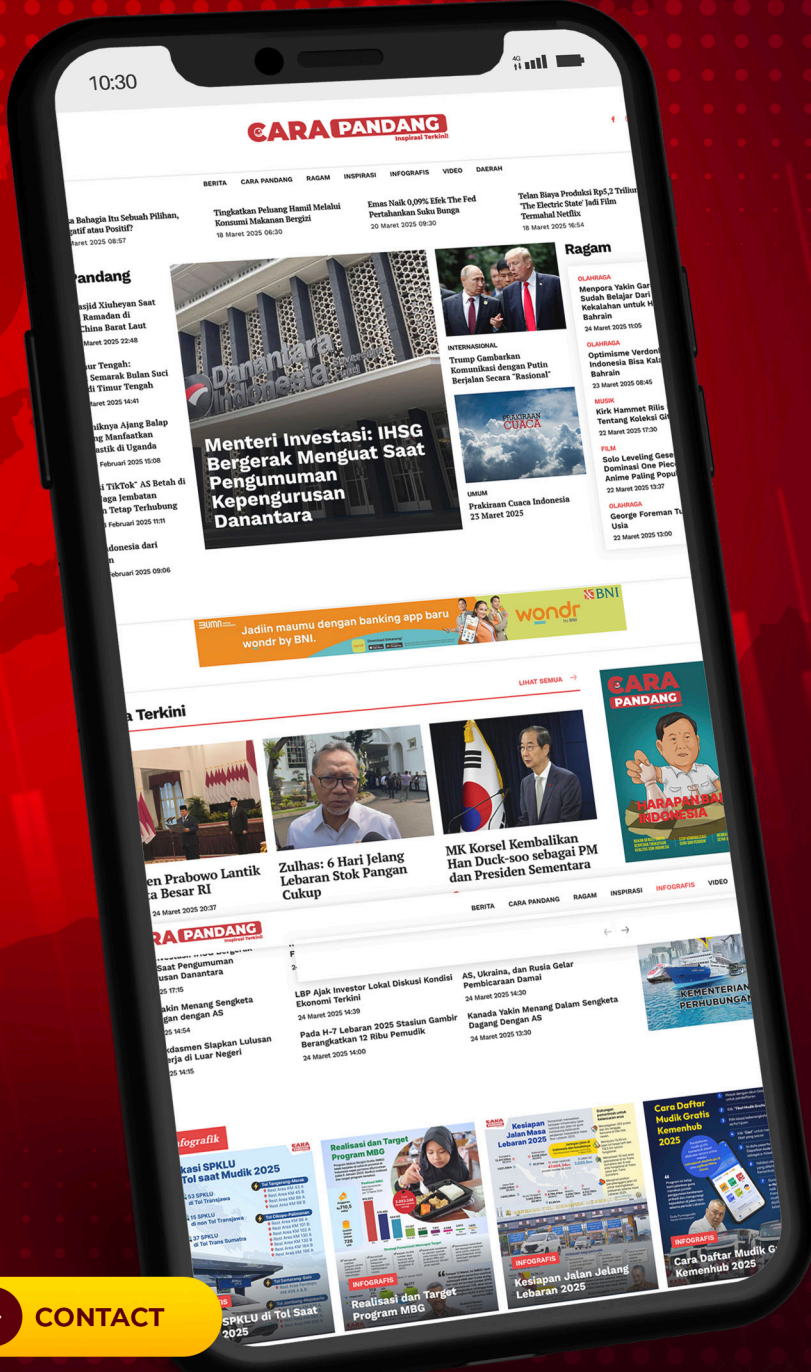
Dalam konteks budaya Nusantara, gunung selalu memiliki makna spiritual dan sosial. Gunung dipandang sebagai tempat sakral, pusat energi, sekaligus simbol keteguhan. Novel *Carstenz* menempatkan tradisi itu dalam narasi modern: tiga mahasiswa dari latar belakang berbeda mendaki bukan hanya untuk menaklukkan alam, tetapi juga untuk menaklukkan rasa takut, keterbatasan, dan ekspektasi sosial. Pendakian menjadi ruang negosiasi identitas, di mana anak muda berusaha membuktikan diri, mencari pengakuan, dan menemukan makna hidup.

Simbolisme gunung dalam novel ini bisa dibaca sebagai representasi krisis dan harapan generasi muda Indonesia. Krisis muncul dalam bentuk tekanan

akademik, ekspektasi keluarga, dan rasa tidak percaya diri. Harapan muncul dalam bentuk solidaritas, persahabatan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Setiap langkah mendaki adalah simbol perjuangan menghadapi realitas yang keras, sementara puncak Carstenz menjadi lambang pencapaian mimpi yang selama ini dianggap mustahil.

Novel ini juga relevan dengan tren literasi Indonesia yang semakin menekankan pada kisah-kisah tentang perjalanan diri dan refleksi sosial. *Carstenz* bukan hanya cerita petualangan, tetapi juga cermin kehidupan anak muda yang berjuang di tengah keterbatasan. Ia mengajak pembaca untuk melihat bahwa pendakian gunung adalah metafora perjuangan hidup: dingin, keras, penuh risiko, tetapi justru di sanalah nyali dan tekad diuji.

Dengan demikian, *Carstenz* bisa dibaca bukan hanya sebagai novel petualangan, tetapi juga sebagai karya sastra yang menempatkan gunung sebagai simbol budaya dan sosial. Ia menghubungkan tradisi spiritual Nusantara dengan semangat modern anak muda, menjadikan pendakian sebagai metafora universal tentang mimpi, krisis, dan harapan.



→ CONTACT

0812 1037 9124

carapandangcom@gmail.com

WWW.CARAPANDANG.COM